



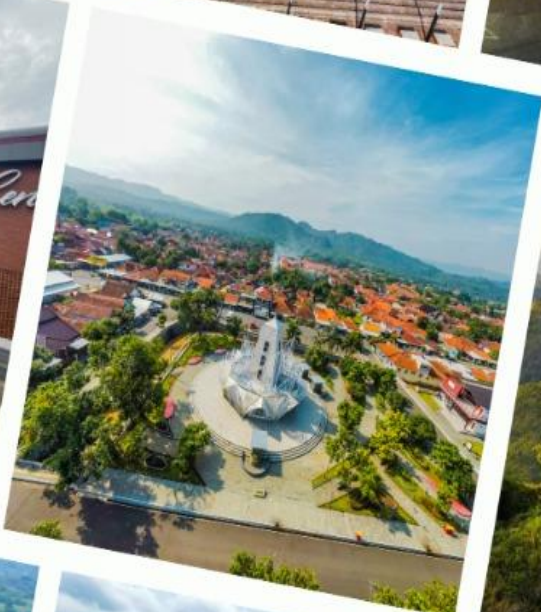
bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LKIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA



KATA PENGANTAR



Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Majalengka yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2022, sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimaksudkan sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah serta jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas sebagai sarana untuk mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja.

Sebagai upaya aktualisasi akuntabilitas kinerja dan publikasi informasi tentang realisasi anggaran serta capaian target indikator kinerja, maka pada akhir pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Tahun 2022 disusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Majalengka Tahun 2022. Penyusunan dokumen ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejumlah capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka yang ditargetkan telah berhasil dilaksanakan. Capaian kinerja ini telah dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui hambatan dan kelemahan yang terjadi, serta merencanakan strategi pemecahan masalah yang diperlukan sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perencanaan yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 ini menjadi ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang dijalankan serta dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dan mendorong peningkatan kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka.

Majalengka, Maret 2023

BUPATI MAJALENGKA

Dr. H. KARNA SOBAHI., M.M.Pd.

TIM PENYUSUN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

MELATI PUJILESTARI, S.STP., M.SI.

KETUA TIM PENYUSUN LKIP

ASEP FAJAR ALIWARDANA, S.IP.

ANGGOTA TIM

RIMA RAHMAWATI PUTRI, S.AP.

DINI MEILINDA, S.E.

RIZKIE TUBAGUS SHAKTI, S.M.

AFRIZAL ASHARY GHAZWAN, S.M.

L 2
K 0
I 2
P 2





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
INSPEKTORAT

Jalan K.H. Abdul Halim No. 520 Majalengka Kode Pos 45413
Telepon (0233) 281157 Faximile (0233) 281157

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, sebagian besar tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini, kecuali hal-hal tertentu yang secara lengkap tertuang dalam Laporan Hasil Reviu sebagaimana terlampir.



HENDRA KRISNIAWAN, S.STP.,CGCAE

Pembina Tingkat 1

NIP. 19780226 199703 1 002

DAFTAR ISI

- KATA PENGANTAR**
- PERNYATAAN TELAH DIREVIU**
- DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN

1

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH

DATA KEPEGAWAIAN

ISU STRATEGIS

BAB II PERENCANAAN KINERJA

9

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PERJANJIAN KINERJA Tahun 2022

RENCANA ANGGARAN Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

15

PENGUKURAN KINERJA Tahun 2022

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KEUANGAN

106

BAB IV PENUTUP

- LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN



- **Gambaran umum Pemerintah Daerah**
- **Data Kepegawaian**
- **Isu Strategis**

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah

Kabupaten Majalengka memiliki kedudukan yang sama dengan Daerah lainnya yaitu sebagai Daerah Otonom yang diharapkan mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka mencakup seluruh urusan pemerintahan konkuren, kecuali urusan bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama, serta Kewenangan Bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

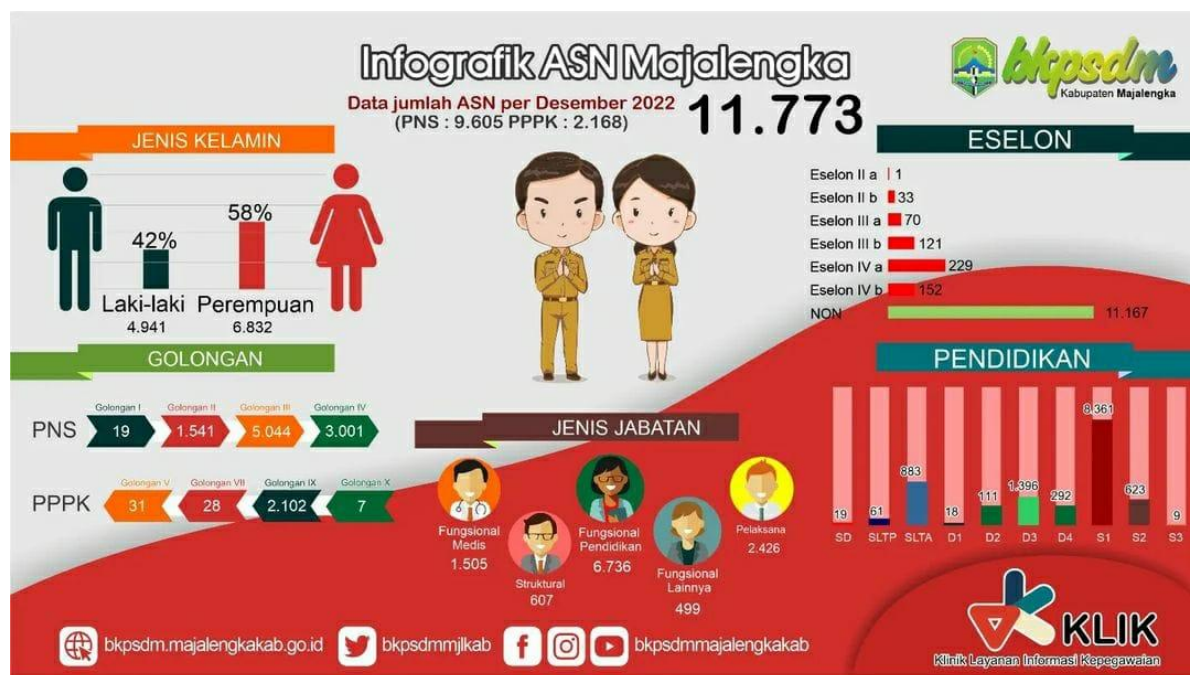
Urusan konkuren tersebut terdiri atas:

1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Urusan Sosial.
2. Urusan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

| 54 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
| SEKRETARIAT DAERAH | | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | | INSPEKTORAT | |
| BADAN | | | | KECAMATAN | |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | KEC. ARGAPURA | KEC. BANJARAN | | |
| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BADAN PENDAPATAN DAERAH | KEC. BANTARUJEG | KEC. CIGASONG | | |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | KEC. CIKIJING | KEC. CINGAMBUL | | |
| DINAS | | | | KEC. DAWUAN | KEC. JATITUJUH |
| DINAS PENDIDIKAN | DINAS SOSIAL | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | KEC. JATIWANGI | KEC. KADIPATEN | |
| DINAS KESEHATAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | DINAS PERHUBUNGAN | KEC. KASOKANDEL | KEC. KERTAJATI | |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | DINAS KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | KEC. LEMAHSUGIH | KEC. LEUWIMUNDING | |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | KEC. LIGUNG | KEC. MAJA | |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | KEC. MAJALENGKA | KEC. MALAUSMA | |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | KEC. PALASAH | KEC. PANYINGKIRAN | |
| DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | KEC. RAJAGALUH | KEC. SINDANG | |
| | | | KEC. SINDANGWANGI | KEC. SUKAHAJI | |
| | | | KEC. SUMBERJAYA | KEC. TALAGA | |

B. Data Kepegawaian

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Majalengka berjumlah 11.773 dengan rincian sebagai berikut:



Terkait dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, Pemerintah Kabupaten Majalengka termasuk dalam kategori 1, yakni melaksanakan penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional sebanyak 251 orang serta melakukan pelantikan 100% sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021.

C. Isu Strategis

Berdasarkan gambaran umum kondisi Kabupaten Majalengka pada 5 tahun terakhir yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, maka isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat
Seiring akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Majalengka yang diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan sektor industri, maka kebutuhan akan SDM berkualitas yang siap diserap merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Kualitas SDM salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan output lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Program penguatan pendidikan karakter (PPK) ke depannya akan wajib diterapkan di sekolah-sekolah, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) PPK Nomor 87 tahun 2017 yang baru saja disahkan. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga

sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Selain pendidikan karakter, pendidikan inklusif pun perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mencetak SDM yang mampu berdaya saing secara berkeadilan. Pengembangan Pendidikan Inklusif merupakan sebuah strategi dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kehidupan, daya saing serta kehormatan dan martabat bangsa. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan kejuruan harus lebih terbuka bagi semua individu, serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu, ramah dan tidak diskriminatif.

2. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial lainnya

Pemerintah Kabupaten Majalengka senantiasa berupaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2018 penduduk miskin di Kabupaten Majalengka sebesar 10,79 persen, sedangkan tahun 2019 sebesar 10,08 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,61 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat.

3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sektor pariwisata termasuk ke dalam prioritas utama pembangunan di Kabupaten Majalengka. Nilai strategis dari pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan kreatif diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah di masa mendatang. Objek wisata yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan saat ini adalah wisata Gunung Panten atau yang kini lebih dikenal objek wisata paralayang. Kecenderungan tren wisata minat khusus yang meningkat menjadikan pengembangan wisata olahraga paralayang sangat strategis untuk menjadi destinasi wisata andalan dan khas di Kabupaten Majalengka.

Prioritas pengembangan kedua adalah wisata Sangraja, di Kelurahan Cigasong, yang obyeknya berupa kolam renang pemandian air panas, menyerupai pemandian air panas Tampaksiring, Bali. Beberapa obyek wisata yang menjadi prioritas pengembangan lainnya adalah wisata Curug Muara Jaya Kecamatan Argapura, Situ Sangiang Kecamatan Banjaran, Terasering Panyaweuyan Kecamatan Argapura, dan kawasan wisata di Sindangwangi (KAWITWANGI). Diperlukan dukungan berbagai pihak terkait pengembangan obyek wisata seperti pemanfaatan jalan dan sumber air bersih serta pengelolaan berbagai sarana prasarana pendukung lainnya. Kesadaran masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata pun diperlukan sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

4. Kemandirian Desa

Kemandirian desa ditengah-tengah percepatan pembangunan daerah adalah hal mutlak yang harus diwujudkan karena kemandirian desa akan memberikan kontribusi besar terhadap capaian indikator kinerja daerah dalam berbagai sektor pembangunan. Kemandirian desa ini tidak semata pada penanaman nilai-nilai baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi lebih dari itu yaitu menumbuhkembangkan otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas desa dalam mengolah seluruh potensi kekayaan desa yang dimilikinya.

5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan BIJB Kertajati dan *Aerocity* berdampak pada alih fungsi lahan produktif yang terjadi secara signifikan dan potensi kerusakan lingkungan hidup di daerah sekitarnya. Dari 10 desa di kecamatan Kertajati, Desa Kertajati merupakan lumbung padi terbesar kedua. Berdasarkan data BPS Majalengka tahun 2017, luas lahan sawah di Kertajati mencapai 11.637 hektare dengan total produksi padi sekitar 78.297 ton. Keberadaan lahan pertanian kemungkinan besar akan terus beralih fungsi mengingat baru 930 hektare yang terbebaskan dari total luasan BIJB. Terkait masalah lingkungan, Kepala Departemen perencanaan Produk dan Kemitraan PT. BIJB memprediksikan bahwa sampah yang dihasilkan di tiga tahun pertama BIJB beroperasi yakni 1,5 ton perhari. Permasalahan lainnya terkait lingkungan adalah ketersediaan air bersih dan air baku yang mencukupi untuk kebutuhan

masyarakat. Perlu dipersiapkan langkah antisipatif, terutama ketika kawasan BIJB dan *Aerocity* Kertajati sudah mulai beroperasi.

6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat

Selain pendidikan, kualitas pembangunan manusia ditentukan juga oleh tingkat pelayanan kesehatan yang memadai. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Fasilitas kesehatan tingkat primer di Kabupaten Majalengka sendiri terdiri dari 32 Puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 71, Pusling sebanyak 48 dan bidan di Desa 308. Angka-angka tersebut belum termasuk faskes swasta, klinik swasta, DPP, RS swasta dan laboratorium medis swasta. Dari segi pemerataan pelayanan primer, Majalengka sudah cukup mendistribusikan fasilitas kesehatan ke semua kecamatan. Hal yang perlu diperhatikan terkait fasilitas kesehatan adalah mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Dari 32 Puskesmas terdapat 6 puskesmas yang sudah di akreditasi dan sisanya belum terakreditasi. Selain itu Puskesmas di Majalengka juga belum ada yang statusnya PPK/BLUD (Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, 2017). Untuk pelayanan tingkat sekunder, dari dua Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Majalengka hanya satu Rumah Sakit yang sudah akreditasi. Salah satu isu strategis untuk pengembangan pelayanan kesehatan di Majalengka yaitu kebutuhan akan sebuah klinik modern.

7. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data BPS, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Majalengka dari Tahun 2010–2018 cenderung stabil di bawah 0,5%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 mencapai 0,50% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi sekitar 0,48%, akan tetapi dengan pesatnya laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Majalengka pada saat ini, terutama pertumbuhan pada sektor industri dikhawatirkan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka pada masa yang mendatang. Hal itu berpotensi menyebabkan berbagai masalah kependudukan, antara lain meningkatnya jumlah penduduk miskin maupun permasalahan sosial lainnya. Pertumbuhan penduduk tersebut terjadi akibat tingkat kelahiran dan migrasi. Tingkat kelahiran dapat dikendalikan dengan program KB, sementara migrasi dapat dibatasi dengan regulasi pemerintah.

8. Reformasi Birokrasi.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19.

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dipublikasikan, Dokumentasi penyerahan LKIP kepada Kepala Daerah, Bukti Penyebaran LKIP kepada Perangkat Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pada RPJMD Perubahan hanya terdapat 309 program sedangkan sebelum RPJMD Perubahan terdapat 481 program.



Selanjutnya, ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2023 yaitu:

1. Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama;
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor, dengan sasaran yang terdiri atas menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor, dan pengurangan tingkat kemiskinan;
3. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat, dengan sasaran terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat;
4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yang terdiri atas terwujudnya akuntabilitas kinerja, terwujudnya akuntabilitas keuangan, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN;
5. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing, dengan sasaran yang terdiri atas meningkatnya mutu pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, meningkatnya kesejahteraan petani, meningkatnya kunjungan wisata, meningkatnya investasi sektor industri, meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa;
6. Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa, dengan sasaran meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

RPJMD Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan. Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 masih sama dengan Tahun 2021 yaitu 17 IKU. Akan tetapi, terdapat IKU yang dihapus yaitu Persentase Besaran Tunjangan Kinerja Berdasarkan Standar Kemenpan RB dan terdapat juga IKU yang ditambah yaitu Angka Stunting. Sedangkan untuk IKU Nilai Tukar Petani diubah menjadi Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian dan IKU Jumlah Industri Baru diubah menjadi Laju Pertumbuhan Sektor Industri.

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target Sebelum Perubahan | | | | | Target Setelah Perubahan | | | | |
|----|--|---|--|-----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|-----------|---|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat | Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama | Persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah | Persen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 2 | Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor | Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor | Indeks Gini | Persen | 0,335 | 0,333 | 0,33 | 0,328 | 0,328 | 0,34 | 0,339 | 0,337 | 0,33 | |
| | | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | Persen | 10,48 | 10,08 | 9,68 | 9,09 | 8,48 | 11,89 | 11,2 | 10,8 | 10,37 | |
| | | Penurunan Prevalensi Stunting | Angka Stunting | Persen | - | - | - | - | - | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | |
| 3 | Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat | Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Masyarakat | Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat | Persen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 4 | Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja | Nilai SAKIP | Nilai | B | BB | A | A | A | B | BB | BB | BB | |
| | | Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan | Opini BPK RI | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| | | Meningkatnya Profesionalisme, Kinerja dan Kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 88,5 | 89 | 89,5 | 89,8 | 90 | 59 | 60 | 60,5 | 61 | |
| 5 | Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing | Meningkatnya Mutu Pendidikan | Indeks Pengetahuan | Poin | 58,03 | 58,84 | 59,55 | 60,23 | 61,19 | 57,9 | 58,2 | 58,8 | 59,44 | |
| | | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Poin | 76,53 | 76,75 | 77,04 | 77,26 | 77,54 | 76,75 | 77,04 | 77,26 | 77,54 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak | Persen | 80,52 | 80,67 | 80,98 | 81,31 | 81,65 | 80,67 | 69,38 | 69,75 | 70,12 | |
| | | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian | Persen | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| | | Meningkatnya Kunjungan Wisata | Jumlah Kunjungan Wisata | Kunjungan | 619.335 | 681.269 | 749.396 | 824.335 | 906.769 | 500.000 | 525.000 | 850.000 | 1.000.000 | |
| | | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Laju Pertumbuhan Sektor Industri | Persen | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | |
| | | Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa | Jumlah Desa Tematik | Desa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 18 | 18 | |
| 6 | Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa | Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa | Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya | Desa | 36 | 51 | 52 | 41 | 41 | 51 | 52 | 41 | 25 | |

Sebagaimana RPJMD Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan, maka Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut dilakukan selain untuk menyesuaikan RPJMD yang mengalami perubahan, juga untuk meningkatkan kualitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|----|---|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama | Persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah | 2% |
| 2 | Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor | Indeks Gini | 0,339 |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | 11,20% |
| 4 | Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Masyarakat | Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat | 10% |

| | | | |
|----|---|--|---------|
| 5 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja | Nilai SAKIP | BB |
| 6 | Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan | Opini BPK RI | WTP |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B |
| 8 | Meningkatnya Profesionalisme, Kinerja dan Kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | 60 |
| | | Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | 30 |
| 9 | Meningkatnya Mutu Pendidikan | Indeks Pengetahuan | 59,55 |
| 10 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | 77,04 |
| 11 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman | Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sanitasi Layak | 77,04% |
| 12 | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Nilai Tukar Petani | 102 |
| 13 | Meningkatnya Kunjungan Wisata | Jumlah Kunjungan Wisata | 525.000 |
| 14 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Jumlah Industri Baru | 40 |
| 15 | Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa | Jumlah Desa Tematik | 26 |
| 16 | Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa | Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya | 52 |

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|----|---|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama | Persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah | 5% |
| 2 | Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor | Indeks Gini | 0,337 |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | 10,80% |
| 4 | Penurunan Prevalensi Stunting | Angka Stunting | 4% |
| 5 | Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenang, dan Tertib di Masyarakat | Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat | 10% |
| 6 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja | Nilai SAKIP | BB |
| 7 | Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan | Opini BPK RI | WTP |

| | | | |
|----|---|--|---------|
| 8 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B |
| 9 | Meningkatnya Profesionalisme, Kinerja dan Kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | 60,5 |
| 10 | Meningkatnya Mutu Pendidikan | Indeks Pengetahuan | 58,8 |
| 11 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | 77,26 |
| 12 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak | 69,75% |
| 13 | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian | 1% |
| 14 | Meningkatnya Kunjungan Wisata | Jumlah Kunjungan Wisata | 850.000 |
| 15 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Laju Pertumbuhan Sektor Industri | 5% |
| 16 | Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa | Jumlah Desa Tematik | 18 |
| 17 | Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa | Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya | 41 |

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, ditetapkan Rencana Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 yang terdiri dari:

| Uraian | Rencana Anggaran (Rp) | % |
|---|-----------------------------|------------|
| PENDAPATAN | | |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 538.264.437.943,00 | 17,47 |
| PENDAPATAN TRANSFER | | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 1.826.521.769.178,00 | 59,27 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 408.734.078.000,00 | 13,26 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 306.146.410.864,00 | 9,93 |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah | 2.000.000.000,00 | 0,06 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.081.666.695.985,00 | 100 |
| BELANJA | | |
| Belanja Operasi | 2.150.114.639.094,00 | 68,69 |
| Belanja Modal | 436.238.091.154,00 | 13,94 |
| Belanja Tak Terduga | 13.068.500.000,00 | 0,42 |
| Belanja Transfer | 530.798.014.829,00 | 16,96 |
| JUMLAH BELANJA | 3.130.219.245.077,00 | 100 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | (48.522.549.092,00) | |
| PEMBIAYAAN | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 74.552.549.092,00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan | 26.000.000.000,00 | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 48.552.549.092,00 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



- Pengukuran Kinerja 2022
- Analisis Capaian Kinerja
- Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam RPJMD. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2022 rata-rata sebesar 137%. Sebanyak 11 indikator mencapaian kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 6 indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Capaian IKU



Pengukuran Kinerja Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|--|---------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama | Persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah | 5% | 5% | 100% |
| 2 | Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor | Indeks Gini | 0,337 | 0,367 | 91,83% |
| 3 | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | 10,80% | 11,94% | 90,45% |
| 4 | Penurunan Prevalensi Stunting | Angka Stunting | 4% | 3,84% | 104,2% |
| 5 | Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tentram, dan Tertib di Masyarakat | Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat | 10% | 8% | 80% |
| 6 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja | Nilai SAKIP | BB | B | 95,84% |
| 7 | Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan | Opini BPK RI | WTP | WTP* | 100%* |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B | B | 100% |
| 9 | Meningkatnya Profesionalisme, Kinerja dan Kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | 60,5 | 57,14 | 94,45% |
| 10 | Meningkatnya Mutu Pendidikan | Indeks Pengetahuan | 58,8 | 58,97 | 100,29% |
| 11 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | 77,26 | 78,09 | 101,07% |
| 12 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak | 69,75% | 69,76% | 100,01% |
| 13 | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian | 1% | 5,68% | 568% |
| 14 | Meningkatnya Kunjungan Wisata | Jumlah Kunjungan Wisata | 850.000 | 818.543 | 96,30% |

| | | | | | |
|------------------|--|--|----|--------|-------------|
| 15 | Meningkatnya Investasi Sektor Industri | Laju Pertumbuhan Sektor Industri | 5% | 13,34% | 266,8% |
| 16 | Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa | Jumlah Desa Tematik | 18 | 18 | 100% |
| 17 | Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa | Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya | 41 | 55 | 134,15% |
| Rata-rata | | | | | 137% |

Keterangan :

* = data menggunakan pengukuran Tahun 2021



Faktor

- ☐ Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan sosial dan masyarakat

Program

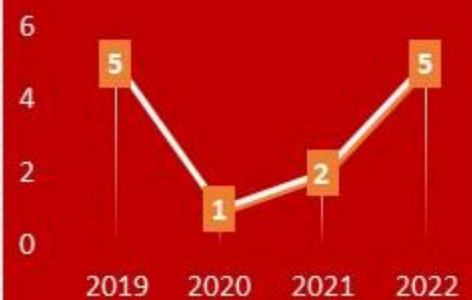
- ☐ Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Efisiensi

Efisiensi atas capaian Sasaran Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar **16,21%**,

PENINGKATAN PEMAHAMAN AGAMA

— Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktivitas di Rumah Ibadah



**SASARAN 1:
MENINGKATNYA PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN
AJARAN AGAMA**

Sasaran ini diukur oleh persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktivitas di Rumah Ibadah. Perangkat Daerah yang mengampu indikator kinerja ini yaitu Sekretariat Daerah.

Penanggungjawab IKU Sasaran 1 : SETDA



Persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah

Rata-rata jamaah yang beraktivitas di Rumah Ibadah mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan **tercapainya target pada Tahun 2022** yaitu peningkatan sebesar 5% atau sebanyak 50.452 jamaah dari jumlah jamaah **tahun sebelumnya** sebanyak 1.009.021 jamaah menjadi 1.059.472 jamaah yang tersebar di 343 Masjid Desa/Kelurahan. Capaian Tahun 2022 sama dengan capaian Tahun 2021 yaitu sebesar 100% atau tidak mengalami penurunan capaian maupun realisasi. Jika **membandingkan realisasi Tahun 2022 dengan RPJMD** sudah sesuai dengan target kenaikan pertahun yaitu



sebesar 5%. Target Peningkatan Jumlah Jamaah Yang Beraktivitas di Rumah Ibadah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Majalengka pada akhir RPJMD atau pada Tahun 2023 adalah sebesar 5%.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 5% | 5% | 2% | 5% |

Indikator persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah **tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat** maupun Nasional. Hal ini disebabkan karena tidak ada indikator di provinsi maupun di nasional yang sesuai untuk dibandingkan dengan indikator ini.

Target kinerja ini berhasil dicapai melalui intervensi **program** dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|----|---|--|--------------------|
| 1. | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | Rp6.869.615.000,00 |

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini yaitu meningkatnya kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan rata-rata jamaah beraktivitas di Rumah Ibadah diantaranya meningkatkan pemberian bantuan untuk Rumah Ibadah dalam bentuk sarana prasarana, bantuan partisipasi tokoh agama dan bantuan kapasitas kelembagaan keagamaan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait dengan pencapaian indikator ini antara lain mengaktifkan 343 rumah ibadah yang tersebar di Kabupaten Majalengka, memfasilitasi

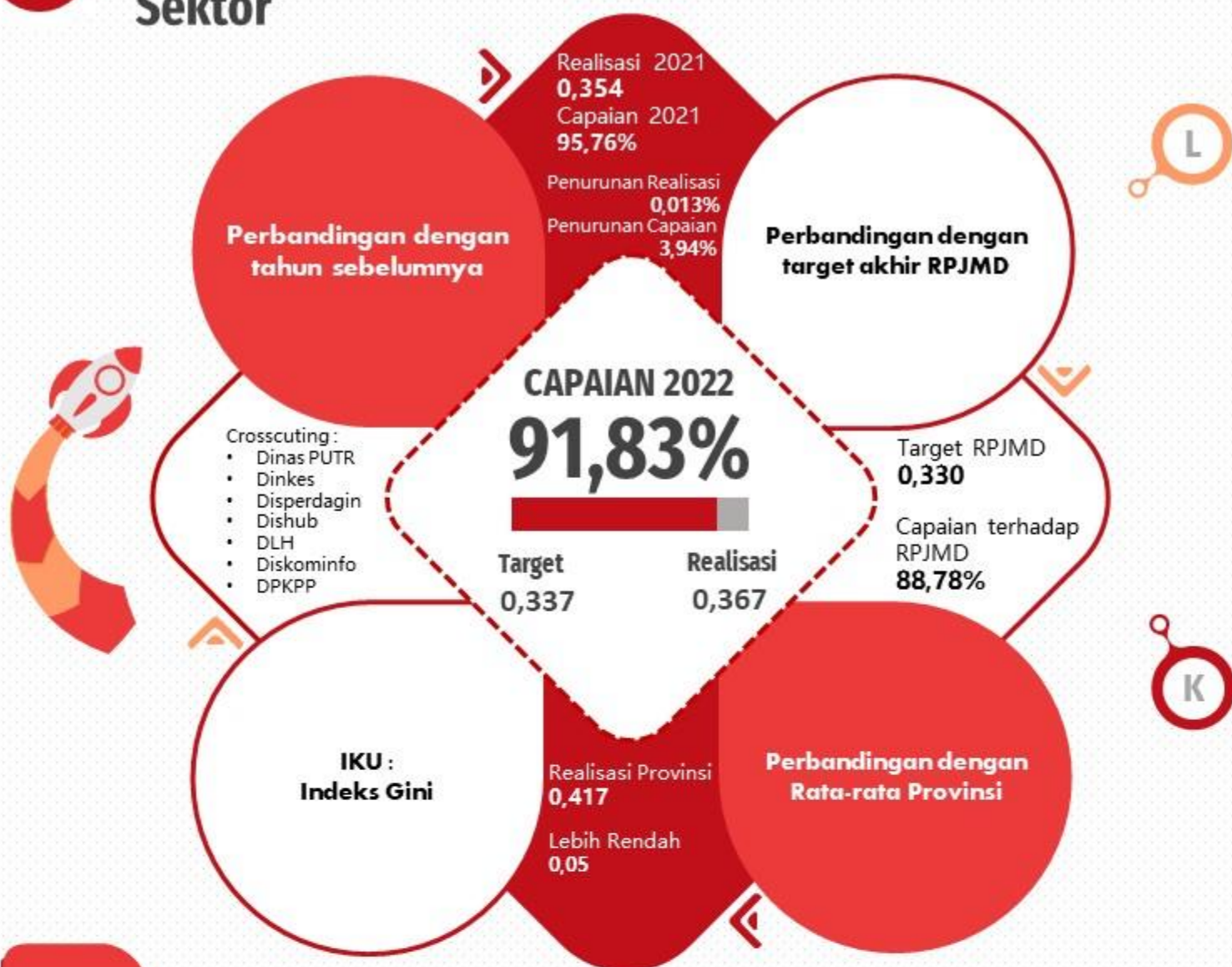


88 rumah ibadah dengan sarana prasarana ibadah yang memadai, memfasilitasi 17 lembaga keagamaan dan memfasilitasi 17 tokoh agama.

Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi serta capaian indikator ini yaitu memberikan bantuan sarana prasarana keagamaan agar dapat menunjang kemudahan masyarakat Kabupaten Majalengka dalam menjalankan ibadahnya. Selain itu, dapat dilakukan pula sosialisasi pengembangan manajemen masjid untuk mencapai kemakmuran masjid yang ideal.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja ini yaitu 16,21% atau sebesar Rp1.113.727.183,00 dari pagu anggaran Rp6.869.615.000,00 dengan realisasi Rp5.755.887.817,00.

Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor



Faktor

- Meningkatnya status Jalan yang mantap
- Meningkatnya pengelolaan sampah
- Meningkatnya jumlah desa yang terlayani angkutan umum
- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Program

- Program penyelenggaraan jalan
- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
- Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
- Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- Program informasi dan komunikasi publik
- Program pengembangan permukiman

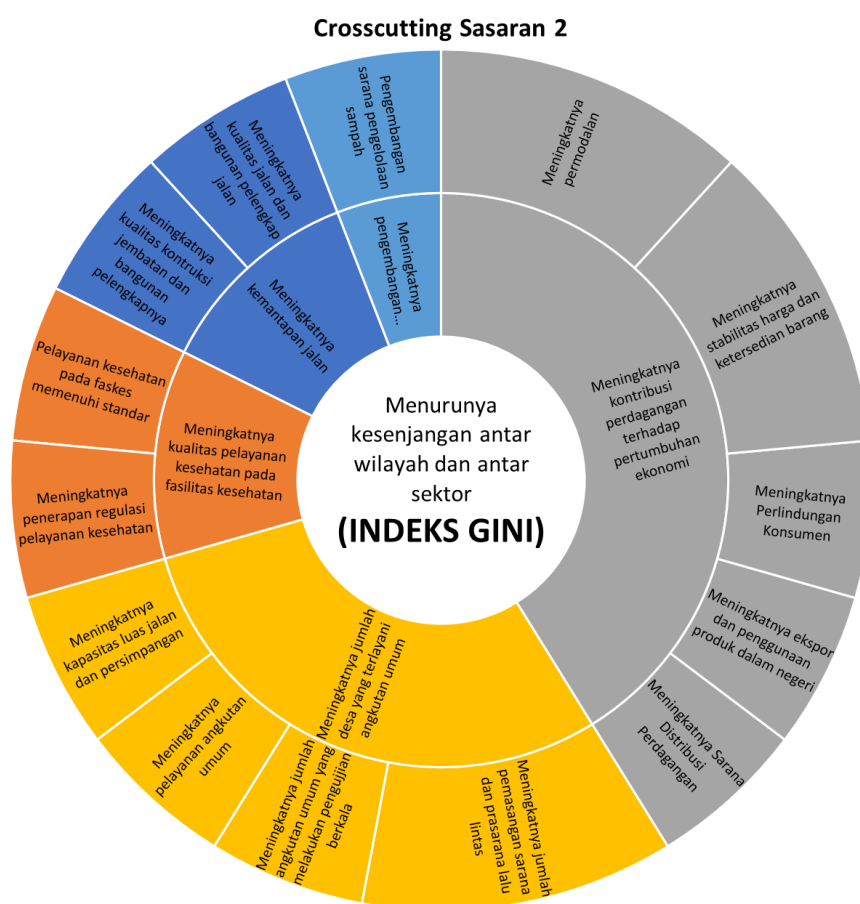
Efisiensi

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak ada karena IKU tidak mencapai 100%



**SASARAN 2:
MENURUNNYA KESENJANGAN ANTAR WILAYAH DAN ANTAR SEKTOR**

Sasaran ini diukur oleh Indeks Gini. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator kinerja ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Indeks Gini

Realisasi kesenjangan antar wilayah dan antar sektor di Kabupaten Majalengka **lebih rendah di dibandingkan dengan realisasi di Provinsi Jawa Barat dan realisasi Nasional.** Indeks Gini Kabupaten Majalengka lebih rendah 0,05



poin dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang mencapai 0,417 poin. Dengan Indeks Gini 0,367 poin menempatkan Kabupaten Majalengka pada peringkat ke 12 dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat. Jika

dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional yang mencapai 0,381 poin, Indeks Gini Kabupaten Majalengka lebih rendah 0,014 poin.

Pemerintah Kabupaten Majalengka merencanakan kondisi akhir Indeks Gini Kabupaten Majalengka dapat mencapai 0,330 poin. Melihat realisasi Indeks Gini pada Tahun 2022 yang mencapai 0,367 poin, jika **dibandingkan dengan target RPJMD** telah mencapai 88,79%. Realisasi indeks gini terhadap RPJMD mengalami percepatan capaian sebanyak 8,79% dari capaian ideal pada tahun keempat RPJMD. Hal ini membuktikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah berhasil dan *on the track* dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar sektor di Kabupaten Majalengka.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) | Realisasi Jawa Barat | Realisasi Nasional |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 0,337 | 0,367 | 0,354 | 0,330 | 0,417 | 0,381 |

Namun **kinerja Tahun 2022** masih belum maksimal karena hanya mencapai 91,83% dengan realisasi 0,367 poin. **Jika dibandingkan dengan Tahun 2021** yang kinerjanya mencapai 95,76% dengan realisasi 0,354 poin, kinerja Tahun 2022 mengalami penurunan realisasi sebesar 0,013 poin.

Faktor yang mempengaruhi Indeks Gini salah satunya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada Tahun 2022 PDRB Kabupaten Majalengka mencapai Rp24,3 Triliun. Pencapaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB Tahun 2021 yang hanya mencapai Rp22,7 Triliun. Selain itu, Pada Tahun 2022 juga perekonomian Kabupaten Majalengka mengalami pertumbuhan sebesar 6,63%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 4,69%. Hal ini dapat dilihat dari pengeluaran per kapita Kabupaten Majalengka pada Maret Tahun 2022 yang mencapai Rp1,3 Juta. Pengeluaran per kapita untuk kelompok makanan tercatat sebesar Rp665.757,00 dalam sebulan. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok bukan makanan sebesar Rp662.025,00 per bulan. Berdasarkan pengeluaran per kapita bukan makanan di perkotaan lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan di perdesaan dengan angka Rp828.159,00 dan di perdesaan Rp437.809,00. Hal ini yang membuat Kabupaten Majalengka pada Tahun 2022 mengalami ketimpangan sedang di angka 0,367 poin.

Untuk menurunkan ketimpangan tersebut dibutuhkan infrastruktur yang memadai seperti jalan dalam kondisi mantap sehingga kebutuhan barang pokok dapat terdistribusi dengan baik. **Upaya yang telah dilakukan** yaitu meningkatkan sarana akses transportasi yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Majalengka, melalui rekonstruksi atau peningkatan kapasitas struktur jalan, rehabilitasi, pembangunan jalan, dan pemeliharaan jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Bantuan Keuangan



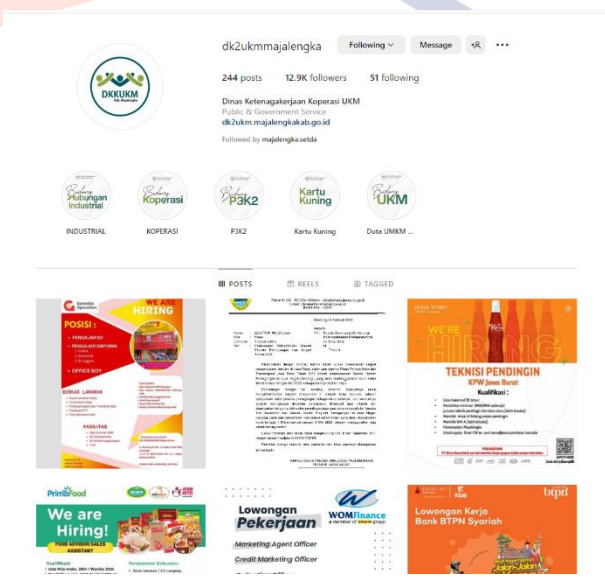
Provinsi. Dari total jalan Kabupaten sepanjang 918,73 km, jalan dalam kondisi mantap telah terealisasi sepanjang 807,10 km atau mencapai 103,52% dari target Tahun 2022 sepanjang 779,63 km.



Pada Tahun 2022 lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 15,01%. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan konsumen seiring dengan semakin banyaknya jumlah hunian di Kabupaten Majalengka. Sehingga diperlukan tempat pengolahan sampah yang merata di Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Majalengka mengembangkan sistem pengelolaan

persampahan dengan membangun TPS3R (Tempat Pembuangan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*) pada Tahun 2022 sebanyak 4 unit di 4 lokasi yaitu di Desa Cikijing, Desa Malausma, Desa Cikoneng, dan Desa Kutamangu. Total sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia pada Tahun 2022 sebanyak 55 unit atau 5,44% dari total kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yaitu sebanyak 1.011 unit. Pembangunan TPS3R pada Tahun 2022 sudah tercapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu 5,44%.

Untuk menurunkan ketimpangan informasi antara masyarakat yang berada di Perkotaan dan di Perdesaan diperlukan akses informasi yang sama. Salah satu informasi yang dibutuhkan untuk menurunkan ketimpangan ini adalah informasi mengenai kesempatan kerja. Dengan meratanya informasi terkait kesempatan kerja, maka setiap penduduk berkesempatan untuk mendapat pekerjaan baik itu penduduk yang ada di perkotaan maupun di perdesaan. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Majalengka pada Tahun 2022 sebesar 101,67% dengan realisasi 61 dari target 60. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Kabupaten Majalengka sudah cukup informatif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa upaya yang telah dilakukan seperti menyebarluaskan informasi terkait kebijakan publik melalui platform yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan mudah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.



Program-program Pemerintah Kabupaten Majalengka yang mendukung penurunan kesenjangan antar wilayah dan antar sektor meliputi:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|----|--|--|----------------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas PUTR | Rp160.018.715.622,00 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Rp1.057.616.657,00 |
| 3. | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Dinas Lingkungan Hidup | Rp2.580.000.000,00 |
| 4. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Rp136.900.000,00 |
| 5. | Program Pengembangan Permukiman | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Rp5.833.146.000,00 |
| 6. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Perhubungan | Rp8.579.826.431,00 |
| 7. | Program Pemenuhan UKP dan UKM | Dinas Kesehatan | Rp2.080.025.000,00 |

Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 6,63%, namun pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor industri yang membuat perubahan struktur ekonomi dari lapangan usaha pertanian bergeser ke lapangan usaha industri pengolahan sehingga dampak pertumbuhan di perdesaan yang memiliki wilayah agraris belum maksimal. **Hal ini menjadi salah satu faktor target yang sudah ditentukan pada Tahun 2022 belum bisa tercapai.**

Selain itu **faktor** lain yang mempengaruhi ketimpangan di Kabupaten Majalengka yaitu dari segi kemudahan akses pelayanan dasar kesehatan terutama di wilayah Majalengka Selatan. Hal ini membuat masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Majalengka lebih memilih mengunjungi fasilitas kesehatan di kabupaten lain yang



jarak tempuhnya lebih dekat. Permasalahan ini telah direspon dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaga. Namun RSUD Talaga yang telah dibangun tersebut sampai akhir Tahun 2022 belum dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dikarenakan proses penetapan (*legal formal*) Rumah Sakit masih berjalan.

Faktor-faktor tersebut yang membuat capaian menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor pada Tahun 2022 belum mencapai target.

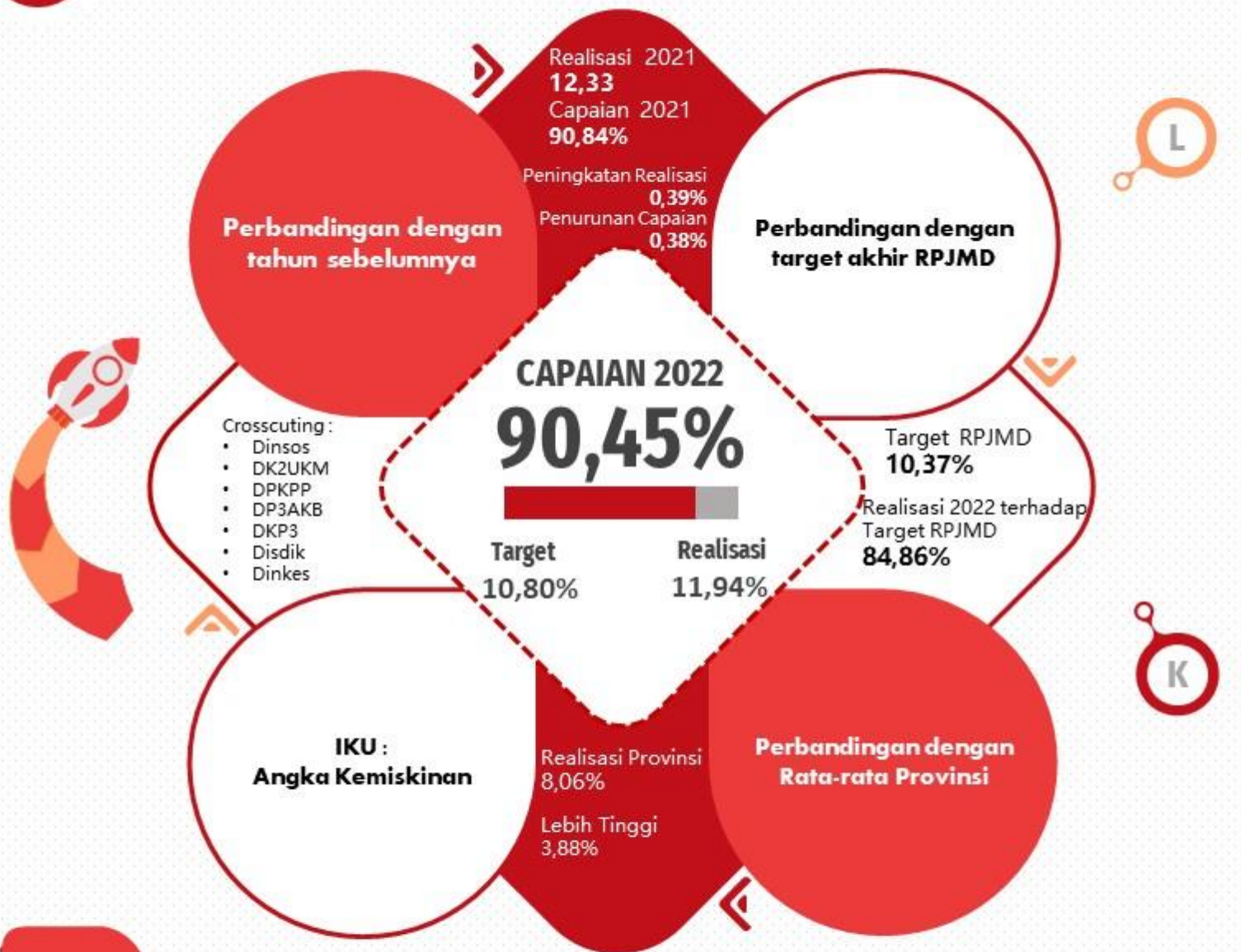
Untuk meningkatkan capaian pada Tahun 2023 **perlu dilakukan beberapa upaya**, yaitu sebagai berikut:

1. Membuat program padat karya dan mempermudah masuknya investasi di perdesaan sehingga kesempatan menjadi lebih terbuka dan pendapatan menjadi lebih merata.
2. Mempercepat pengoperasionalan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaga sesuai dengan ketentuan agar kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan semakin merata.
3. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jalan kabupaten yang kondisinya sudah baik dan sedang agar tetap dalam kondisi mantap, melanjutkan rekonstruksi, peningkatan, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi terhadap jalan kabupaten yang saat ini kondisinya rusak dan rusak berat.

4. Membuat layanan pengaduan jalan rusak baik itu di media sosial atau melalui *call center* guna memberikan tanggapan berupa aksi nyata perbaikan jalan berdasarkan aduan dari masyarakat.
5. Memperbanyak pembangunan TPS3R (Tempat Pembuangan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*) dan pengadaan sarana persampahan.

Efisiensi indikator indeks gini pada sasaran menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor tidak ada karena capaiannya hanya 91,83%.

Pengurangan Tingkat Kemiskinan



Faktor

- Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS
- Meningkatnya usia kerja yang bekerja
- Meningkatnya omset usaha mikro
- Meningkatnya layanan kesehatan bagi masyarakat

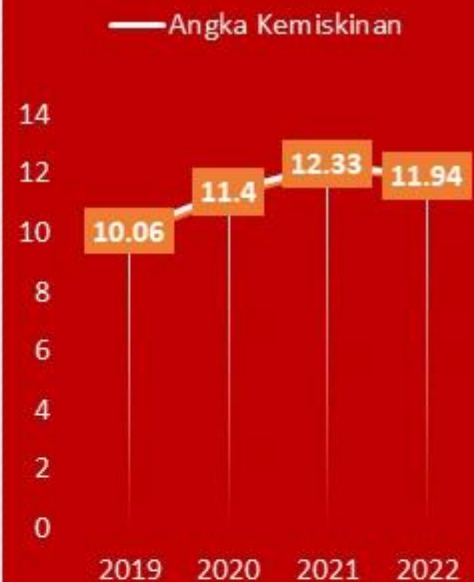
Program

- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Kawasan Permukiman
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Penempatan Tenaga Kerja

Efisiensi

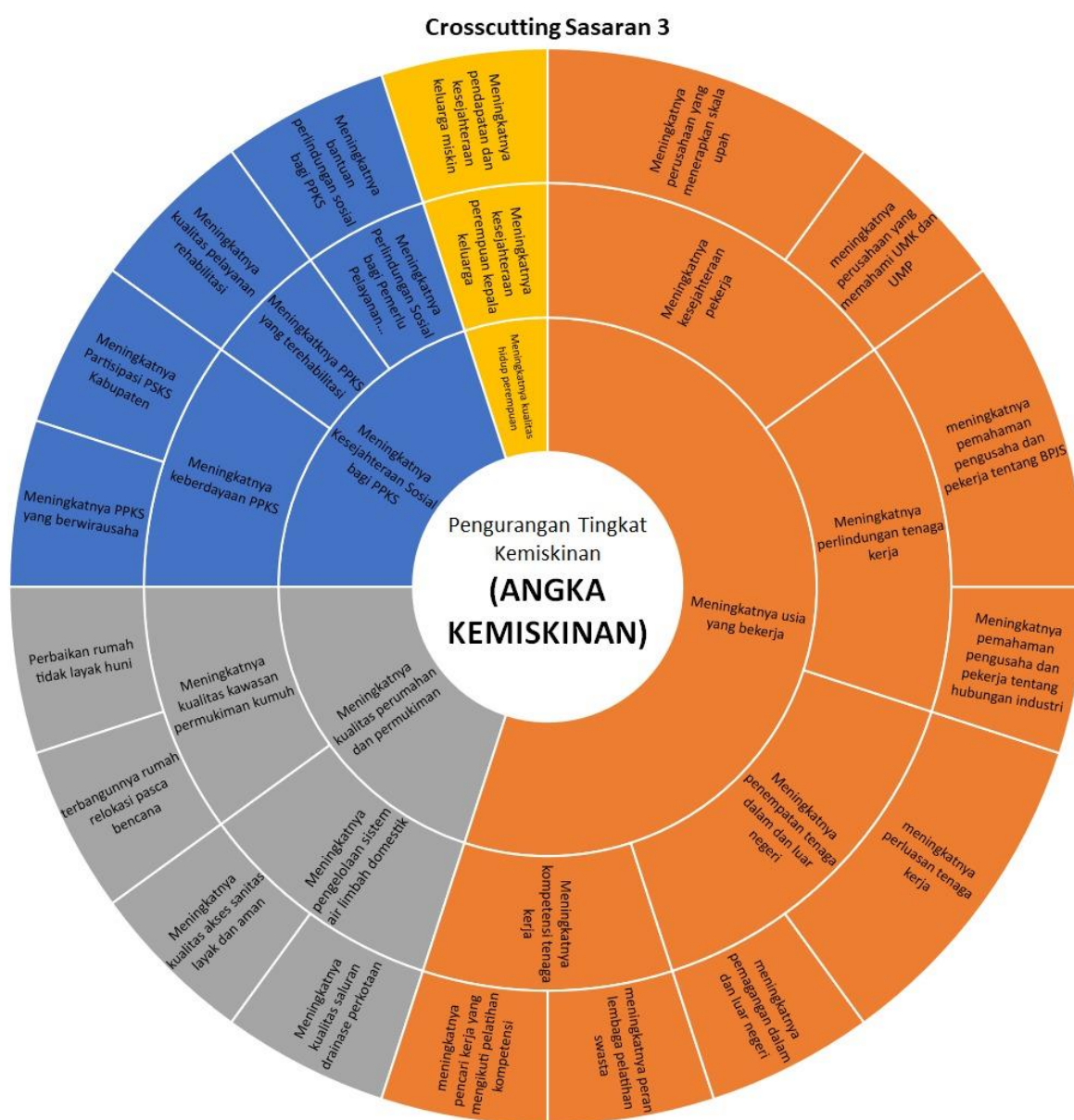
Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak ada karena IKU tidak tercapai 100%

ANGKA KEMISKINAN



**SASARAN 3:
PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN**

Sasaran ini diukur dengan Angka Kemiskinan. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator kinerja ini adalah Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini :



Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan. **Dibandingkan dengan Tahun 2021**, angka kemiskinan Tahun 2022 lebih rendah 0,39%. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2022 berkurang sebanyak 4.020 jiwa dari total penduduk miskin di tahun sebelumnya yang mencapai 151.140 jiwa, sehingga pada Tahun 2022 ini hanya berjumlah 147.120 jiwa.



Realisasi penurunan angka kemiskinan jika **dibandingkan dengan target akhir RPJMD** telah mencapai 84,86% atau mengalami percepatan capaian sebesar 4,86%. Hal ini menggambarkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mengurangi angka kemiskinan sudah melebihi target ideal tahun keempat RPJMD, meskipun capaian Tahun 2022 lebih rendah 0,38% dibandingkan dengan capaian Tahun 2021. **Capaian Tahun 2022** yaitu 90,45% dengan realisasi penurunan angka kemiskinan berada di angka 11,94% dari target 10,80%.

Jika **dibandingkan dengan angka kemiskinan rata-rata di Provinsi Jawa Barat**, angka kemiskinan Kabupaten Majalengka lebih tinggi 3,88%. Rata-rata angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat yaitu 8,06% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.070.980 jiwa. Sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Majalengka yaitu 11,94% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 147.120 jiwa. Namun demikian, tren angka kemiskinan menunjukkan bahwa Tahun 2022 justru menjadi titik balik bagi penurunan angka kemiskinan, karena mulai Tahun 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan kembali setelah di tahun-tahun sebelumnya terus mengalami kenaikan.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) | Realisasi Jawa Barat |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 10,8 | 11,94 | 12,33 | 10,37 | 8,06 |

Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah dan salah satu **faktor** untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Majalengka memberikan bantuan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bantuan sosial sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat



dari meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan bantuan sebanyak 156.032 jiwa dengan capaian 100% sesuai target. Melalui kegiatan rehabilitasi sosial, Pemerintah Kabupaten Majalengka **telah melakukan upaya** penyediaan permakanan, penyediaan alat bantu, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis. Ada pula fakir miskin yang mendapatkan program pemberdayaan sosial sebanyak 684 jiwa, tercapai 100% sesuai target. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.

Banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja juga menjadi **faktor** yang mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan. Dikarenakan jika tidak bekerja atau menganggur mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Oleh karena itu untuk memastikan angka kemiskinan tidak semakin tinggi, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan pendataan terkait pencari kerja yang telah bekerja dan belum bekerja sehingga sampai Tahun 2022 dapat diketahui pencari kerja terdaftar yang bekerja sebanyak 8.529 jiwa dari target sebanyak 3.799 jiwa dengan capaian melebihi target yaitu 225%. Data tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai dasar **upaya** pengentasan kemiskinan melalui program-program ketenagakerjaan seperti pengelolaan informasi pasar kerja, pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja *online*.



Usaha mikro yang semakin tumbuh menjadi **faktor** penting dan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan, terutama pada masyarakat dengan kategori rentan miskin. Pada Tahun 2022 usaha mikro menjadi usaha yang

menjanjikan karena omset pada tahun tersebut meningkat 3% sesuai target sehingga capaiannya 100%. Capaian tersebut tidak lepas dari **upaya** Pemerintah Kabupaten Majalengka yang senantiasa melakukan pemberdayaan usaha mikro melalui penguatan kelembagaan, koordinasi dan menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait ketenagakerjaan seperti pengusaha, lembaga pelatihan milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, para pelaku UKM, komunitas pelaku UKM, perbankan, BUMN, BUMD, instansi swasta serta lembaga pendidikan swasta sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi para pencari kerja. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga melakukan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro serta memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro.

Faktor lain kompleksnya masalah kemiskinan dapat dilihat dari kemampuan masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar. Sehingga kondisi kemiskinan dan kesehatan merupakan kondisi yang saling terkait. Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka mendorong agar banyak keluarga miskin dapat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada Tahun 2022 keluarga miskin yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terealisasi sebanyak 700.083 keluarga dari target yaitu 414.722 keluarga dengan capaian 168,80%. Hal tersebut menunjukkan adanya **upaya** Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menyediakan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan tingkat daerah kabupaten melalui pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.

Intervensi Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menjadi faktor keberhasilan penurunan angka kemiskinan melalui **program-program** sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|-----|---|--|---------------------|
| 1. | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial | Rp3.089.739.900,00 |
| 2. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial | Rp1.311.917.900,00 |
| 3. | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial | Rp390.540.000,00 |
| 4. | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Rp748.815.400,00 |
| 5. | Program Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Rp5.549.093.200,00 |
| 6. | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Rp125.000.000,00 |
| 7. | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Rp50.000.000,00 |
| 10. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | Rp42.446.606.888,00 |
| 11. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Rp167.734.500,00 |
| 12. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Rp15.329.400.000,00 |

Beberapa faktor yang membuat target pada Tahun 2022 tidak tercapai dikarenakan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Tanggal 3 September 2022 yang berdampak pada kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok yang menjadi penyumbang meningkatnya garis kemiskinan di Kabupaten Majalengka.



Selain itu, rehabilitasi terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hanya mencapai 96.48% dengan realisasi sebanyak 8.131 jiwa dari target 8.428 jiwa. Rehabilitasi sosial merupakan sebuah pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan

pengembangan dan pemulihan kebutuhan sosial. Belum tercapainya target tersebut, dikarenakan sebanyak 297 orang yang memerlukan PPKS masih belum mengikuti program rehabilitasi sosial karena ada masyarakat yang belum menerima informasi dan ada pula yang memilih tidak mengikuti pengembangan dan pemulihan untuk saat ini.

Penurunan angka kemiskinan juga berkaitan dengan keberadaan rumah tidak layak huni yang perlu diperbaiki. Perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan pada Tahun 2022 hanya tercapai 81,95% dengan realisasi sebesar 16,39% atau 1.239 rumah dari target 20% atau 1.500 rumah. Hal ini terjadi karena belum maksimalnya sosialisasi terkait pentingnya rumah layak huni kepada penerima manfaat dan kurangnya dana serta waktu dalam memperbaiki rumah tersebut.

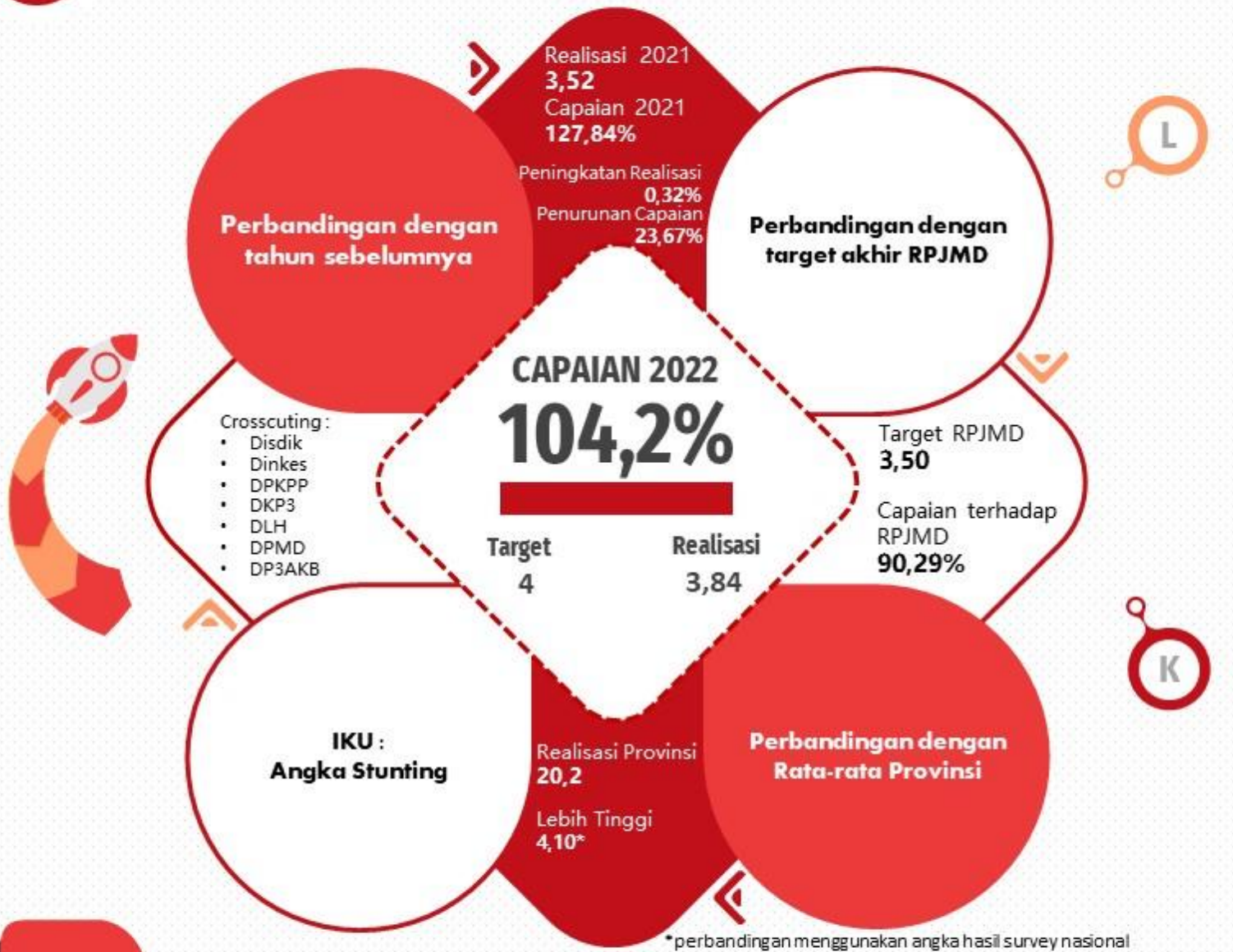
Kesehatan yang buruk dapat membuat seseorang sulit untuk bekerja atau belajar, sehingga sulit bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan akses yang mudah terhadap pelayanan dasar kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun peserta mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) baru 92,35% dari target 95%. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa masyarakat dengan JKN yang tidak aktif, anggaran dari pemerintah kabupaten yang belum memenuhi jaminan kesehatan masyarakat miskin, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan serta pekerja yang tidak didaftarkan oleh pihak pemberi kerja.

Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya agar angka kemiskinan dapat terus mengalami penurunan di tahun selanjutnya. **Upaya yang harus dilakukan pada tahun mendatang** untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui peningkatan kualitas mekanisme pemberian jaminan kesehatan, bantuan sosial dan pemberian beasiswa pendidikan.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro melalui program pengembangan industri kreatif.
4. Menynergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Pengurangan Tingkat Kemiskinan melalui indikator Angka Kemiskinan tidak ada karena IKU hanya mencapai 90,45%.

Penurunan Prevalensi Stunting



Faktor

- Meningkatkan jumlah Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan dan pengembangan sistem limbah
- Meningkatkan Indeks Kualitas Hidup
- Sosialisasi pedoman gizi seimbang
- Meningkatkan akses sanitasi layak
- Terlayannya pengembangan gizi terhadap balita dan ibu hamil
- Meningkatkan akses layanan air bersih

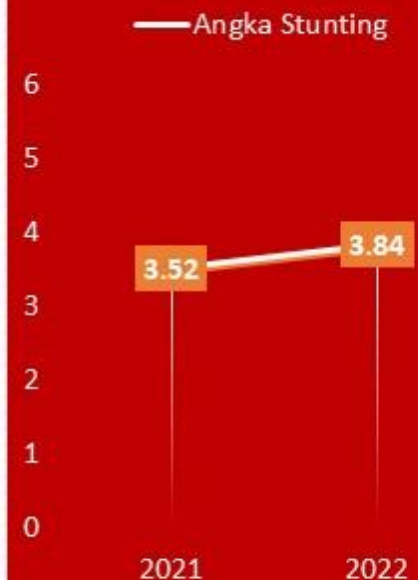
Program

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Penyuluhan Pertanian
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Efisiensi

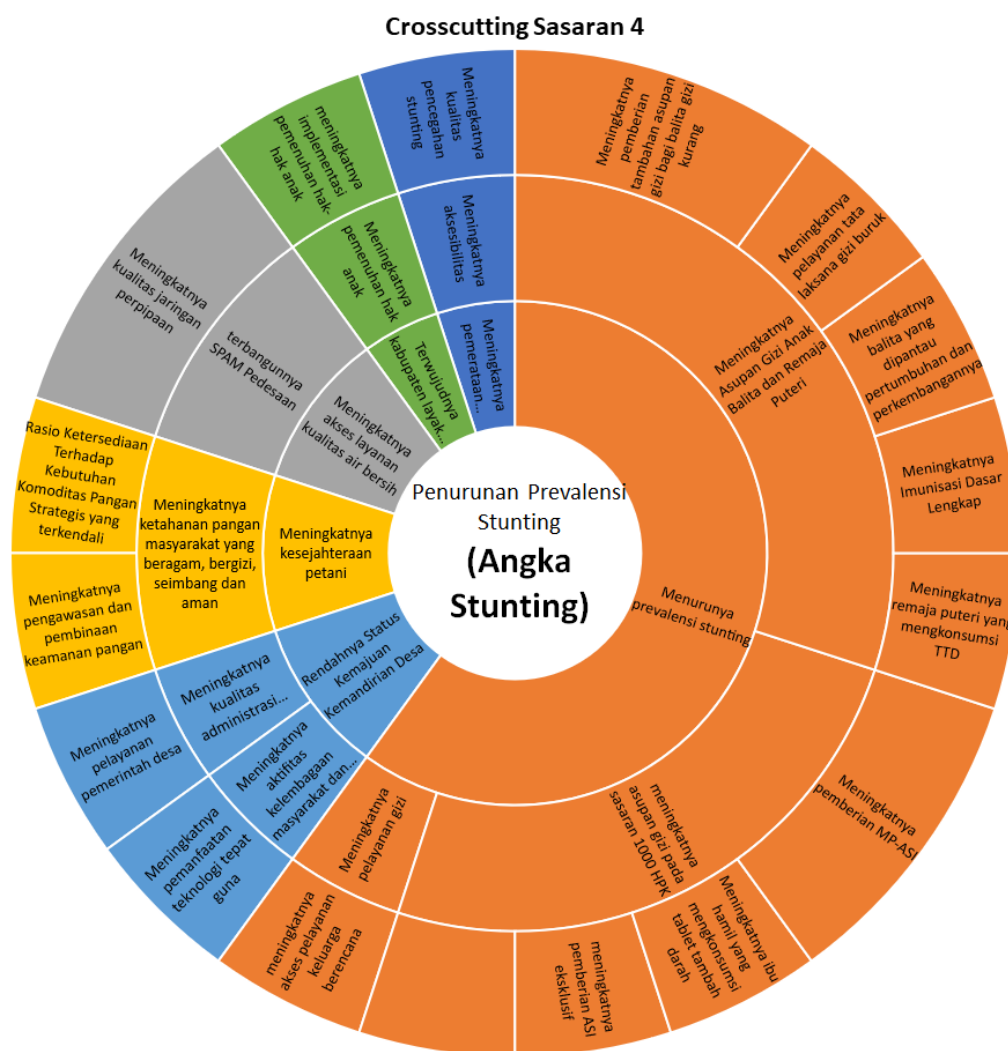
Efisiensi atas capaian Sasaran Penurunan Prevalensi Stunting sebesar **8,25%**,

ANGKA STUNTING



**SASARAN 4:
PENURUNAN PREVALENSI STUNTING**

Sasaran ini diukur dengan Angka Stunting. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator kinerja ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini :



Angka Stunting

Angka Stunting di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan **realisasi pada Tahun 2022** yaitu sebesar 3,84% atau 0,16% lebih rendah dari target, sehingga capaian Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2022 mencapai 104,17% sebagaimana data yang disampaikan Dinas Kesehatan pada Tahun 2022 dari jumlah balita yang ditimbang sebanyak 79.680 balita, terdapat 3.063 balita yang mengalami stunting. Penurunan

Angka Stunting pada Tahun 2022 juga dapat dilihat jika **dibandingkan dengan target RPJMD**. Realisasi Angka Stunting terhadap RPJMD telah mencapai 90,29%, lebih cepat 10,29% dari capaian ideal pada tahun keempat RPJMD.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023 (Akhir RPJMD) |
|-------------|----------------|---------------------------|
| 4,00 | 3,84 | 3,50 |

Pengetahuan mengenai praktik pemberian makan untuk bayi dan batita (kecukupan ASI) menjadi **faktor** penting dalam penurunan prevalensi stunting. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan **upaya** seperti sosialisasi Pedoman Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal (PGS-PL), edukasi terkait



pengecehan dan penurunan stunting, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan balita kurus, edukasi Asi Eksklusif, edukasi pemberian makan bayi dan anak, bulan penimbangan balita dan pemberian vitamin A.

Lingkungan yang sehat berperan penting dalam mengatasi stunting. Sumber air minum, sanitasi dan pengelolaan limbah menjadi **faktor** lingkungan yang berhubungan dengan stunting sebagai penyebab tidak langsung. Oleh karena itu **upaya** yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait pengurangan stunting dari segi kesehatan lingkungan diantaranya:

1. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 106,98% dengan realisasi 64,81% dari target 60,58%. Pengukuran IKLH dilakukan untuk mengetahui kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang terdiri dari tiga indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) 47,14, Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,71 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) 50,97. IKLH Kabupaten Majalengka mendapatkan predikat cukup baik.
2. Optimalisasi jumlah rumah tangga yang terlayani pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Pada Tahun 2022 ditargetkan 324.188 rumah tangga atau 69,75% dari total rumah tangga di Kabupaten Majalengka, realisasinya mencapai 324.240 rumah tangga atau 69,76% sehingga capaian Tahun 2022 mencapai 100,01%.

3. Deklarasi *Open Defecation Free* (ODF) untuk meningkatkan akses sanitasi yang layak melalui pelaksanaan di 287 desa dan 1 kecamatan sebagai bentuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalani pola hidup bersih dan sehat.

Ada pula **beberapa program** yang mendukung Penurunan Prevalensi Stunting yaitu:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|----|---|--|--------------------|
| 1. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Perangkat Daerah | Dinas Kesehatan | Rp3.546.450.000,00 |
| 2. | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan | Rp117.910.900,00 |
| 3. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan | Rp5.833.146.000,00 |
| 4. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian | Rp2.242.190.000,00 |
| 5 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Rp633.764.187,00 |
| 6 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Rp200.000.000,00 |
| 7 | Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Rp991.480.000,00 |
| 8 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Rp1.453.000.000,00 |
| 9 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Rp50.000.000,00 |
| 10 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Dinas Lingkungan Hidup | Rp1.772.250.000,00 |
| 11 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Rp4.673.242.320,00 |
| 12 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata, | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Rp3.195.100.000,00 |

| | | | |
|----|---|---|--------------------|
| | Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | | |
| 13 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Rp5.498.190.000,00 |
| 14 | Program Pengendalian Penduduk | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Rp51.790.000,00 |
| 15 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. | Rp695.600.000,00 |

Akan tetapi jika **dibandingkan dengan Tahun 2021**, realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,32%. Menurut hasil survey Nasional, Angka stunting di Kabupaten Majalengka Tahun 2022 yaitu 24,3%. Hasil survey tersebut jika **dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat** masih lebih tinggi 4,1%. Jumlah balita dengan stunting di Kabupaten Majalengka lebih banyak dibandingkan dengan jumlah balita dengan stunting rata-rata Provinsi Jawa Barat. Sehingga Kabupaten Majalengka menempati peringkat ketujuh di Provinsi Jawa Barat sebagai kabupaten dengan angka stunting yang cukup tinggi.

| Realisasi 2022 | Realisasi Jawa Barat |
|----------------|----------------------|
| 24,30* | 20,20** |

*Angka Stunting Kabupaten Majalengka menurut Hasil Survey Nasional

** Angka Stunting Provinsi Jawa Barat menurut Hasil Survey Nasional

Penurunan capaian Angka Stunting dibandingkan dengan tahun lalu dipengaruhi oleh beberapa **faktor** antara lain:

1. Belum maksimalnya pelayanan gizi terhadap balita dan ibu hamil. Terlihat dengan masih banyaknya balita yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk. Dari 3.075 balita yang diperiksa, terdapat 405 balita yang mengalami gizi kurang dan 37 balita gizi buruk.
2. Belum optimalnya upaya dalam meningkatkan akses layanan air bersih. Hal ini dibuktikan dengan persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih tidak mencapai target yaitu sebesar 80,91 poin atau 99,51% dari target sebesar 81,31 poin.

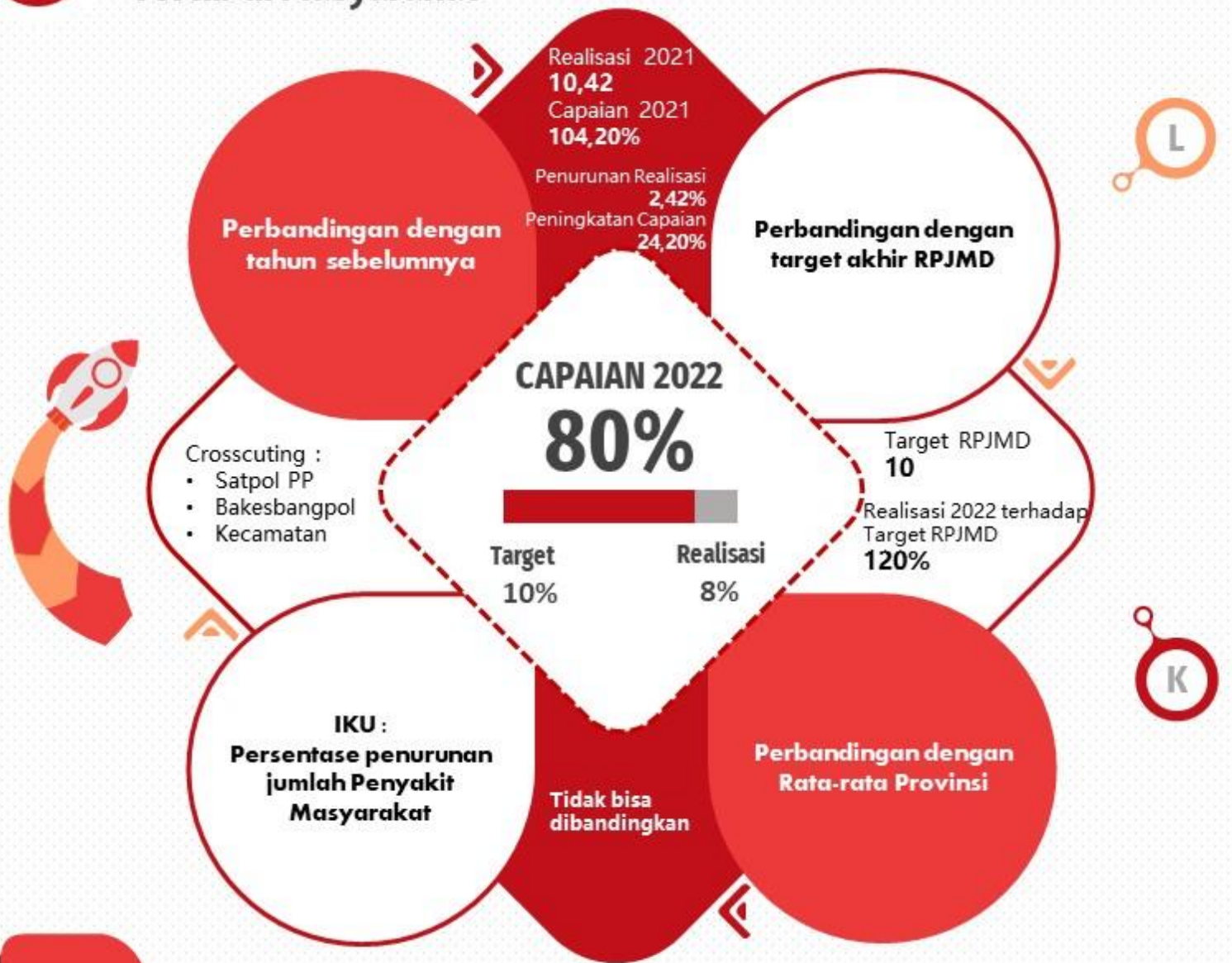
3. Kurang optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga menjadi penyebab masih tingginya angka stunting di Kabupaten Majalengka.

Oleh karena itu, **upaya yang dapat dilakukan** untuk memaksimalkan lagi kinerja penurunan prevalensi stunting di tahun mendatang yaitu:

1. Memastikan ketersediaan air bersih dan memaksimalkan akses terhadap layanan air bersih melalui optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten khususnya di kawasan perdesaan.
2. Memaksimalkan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dan meningkatkan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten dan melaksanakan mekanisme operasional program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui rapat koordinasi kecamatan, rapat koordinasi desa dan mini lokakarya.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan sasaran strategis Penurunan Prevalensi Stunting melalui indikator Angka Stunting yaitu 8,25% atau sebesar Rp2.552.937.737,00 dari pagu anggaran Rp30.954.113.407,00 dengan realisasi Rp28.401.175.670,00.

Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tentram dan Tertib di Masyarakat



Faktor

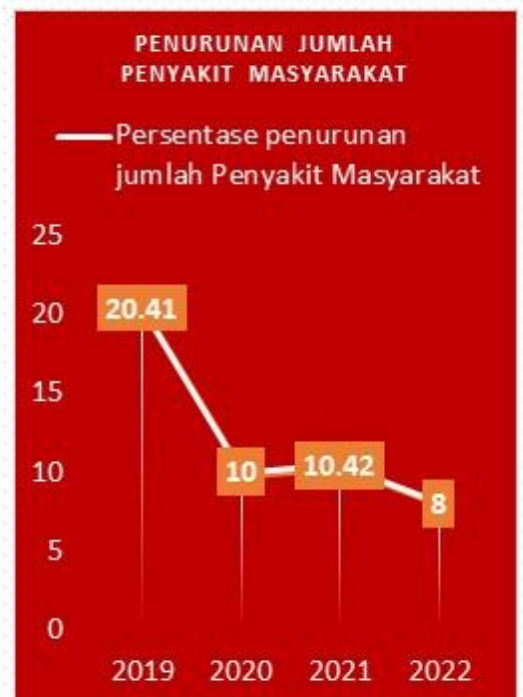
- Meningkatkan sarana dan prasarana penertiban
- Meningkatkan patroli

Program

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

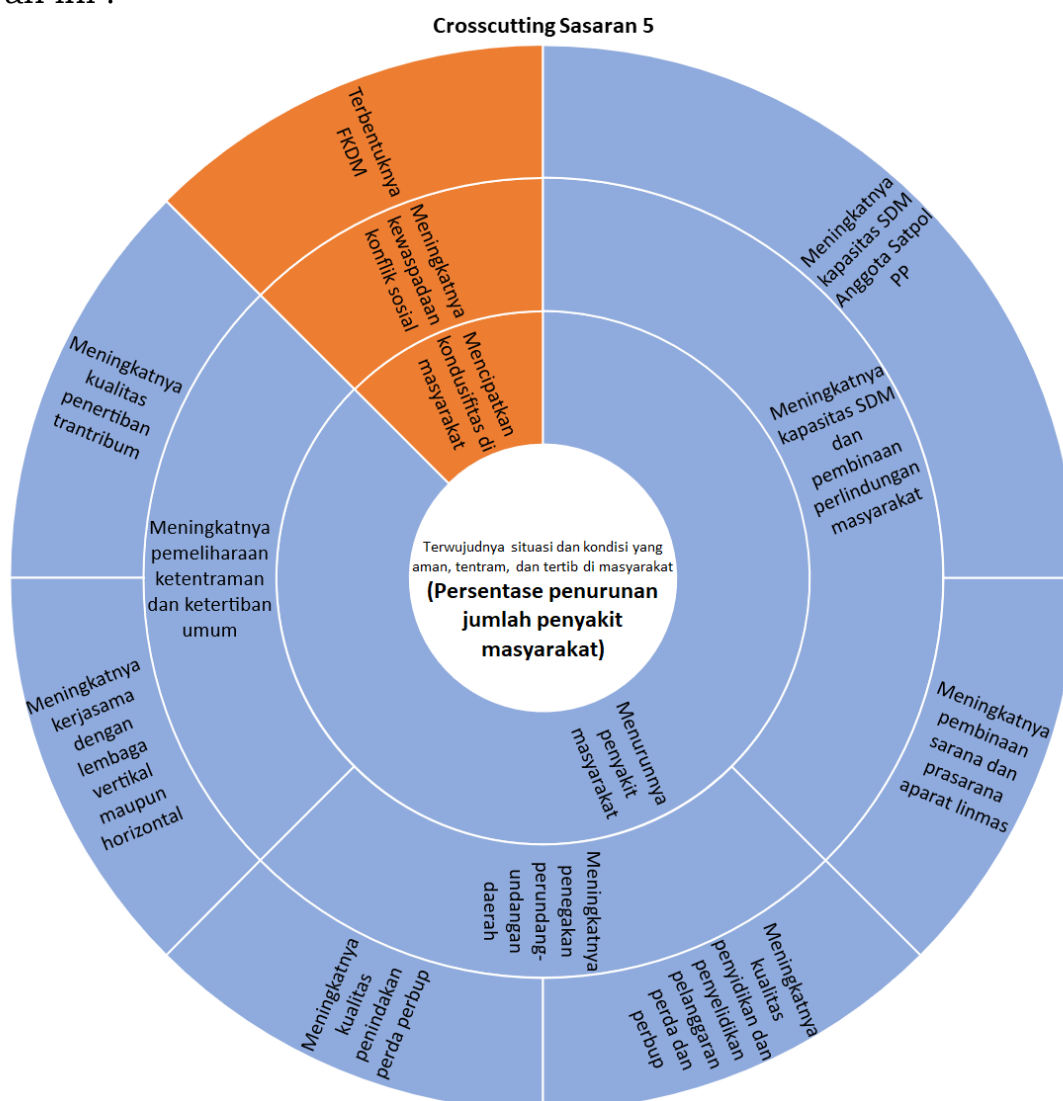
Efisiensi

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak ada karena IKU tidak tercapai 100%



**SASARAN 5:
TERWUJUDNYA SITUASI DAN KONDISI YANG AMAN, TENTRAM DAN
TERTIB DI MASYARAKAT**

Sasaran ini diukur oleh Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini :



Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat

Jumlah penyakit masyarakat pada Tahun 2022 mengalami penurunan. Jika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, capaian Tahun 2022 lebih rendah 24,20% begitu pula dengan realisasi Tahun 2022 lebih rendah 2,42% dari Tahun 2021. Kemudian jika **dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya**, jumlah penyakit masyarakat semakin menurun. Hal ini menggambarkan bahwa upaya



Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat semakin terwujud. Buktinya jumlah penyakit masyarakat terus mengalami penurunan sejak Tahun 2019.

Realisasi penurunan jumlah penyakit masyarakat pada Tahun 2022 ini mencapai 8% dengan capaian 80% dari target yang telah ditetapkan. Sebanyak 2.758 penyakit masyarakat telah ditangani dengan rincian 77 orang terjaring operasi yustisi kependudukan

dan gerakan disiplin nasional, 54 orang pelaku prostitusi, 157 orang gelandangan dan pengemis dan 2.470 minuman beralkohol yang ditertibkan. Realisasi indikator ini jika **dibandingkan dengan target RPJMD** mencapai 80%. Hal ini berarti, realisasi Tahun 2022 sudah sesuai target RPJMD di tahun keempat.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 10,00 | 8,00 | 10,42 | 10,00 |

Indikator ini tidak dapat **dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat** karena tidak ada indikator di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional yang sesuai untuk dibandingkan dengan indikator ini.

Berikut merupakan **program** yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai upaya dalam menurunkan jumlah penyakit masyarakat:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|----|---|----------------------------|------------------|
| 1. | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Satuan Polisi Pamong Praja | Rp170.170.300,00 |
| 3. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan | Rp412.106.600,00 |

Faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah penyakit masyarakat yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pembinaan perlindungan masyarakat, meningkatnya kualitas penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta meningkatnya kualitas kerjasama dengan lembaga vertikal maupun horizontal. **Upaya yang telah dilakukan** antara lain di tingkat kabupaten dilaksanakannya pencegahan gangguan ketentraman dan

ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, sosialisasi penegakan



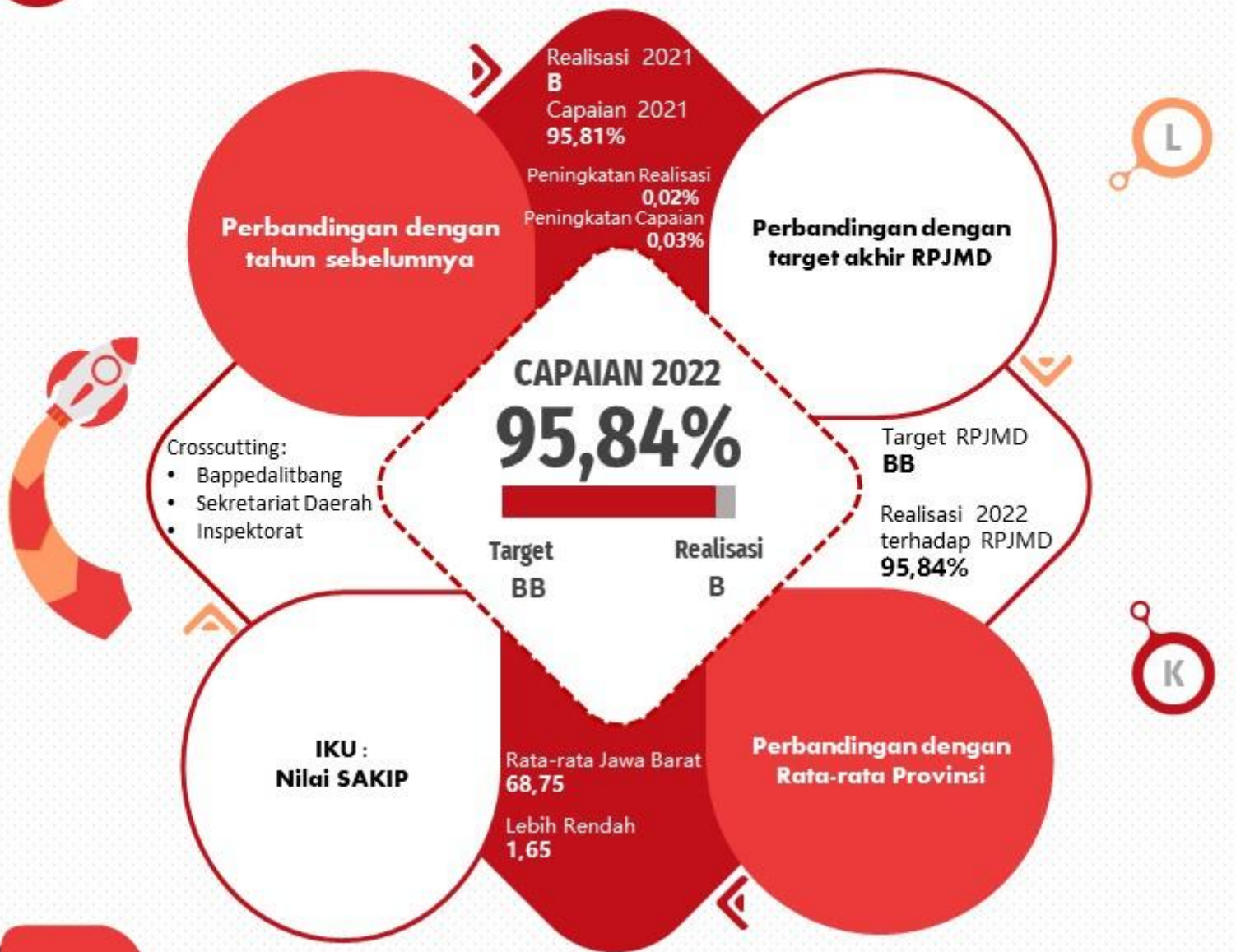
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Kemudian di tingkat kecamatan upaya yang telah dilakukan antara lain Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Sedangkan **faktor** yang mempengaruhi kinerja Tahun 2022 tidak mencapai target adalah keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi menghambat kegiatan patroli sehingga pemberantasan penyakit masyarakat belum maksimal. Kurangnya sarana prasarana, kurangnya kerjasama masyarakat, sering terjadinya kebocoran razia serta masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Beberapa hal yang dapat **diupayakan pemerintah di tahun mendatang** untuk memaksimalkan kinerja terkait penurunan jumlah penyakit masyarakat diantaranya meningkatkan patroli terutama di tempat-tempat yang rawan terjadinya pelanggaran dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku agar jera. Menambah sarana prasarana yang diperlukan untuk penanganan penyakit masyarakat. Memberikan sosialisasi terkait bahaya penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta diseminasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang berlaku.

Efisiensi pada sasaran terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat dengan indikator persentase penurunan jumlah penyakit masyarakat tidak ada karena IKU hanya mencapai 80%.



Faktor

- Nilai Perencanaan Kinerja
- Nilai Pengukuran Kinerja
- Nilai Pelaporan Kinerja
- Nilai Evaluasi Internal

Program

- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

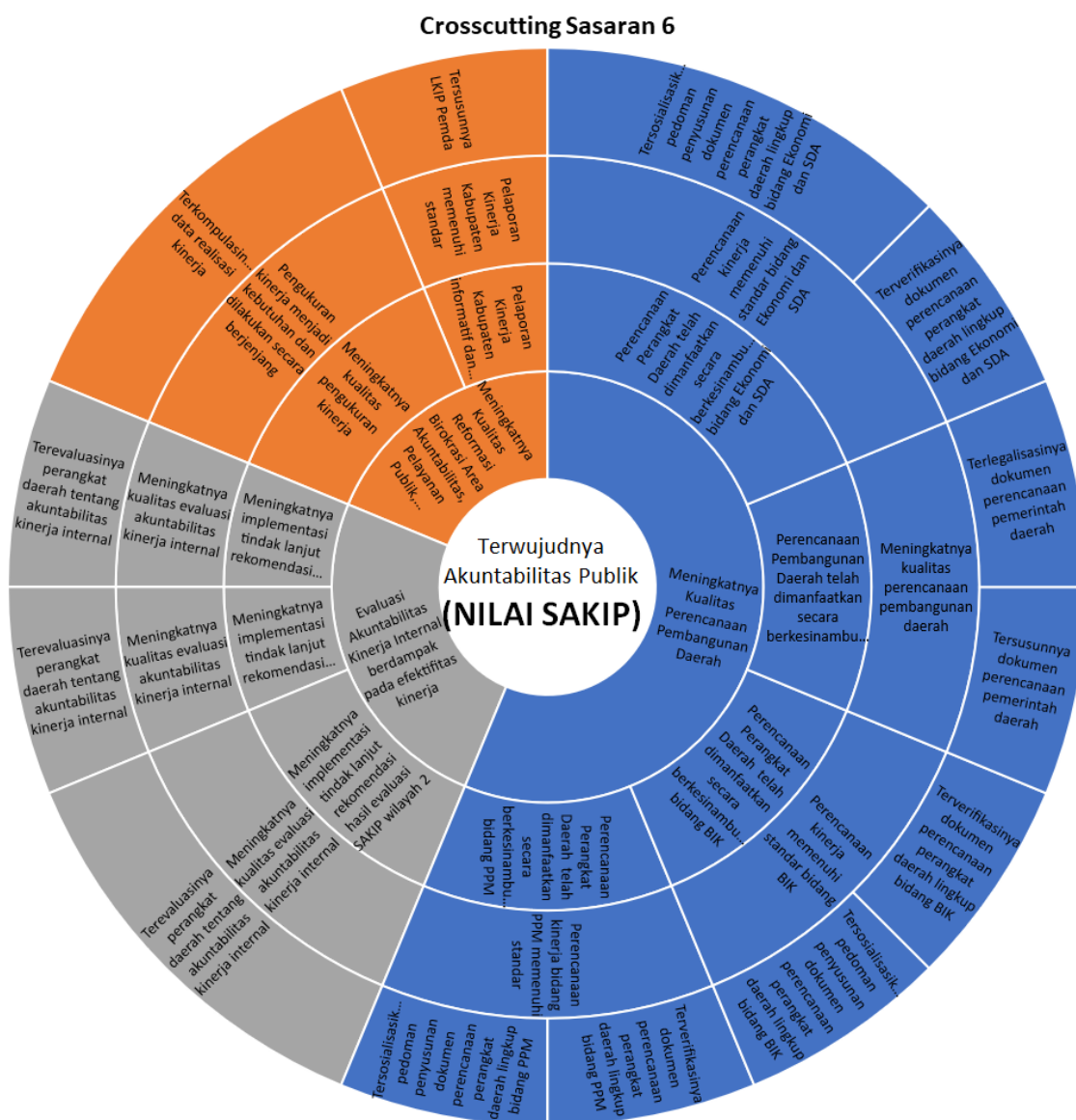
Efisiensi

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak dapat dihitung karena IKU tidak tercapai 100%



SASARAN 6: TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran ini diukur dengan Nilai SAKIP yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Inspektorat. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Kabupaten Majalengka **pada Tahun 2022** mengalami peningkatan. Capaian nilai SAKIP sebesar 95,84 % dengan realisasi nilai 67,10 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai |
|----|---|-------|--------------|
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 | 22,09 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 30 | 19,80 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 9,56 |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 15,65 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 67,10 |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | B |

Meskipun secara predikat masih mempertahankan predikat B, akan tetapi jika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya** capaian nilai SAKIP Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dan realisasi sebesar 0,02 poin. Jika dibandingkan dengan **rata-rata Provinsi Jawa barat**, predikat Kabupaten Majalengka setara dengan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat yang sebagian besar mendapatkan predikat SAKIP B, meskipun dari segi nilai masih lebih rendah 1,65 poin dari rata-rata nilai SAKIP di Provinsi Jawa Barat sehingga SAKIP Kabupaten Majalengka menempati urutan ke 16. Kemudian realisasi nilai SAKIP Tahun 2022 jika **dibandingkan dengan target akhir RPJMD** masih belum sesuai dengan harapan. Target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Majalengka pada akhir tahun RPJMD adalah predikat BB atau minimal nilai SAKIP sebesar 70,01 poin.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) | Rata-Rata Jawa Barat |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 70,01 | 67,10 | 67,08 | 70,01 | 68,75 |

Peningkatan nilai SAKIP yang diperoleh Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh beberapa **faktor** yaitu adanya kolaborasi dari setiap pengampu untuk berusaha



meningkatkan nilai SAKIP. Berdasarkan rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2021, salah satu **upaya yang telah dilakukan** adalah mereviu dokumen

perencanaan melalui asistensi/pendampingan oleh KemenPAN RB dan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Asistensi ini menargetkan setiap Perangkat Daerah dapat membuat dan menghasilkan Pohon Kinerja sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya peningkatan kualitas evaluasi internal di Inspektorat juga dilakukan melalui bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas Tim Evaluator Internal.

Ada pula **beberapa program** yang mendukung peningkatan nilai SAKIP meliputi:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|----|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Bappedalitbang | Rp1.474.685.000,00 |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat Daerah | Rp1.049.119.200,00 |
| 3. | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Inspektorat | Rp1.083.865.500,00 |

Berbagai program dan kegiatan telah diupayakan pada Tahun 2022, meskipun nilai SAKIP meningkat akan tetapi predikat SAKIP belum mengalami peningkatan. **Faktor yang membuat target Tahun 2022 belum tercapai diantaranya:**

1. Terdapat sasaran strategis serta indikator yang belum berorientasi hasil sehingga belum cukup merepresentasikan isu strategis.
2. Penjabaran kinerja belum menunjukkan kerangka logis untuk mencapai kinerja sehingga tidak selaras antara kinerja organisasi dengan kinerja individu.
3. Pelaksanaan pengukuran kinerja sebatas anggaran belum termasuk capaian kinerja, laporan kinerja Perangkat Daerah belum menyajikan analisis atas faktor pendorong dan penghambat keberhasilan yang relevan.
4. Belum adanya kebijakan *reward and punishment* untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.
5. Pemanfaatan e-SAKIP yang tidak optimal serta belum terintegrasinya perencanaan dan penilaian kinerja.

Sehingga **perlu dilakukan perbaikan di tahun mendatang** diantaranya menyelaraskan dokumen perencanaan, pendampingan oleh Kemenpan RB/ Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuat pohon kinerja, *cascading* dan *crosscutting* yang ideal bagi seluruh Perangkat



Daerah, melakukan penguatan internal dalam pembagian peran setiap dimensi SAKIP, optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-SAKIP dan mengintegrasikan elemen perencanaan dan penilaian kinerja, meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja, menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja terhadap setiap ASN Kabupaten Majalengka dengan cara dialog kinerja serta menerapkan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan kinerja.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas kinerja tidak ada dikarenakan IKU tidak mencapai 100%.



Faktor

- Laporan keuangan sesuai dengan prinsip Akuntansi yang berlaku
- LKPD tepat waktu
- Tindak lanjut pemeriksaan BPK

Program

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Negara
- Program Pembinaan dan Pengawasan
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Efisiensi

Efisiensi sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dengan indikator Opini BPK ini belum bisa dihitung karena opini BPK Tahun 2022 belum rilis.

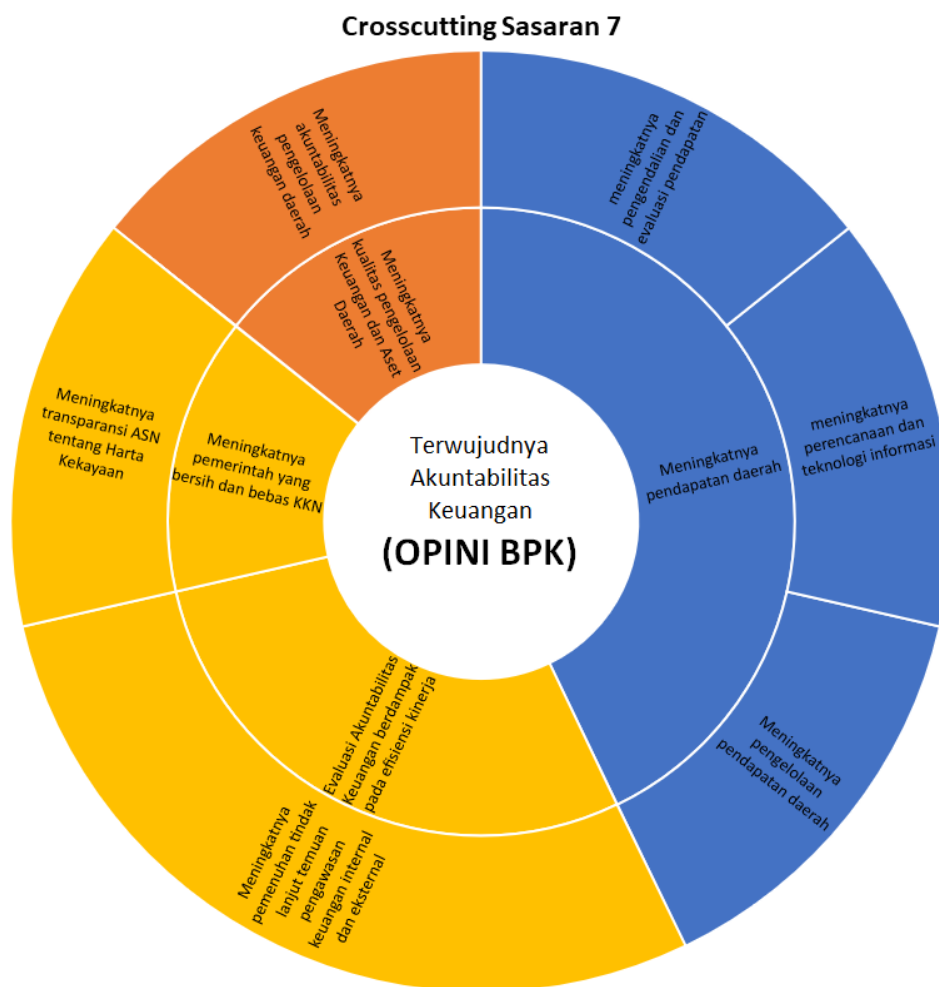
OPINI BPK RI

— Opini BPK RI



**SASARAN 7:
TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Sasaran ini diukur dengan Opini BPK. Perangkat Daerah yang mengampu indikator kinerja ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Badan Pendapatan Daerah. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Opini BPK

Indikator opini BPK jika **dibandingkan dengan Tahun 2021** belum bisa diukur karena sampai LKIP ini disusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 masih dalam proses pemeriksaan BPK RI, sehingga **Target pada Tahun 2022** yaitu WTP belum bisa ditentukan capaiannya. Begitu pula untuk membandingkan capaian realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2022 dengan realisasi Tahun 2021 dan dengan Target Kinerja tahun ke-5 RPJMD di Tahun 2023. Dikarenakan belum adanya capaian Tahun 2022

tersebut, maka juga tidak bisa **dibandingkan dengan RPJMD maupun capaian Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.**



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 yang disampaikan pada Tahun 2022 Kabupaten Majalengka kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat. Hal ini menjadikan Kabupaten Majalengka menerima prestasi penghargaan opini WTP 9 (sembilan) kali berturut-turut. Opini WTP ini diraih karena **beberapa faktor** yaitu meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terlihat dari meningkatnya transparansi ASN tentang harta kekayaan serta penyelenggaraan evaluasi akuntabilitas keuangan yang berdampak pada efisiensi kinerja terlihat dari meningkatnya pemenuhan tindak lanjut temuan pengawasan keuangan internal dan eksternal. Kabupaten Majalengka juga mampu melakukan **beberapa upaya** seperti menyajikan LKPD secara tepat waktu dan juga karena laporan keuangan yang disajikan dianggap memberikan informasi yang akuntabel berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Selain itu Pemkab Majalengka juga telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, telah melaksanakan pengamanan aset secara fisik dan legal berupa pemberian tanda berbentuk plang dan penyertifikatan aset tanah milik Pemda, telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai *Quality Assurance* sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta melaksanakan tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK, bimtek verifikasi dan pemuktahiran basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di seluruh kecamatan.

Intervensi Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk pencapaian target IKU Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|-----------|--|--------------------------------|----------------------|
| 1. | Program Pembinaan dan Pengawasan | Inspektorat Daerah | Rp1.681.480.000,00 |
| 2. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Rp549.425.659.129,00 |
| 3. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Rp2.951.095.821,00 |
| 4. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Rp7.732.202.574,00 |

Efisiensi sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dengan indikator Opini BPK ini belum bisa dihitung karena opini BPK Tahun 2022 belum rilis.



Faktor

- Survey Kepuasan Masyarakat
- Indeks Keterbukaan Informasi Publik
- Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik

Program

- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
- Program Informasi dan Komunikasi Publik
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pelayanan Penanaman Modal

Efisiensi

Efisiensi untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) **sebesar 3,73%**

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

— IKM

A

B

C

2019

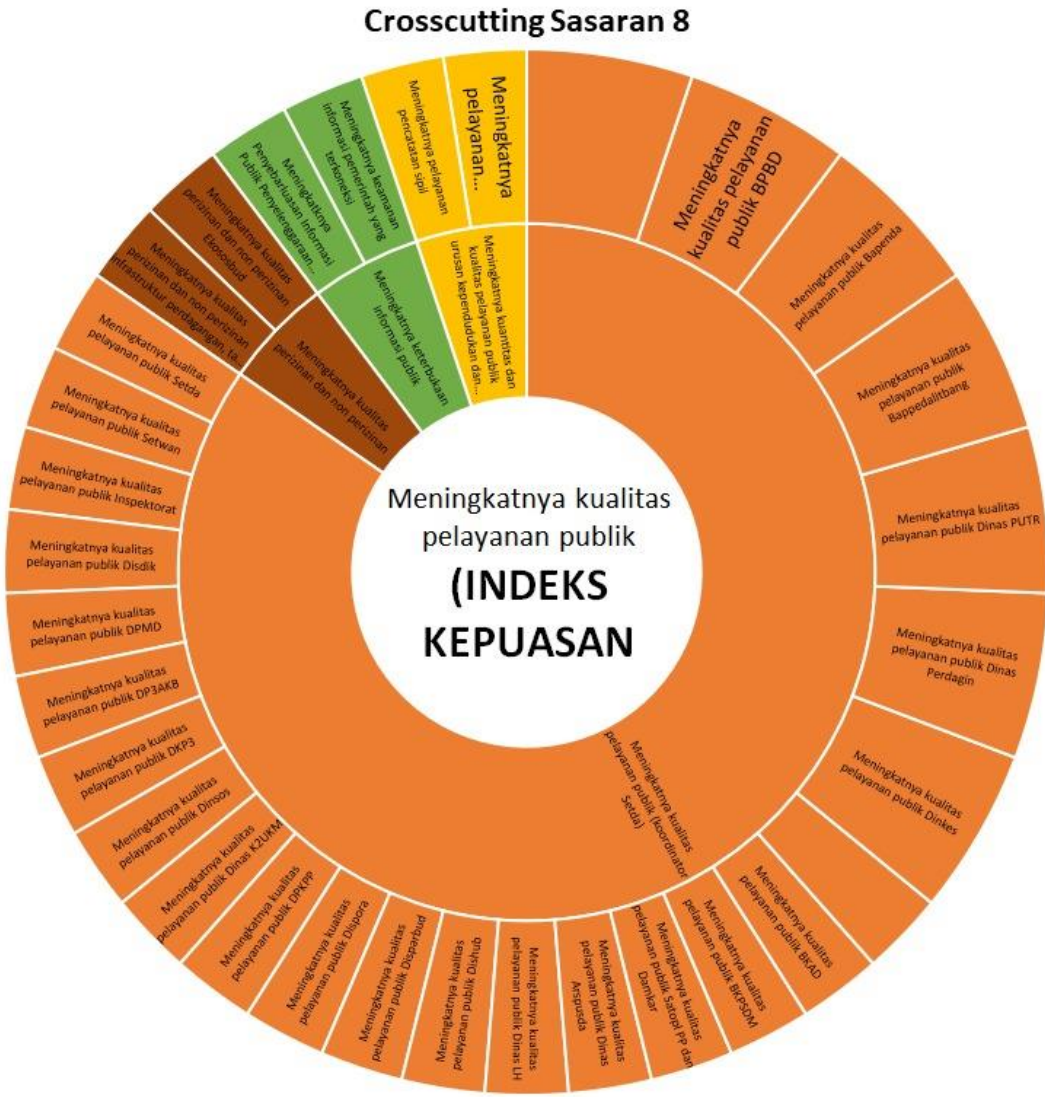
2020

2021

2022

SASARAN 8: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Sasaran ini diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator kinerja ini adalah Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta semua Perangkat Daerah. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap mempertahankan kualitasnya dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan **realisasi IKM Tahun 2022** yang mendapatkan predikat B dengan capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat, sebanyak 55 Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka

mendapatkan peringkat B. Upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik ini juga dapat terlihat jika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya**. Pada Tahun 2021 realisasi IKM Kabupaten Majalengka mendapatkan peringkat B dengan capaian kinerja 100% sesuai dengan yang ditargetkan dan 55 Perangkat Daerah mendapatkan peringkat B.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) | Realisasi Jawa Barat |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| B | B | B | B | A |

Komitmen untuk terus memberikan pelayanan publik yang berkualitas ini dapat terlihat dari nilai mutu pelayanan yang mengalami peningkatan sebesar 1,32 poin dari Tahun 2021 yang hanya memperoleh nilai 81,05 dan meningkat di Tahun 2022 dengan nilai 82,37. **Realisasi Tahun 2022 jika dibandingkan dengan RPJMD** sudah sesuai dan *on the track* dengan yang ditargetkan di akhir tahun RPJMD. Akan tetapi jika **dibandingkan dengan IKM**

Provinsi Jawa Barat, IKM Kabupaten Majalengka masih berada di bawahnya. IKM Provinsi Jawa Barat sudah mendapatkan predikat A, sedangkan IKM Kabupaten Majalengka pada tahun yang sama masih mendapatkan peringkat B. Kesulitan untuk mengejar predikat A ini dipengaruhi oleh adanya kriteria nilai dalam mencapai predikat A yang semakin tinggi. Mulai Tahun 2017 untuk mendapatkan predikat A harus mencapai nilai 88,31, padahal sebelumnya hanya perlu mendapatkan nilai di atas 81,26 saja sudah bisa mendapatkan predikat A. Ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka

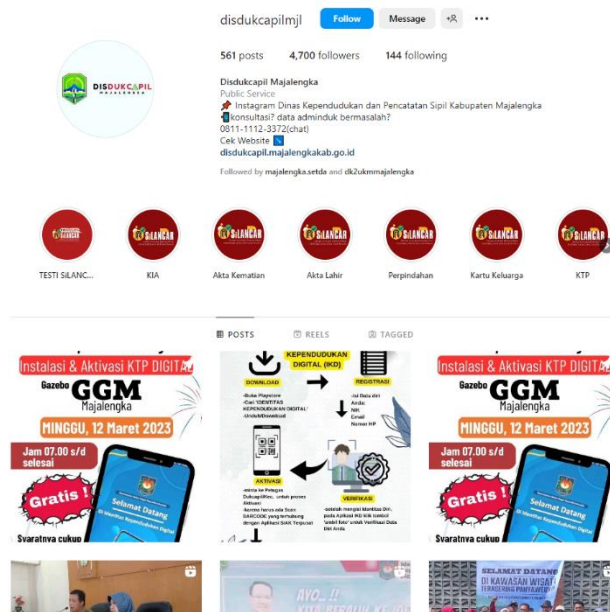


untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya kepada masyarakat.

Ketercapaian Target IKM pada Tahun 2022 di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh **beberapa faktor** yaitu meningkatnya nilai sembilan unsur pelayanan dari setiap Perangkat

Daerah. Sembilan unsur pelayanan tersebut terdiri atas persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana. **Upaya yang telah dilakukan** yaitu adanya pendampingan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka kepada Perangkat Daerah terkait penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, pemenuhan standar pelayanan publik seperti standar pelayanan, maklumat layanan, pengelolaan pengaduan, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, penilaian kepuasan masyarakat, visi, misi dan motto serta atribut.

Dari segi informasi, **faktor** meningkatnya keterbukaan informasi publik khususnya informasi yang berhubungan dengan pelayanan publik dapat terlihat melalui peningkatan penyebaran informasi publik yang terukur dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Tercapainya Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 101,67% dengan realisasi 61 dari target 60 menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Kabupaten Majalengka sudah cukup informatif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa **upaya yang telah dilakukan** seperti menyebarluaskan informasi terkait standar operasional pelayanan publik sehingga masyarakat dapat mengetahui kepastian layanan dalam hal jangka waktu dan biaya yang menjadi bagian penting dari komponen standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.





Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pencapaian IKM ini yaitu meningkatnya pelayanan kependudukan dan pelayanan perizinan/non perizinan. Peningkatan pelayanan kependudukan seperti pendaftaran penduduk yang dapat dilihat dari tercapainya target kepemilikan KTP mencapai 111% dengan realisasi 99,86% dari target 90%. Capaian kepemilikan kartu identitas anak

sebesar 334% dengan realisasi 66,86% dari target 20%. Tercapainya target pemuktahiran kartu keluarga sebesar 106% dengan realisasi 90% dari target 85%. Selain itu pelayanan pencacatan sipil juga meningkat dilihat dari tercapainya target kepemilikan akta kelahiran dan kematian yang mencapai 105% dengan realisasi 99,6% dari target 95%. Tercapainya target penerbitan akta perkawinan dan perceraian sebesar 100%. Keberhasilan ini tidak lepas dari **upaya yang telah dilakukan** diantaranya komitmen dan kerja keras seluruh pegawai dengan cara mengoptimalkan pelayanan reguler dan jemput bola perekaman dan pencatatan KTP elektronik, pencetakan KIA, pelayanan kartu keluarga, pencetakan akta kelahiran dan kematian, pencetakan akta perkawinan dan perceraian.

Ada pula pencapaian terkait perizinan yaitu peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang mencapai 100,06% dengan realisasi 88,02% dari target 87,96%. Adanya kenaikan nilai kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI sebesar 15,12 poin dari 55,56 menjadi



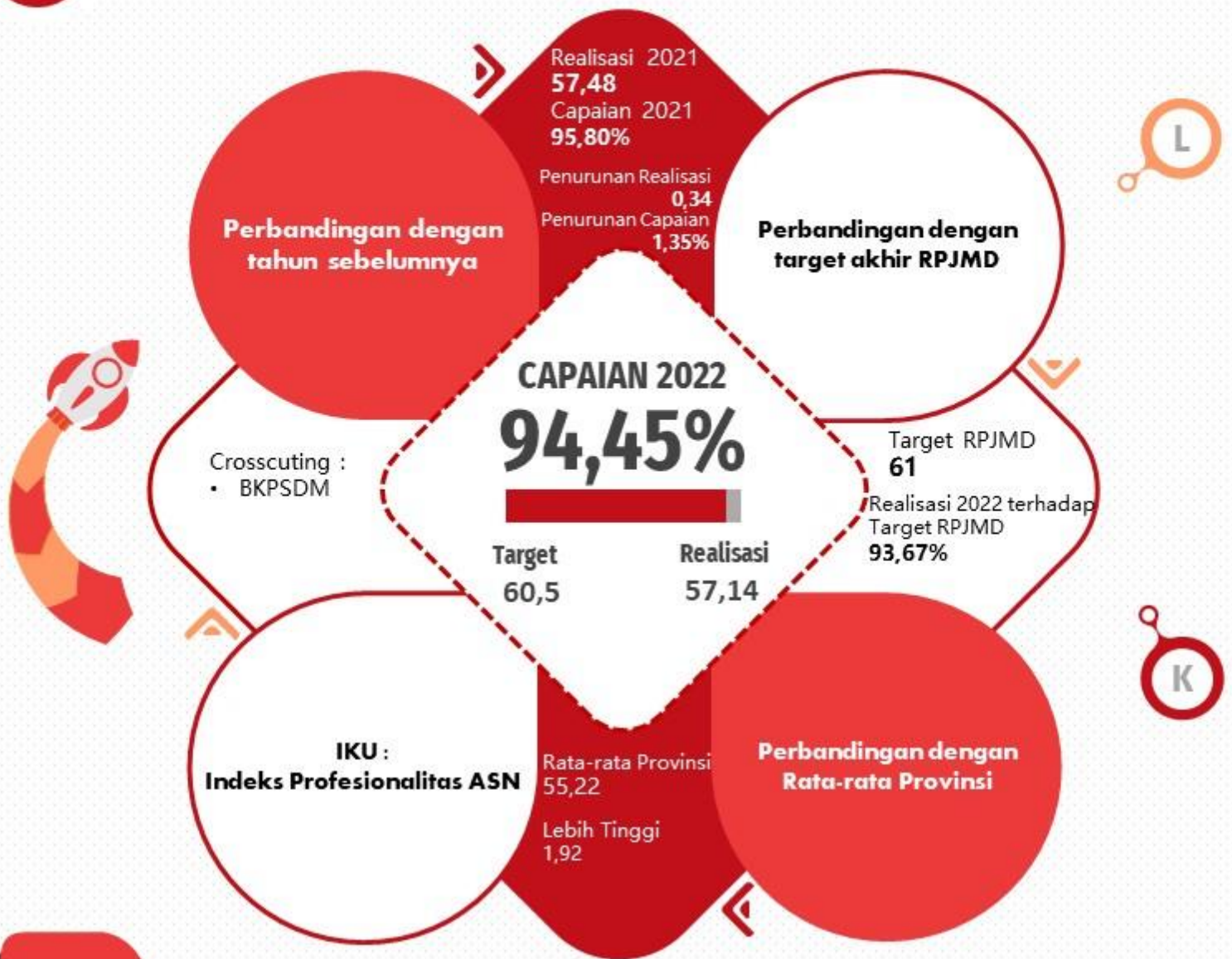
70,68 serta nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari KemenPAN RB untuk DPMPSTP mengalami peningkatan menjadi 3,87 dan Disdukcapil mengalami peningkatan menjadi 4,19.

Program yang mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|----|--|--|-------------------|
| 1. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | Rp517.950.000,00 |
| 2. | Program Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp10.800.000,00 |
| 3. | Program Pencacatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp9.600.000,00 |
| 4. | Program Pelayanan Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Rp392.300.000,00 |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten | Semua Perangkat Daerah | Rp347.269.150.355 |

Kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan dan dipertahankan. Maka dari itu, **upaya yang harus dilakukan pada tahun mendatang** adalah tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan cara meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik untuk seluruh Perangkat Daerah, membuat Survei Kepuasan Masyarakat secara *online* dan dapat diakses publik, meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi tentang pemerintah Kabupaten Majalengka dengan membuat *Open Data* Majalengka, meningkatkan pelayanan digitalisasi dan sosialisasi dalam melayani masyarakat agar pelayanan menjadi lebih efisien, cepat dan tepat sasaran serta mengoptimalkan pelayanan regular dan jemput bola.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu 3,73% atau sebesar Rp13.002.976.902,00 dari pagu anggaran Rp348.199.800.355,00 dengan realisasi Rp335.196.823.453,00.



Faktor

- Rasio pegawai fungsional
- Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar
- Rasio persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani
- Persentase pegawai fungsional bersertifikat kompetensi
- Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural

Program

- Program Kepegawaian Daerah
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Efisiensi

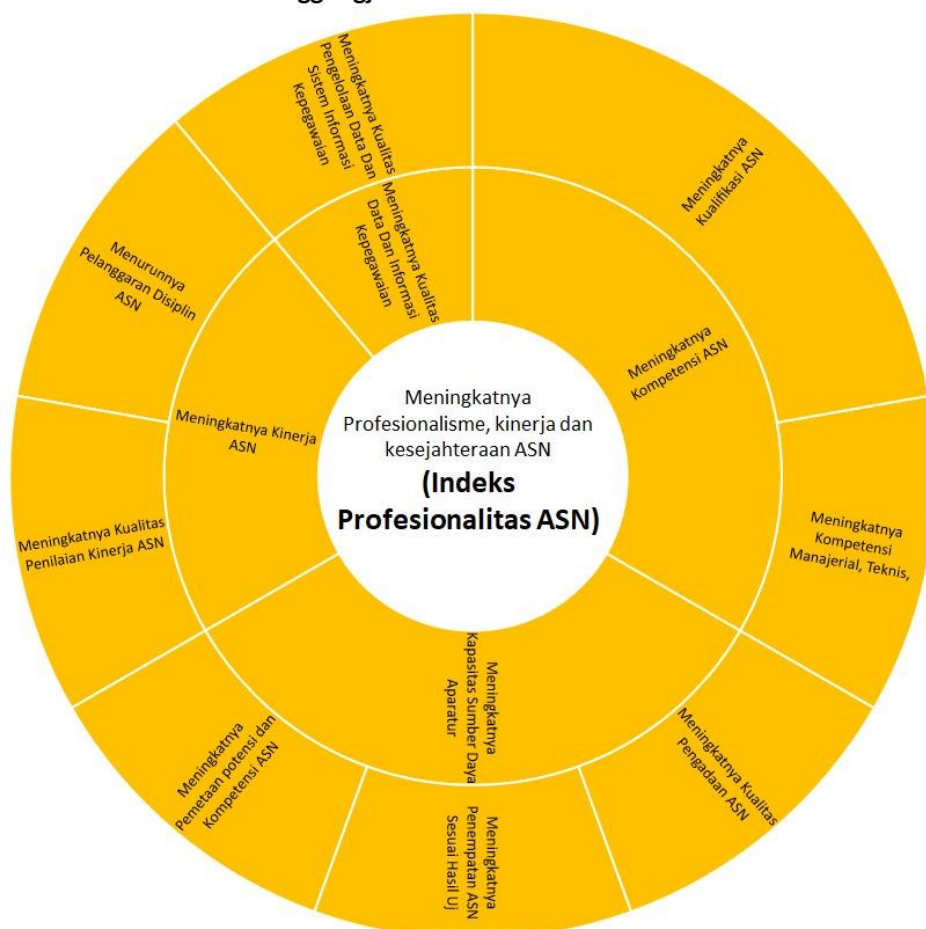
Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak ada karena IKU tidak tercapai 100%



**SASARAN 9:
MENINGKATNYA PROFESIONALISME, KINERJA DAN
KESEJAHTERAAN ASN**

Sasaran ini diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN. Perangkat Daerah yang mengampu indikator kinerja ini adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penanggungjawab IKU Sasaran 9 : BKPSDM



Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Majalengka melebihi target. Jika **dibandingkan dengan RPJMD**, indeks profesionalitas ASN pada Tahun 2022 telah mencapai 93,67%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Tahun 2022 lebih tinggi 13,67 % dari capaian ideal tahun keempat RPJMD. Keberhasilan indikator ini terhadap RPJMD tetap tercapai meskipun **capaian Tahun 2022** hanya 94,45% dengan realisasi 57,14 poin dari target 60,5 poin. Jika **dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat** yang mendapat angka 55,22 poin, Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Majalengka lebih tinggi 1,92 poin.

Akan tetapi **jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, capaian indeks profesional ASN Tahun 2022 mengalami penurunan capaian sebanyak 1,35 % dari Tahun 2021. Begitu pula dengan realisasinya pada Tahun 2022 yang mengalami penurunan sebesar 0,34 poin dibandingkan dengan Tahun 2021.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) | Realisasi Jawa Barat |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 60,5 | 57,14 | 57,48 | 61 | 55,22 |



Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran

Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Capaian indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2022 dipengaruhi oleh **beberapa faktor** antara lain pada Tahun 2022 tidak ada PNS yang melakukan tindakan indisipliner. Kemudian sebanyak 6.571 ASN di Kabupaten Majalengka merupakan pegawai fungsional dengan capaian 106,04%, lebih tinggi 4,23% dari yang ditargetkan. Ada pula pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 5.986 ASN, lebih banyak 2.044 ASN dari yang ditargetkan. Jabatan Fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan, diharapkan dapat mengisi ruang yang mungkin selama ini dianggap kosong, selain itu jabatan fungsional dapat menjadi model dari seorang ASN sebagai tenaga kerja yang professional yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian. Jabatan Fungsional diharapkan menjadi *role model* ASN yang kompetitif.

Pada segi kualifikasi pendidikan, dari total 11.773 ASN, sebanyak 10.810 ASN telah menempuh pendidikan tinggi atau mencapai 91,82% dari keseluruhan ASN di Kabupaten Majalengka dengan rincian sebagai berikut:

| Jenjang Pendidikan | Jumlah ASN |
|--------------------|------------|
| Strata Tiga (S3) | 9 |
| Strata Dua (2) | 623 |
| Strata Satu (S1) | 8.361 |
| Diploma Empat (D4) | 292 |
| Diploma Tiga (D3) | 1.396 |
| Diploma Dua (D2) | 111 |
| Diploma Satu (D1) | 18 |

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar ASN Kabupaten Majalengka merupakan sarjana atau lulusan Strata Satu (1).

Upaya yang telah

dilakukan terkait dengan indikator ini yaitu fasilitasi lembaga profesi ASN, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, peningkatan kapasitas kinerja ASN, fasilitasi pengembangan karir dalam



jabatan fungsional, pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Selain itu, telah dilaksanakan juga pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Selain itu, capaian indeks profesionalitas juga dipengaruhi oleh intervensi pemerintah melalui **program** dan kegiatan yang tertera dalam tabel berikut:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|----|--|--|--------------------|
| 1. | Program Kepegawaian Daerah | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rp2.675.866.800,00 |
| 2. | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rp6.074.039.400,00 |

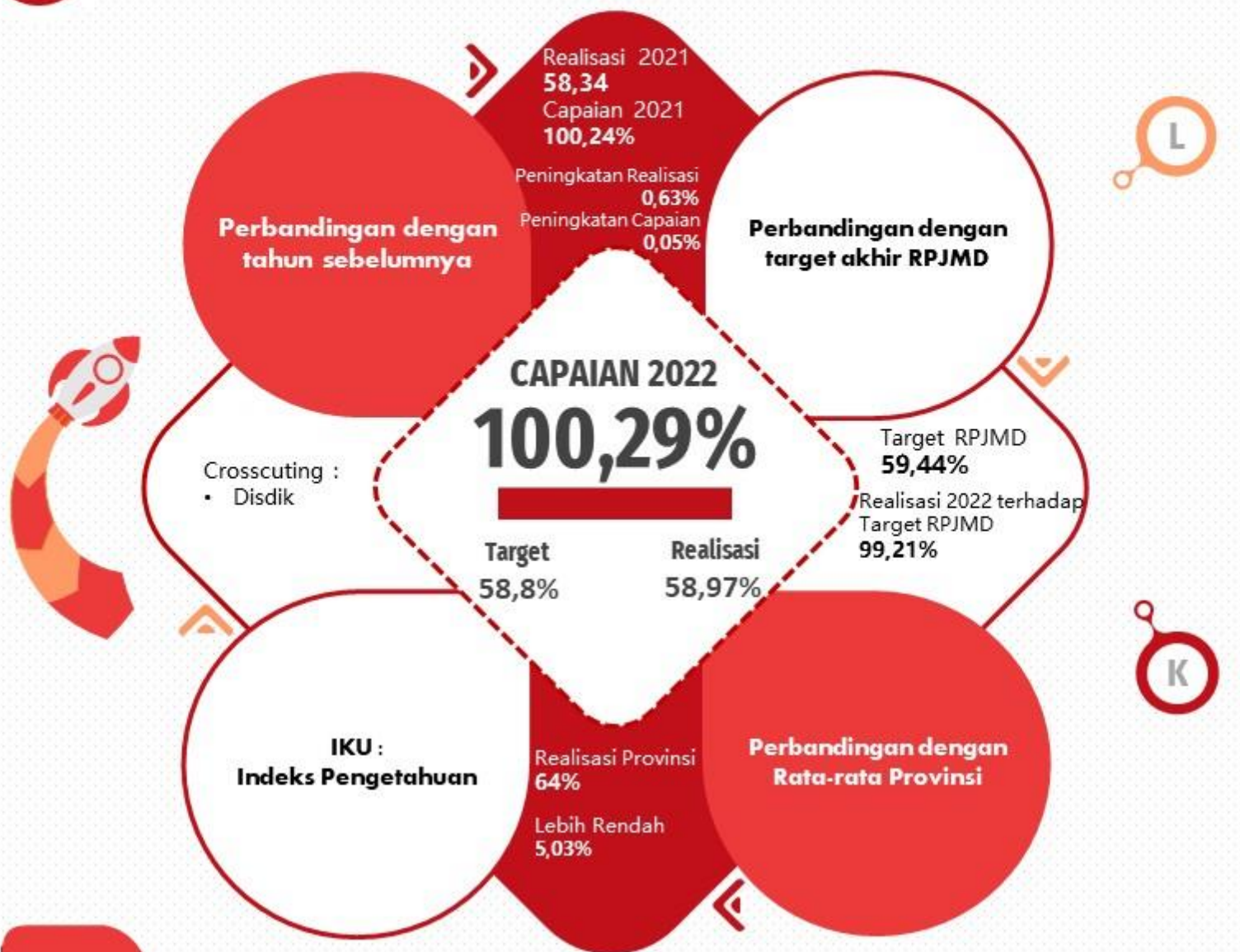
Faktor yang membuat target pada Tahun 2022 tidak tercapai adalah kualifikasi pendidikan pegawai yang masih didominasi oleh D-III sebanyak 1.396 dan S-1 sebanyak 8.361. Pengetahuan, kemampuan, keterampilan yang dimiliki ASN berpengaruh pada keahlian atau kompetensi serta sikap dan kepribadian profesional ASN. Sehingga diperlukan percepatan peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar.

Pengembangan kompetensi yang menjadi bobot besar untuk Indeks Profesionalitas ASN belum dilaksanakan secara maksimal, dapat dilihat dari keikutsertaan diklat untuk pejabat struktural. Hanya 218 orang pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural dari total 377 orang pejabat struktural yang ditargetkan mengikuti diklat struktural. Diklat teknis, diklat Pejabat Fungsional, seminar, workshop juga masih minim dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan diklat tersebut.

Selain itu, penentuan besarnya Indeks Profesionalitas ASN juga diukur dari banyaknya sertifikat pelatihan yang dimiliki. Akan tetapi belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan dari BKPSDM menyebabkan masih kurangnya ASN yang memiliki sertifikat pelatihan.

Oleh karena itu, **upaya yang dapat dilakukan pada tahun mendatang antara lain** dilakukan profiling untuk mengidentifikasi kompetensi melalui *assessment center*, mengklasifikasikan ASN berdasarkan kompetensi yang dimiliki, menempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya serta mengembangkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Profesionalisme, Kinerja dan Kesejahteraan ASN tidak bisa dihitung karena IKU tidak mencapai 100%.



Faktor

- Harapan Lama Sekolah
- Rata-rata Lama Sekolah
- Angka Partisipasi Murni

Program

- Program Pengelolaan Pendidikan (Sekolah Dasar)
- Program Pengelolaan Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama)
- Program Pengelolaan Pendidikan (Pendidikan Non Formal)
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Efisiensi

Efisiensi atas capaian Sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan sebesar **6,44%**



**SASARAN 10:
MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN**

Sasaran ini diukur dengan Indeks Pengetahuan. Perangkat Daerah yang mengampu indikator kinerja ini adalah Dinas Pendidikan.

Penanggungjawab IKU Sasaran 10 : Dinas Pendidikan



Indeks Pengetahuan

Indeks Pengetahuan di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan **capaian target Tahun 2022** sebesar 100,29% dengan realisasi 58,97% dari target 58,80%. Peningkatan ini juga dapat dilihat jika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya**. Tahun 2022 mengalami peningkatan capaian sebesar 0,05% dibandingkan dengan capaian Tahun 2021. Begitu pula dengan realisasi pada Tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebesar 0,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indeks pengetahuan juga selama periode RPJMD terus mengalami peningkatan. **Realisasi Tahun 2022 terhadap RPJMD** telah mencapai 99,21%. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pengetahuan Kabupaten Majalengka mengalami percepatan sebanyak 19,21%.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) | Realisasi Jawa Barat |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 58,80 | 58,97 | 58,34 | 59,44 | 64 |

Intervensi Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menjadi faktor peningkatan Indeks Pengetahuan melalui **program-program** sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|----|---|------------------|----------------------|
| 1. | Program Pengelolaan Pendidikan (Sekolah Dasar) | Dinas Pendidikan | Rp411.496.681.514,00 |
| 2. | Program Pengelolaan Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama) | Dinas Pendidikan | Rp62.274.113.400,00 |
| 3 | Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Dinas Pendidikan | Rp23.366.544.100,00 |
| 4 | Program Pengelolaan Pendidikan (Pendidikan Nonformal) | Dinas Pendidikan | Rp10.807.610.500,00 |



Indeks Pengetahuan merupakan tolak ukur kualitas pendidikan. Peningkatan Indeks Pengetahuan di Kabupaten Majalengka menandakan semakin berkualitasnya pendidikan di Kabupaten Majalengka. Peningkatan ini dipengaruhi oleh **faktor** seperti Harapan Lama Sekolah

(HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS di Kabupaten Majalengka mencapai 12,24 tahun, menunjukkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh anak-anak berusia tujuh tahun untuk menempuh pendidikan formal sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kemudian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan pengukuran yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan asumsi

pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Adapun Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Majalengka sebesar 7,49 tahun yang menunjukkan rata-rata penduduk yang berusia di atas 25 tahun menyelesaikan pendidikan formal sampai dengan jenjang minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga mempengaruhi peningkatan indeks pengetahuan, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

| Jenjang Pendidikan | Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) |
|--------------------|---------------------------------------|
| APM PAUD | 95,84% |
| APM SD/MI | 93,19% |
| APM SMP/MTs | 89,22% |
| APK Non Formal | 113% |

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan mutu pendidikan diantaranya pengadaan perlengkapan siswa, alat praktik dan peraga, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, pengelolaan dana BOS dan dana BOP untuk sekolah Non Formal/Kesetaraan serta pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah.

Upaya lainnya yaitu meningkatkan kualitas sarana prasarana sekolah seperti rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan sedang/berat.



MONITORING REHABILITASI DAU PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022
DI KECAMATAN JATIWANGI



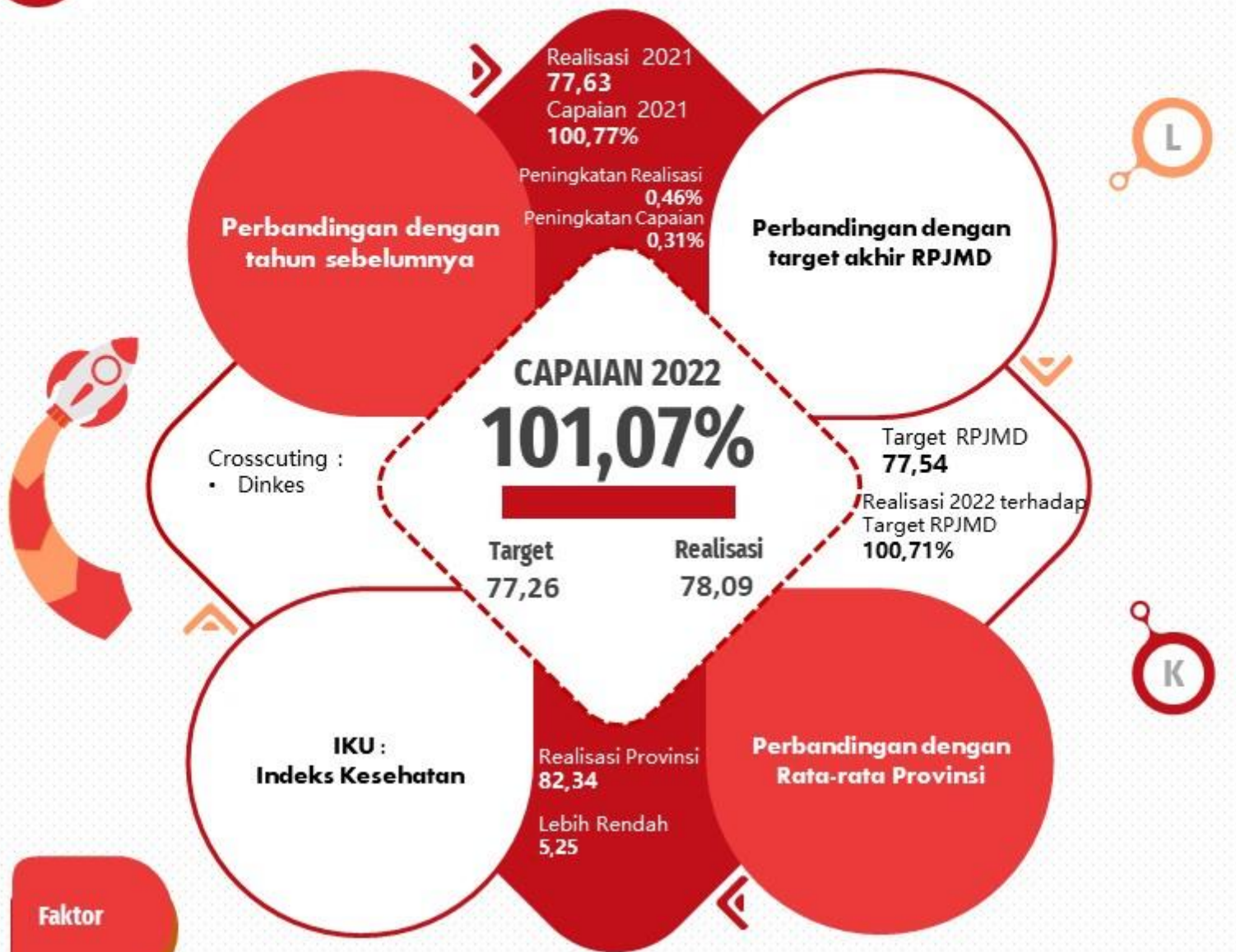
MONITORING REHABILITASI DAU PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022
DI KECAMATAN MALAUSMA

Akan tetapi jika **dibandingkan dengan rata-rata Indeks Pengetahuan di Provinsi Jawa Barat**, Indeks Pengetahuan Kabupaten Majalengka lebih rendah 5%. Rata-rata Indeks Pengetahuan di Provinsi Jawa Barat yaitu 64%. Oleh sebab

itu, Indeks Pengetahuan Kabupaten Majalengka menempati urutan ke 22 di Provinsi Jawa Barat.

Untuk meningkatkan capaian Indeks Pengetahuan perlu dilakukan beberapa **upaya di tahun mendatang** antara lain mengoptimalkan program-program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, seperti pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan dana BOS yang lebih efektif dan efisien, rehabilitasi sedang/berat pada ruang sekolah, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD, penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan sasaran strategis Meningkatkan Mutu Pendidikan melalui indikator Indeks Pengetahuan yaitu 6,44% atau sebesar Rp32.733.796.720,00 dari pagu anggaran Rp507.944.949.514,00 dengan realisasi Rp475.211.152.794,00.



Faktor

- Persentase peningkatan capaian puskesmas memenuhi standar
- Persentase puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan
- Persentase peningkatan status akreditasi puskesmas dan UPTD Labkesda
- Persentase indeks keluarga sehat
- Persentase kesediaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (ASPAK)
- Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)
- Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir
- Persentase pelayanan kesehatan balita
- Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Persentase pelayanan pada usia produktif
- Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB
- Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Program

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Pelayanan Kesehatan Primer)
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM Bidang Kesehatan)

Efisiensi

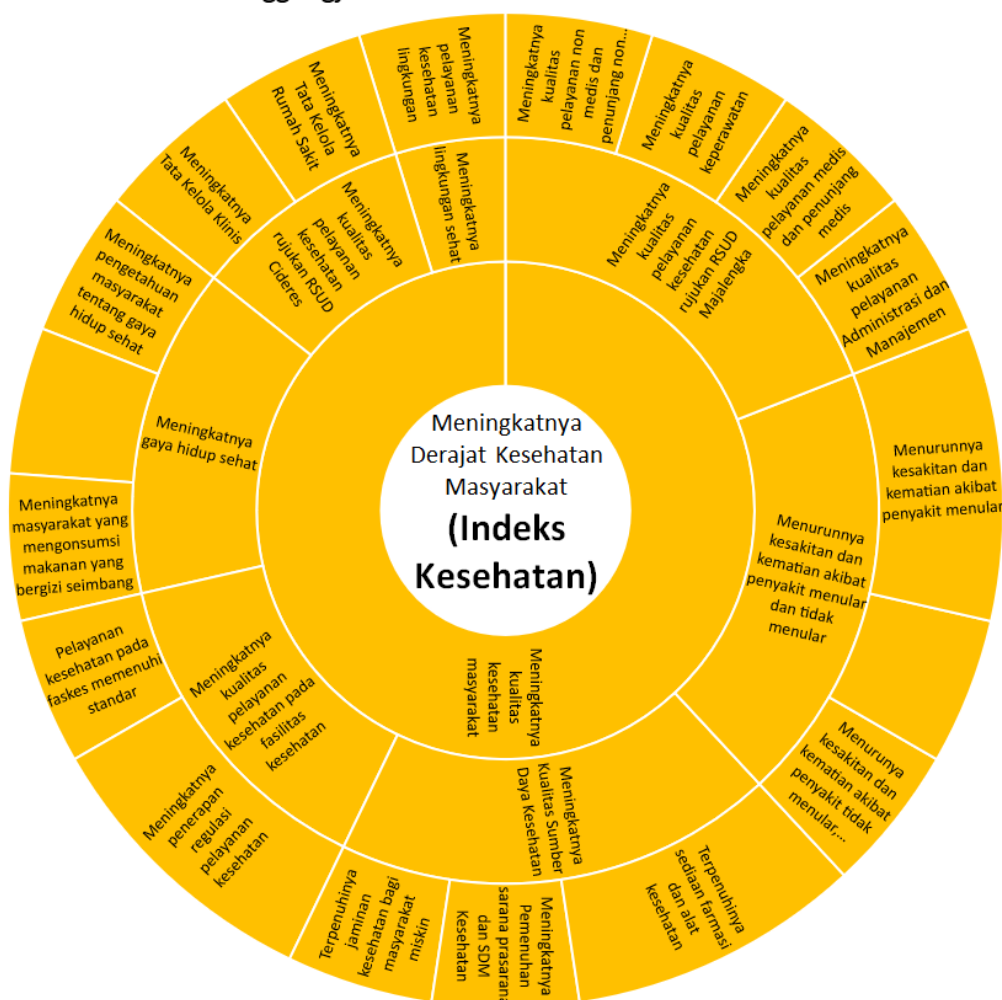
Efisiensi atas capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan sebesar **17,24%**



SASARAN 11: MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Sasaran ini diukur oleh Indeks Kesehatan. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Kesehatan.

Penanggungjawab IKU Sasaran 11 : Dinas Kesehatan



Indeks Kesehatan

Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Kesehatan di Kabupaten Majalengka **pada Tahun 2022** yaitu sebesar 101,07% dengan Nilai Indeks Kesehatan sebesar 78,09 poin dan melampaui target yang hanya 77,26 poin. **Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, capaian Tahun 2022 mengalami kenaikan 0,31%. Peningkatan juga dapat dilihat pada realisasi Tahun 2022 terhadap tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,46 poin.

Indeks Kesehatan di Kabupaten Majalengka selalu mengalami kenaikan sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, menandakan derajat kesehatan

masyarakat yang semakin baik. Adapun jika **dibandingkan dengan target RPJMD**, kinerja Tahun 2022 sudah jauh melampaui realisasi ideal tahun keempat RPJMD yaitu mencapai 100,71%. Akan tetapi jika **dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat**, Indeks Kesehatan Kabupaten Majalengka lebih rendah 5,25 poin.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) | Realisasi Jawa Barat |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 77,26 | 78,09 | 77,63 | 77,54 | 83,34 |



Faktor yang mempengaruhi tercapainya target derajat kesehatan di Kabupaten Majalengka yaitu meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan baik sumber daya manusia maupun sarana prasarananya. Hal tersebut sangat penting untuk memberikan kontribusi yang optimal pada jalannya proses

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. **Upaya yang telah dilakukan** yaitu meningkatkan kuantitas Puskesmas yang memenuhi standar menjadi 30 Puskesmas dari total 32 Puskesmas di Kabupaten Majalengka. Ada pula Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan sebanyak 29 Puskesmas serta UPTD Labkesda dan Puskesmas yang meningkat status akreditasinya sebanyak satu unit.

Faktor lain yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang terlihat dari **upaya yang telah dilakukan** berupa pelayanan Kesehatan ibu hamil (Kontak Minimal Empat Kali Selama Masa Kehamilan/K4) yang mencapai target sebanyak 19.101 orang, pelayanan kesehatan ibu bersalin sebanyak 18.347 orang, pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sebanyak



18.445 bayi, pelayanan kesehatan balita sebanyak 101.978 balita, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebanyak 13.748 orang, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebanyak 1.493 orang serta pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB) sebanyak 16.387 orang.

Program yang mendukung Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat meliputi:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|----|--|-----------------|---------------------|
| 1. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Pelayanan Kesehatan Primer) | Dinas Kesehatan | Rp49.172.744.586,00 |
| 2. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM Bidang Kesehatan) | Dinas Kesehatan | Rp1.885.522.700,00 |

Upaya yang perlu dilakukan di tahun mendatang seperti meningkatkan ketersediaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (ASPAK), pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, sehingga capaian pelayanan tersebut dapat lebih meningkat di tahun selanjutnya.

Efisiensi atas capaian kinerja dengan sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui indikator Indeks Kesehatan yaitu 17,24% atau sebesar Rp8.800.981.446,00 dari pagu anggaran Rp51.058.267.286,00 dengan realisasi Rp42.257.285.840,00.



Faktor

- Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman
- Persentase sampah yang dikelola

Program

- Program kawasan permukiman
- Program pengelolaan persampahan

Efisiensi

Efisiensi atas capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman sebesar **0,84%**

KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN



**SASARAN 12:
MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN**

Sasaran ini diukur oleh indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Lingkungan Hidup. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak adalah salah satu indikator dari 5 (lima) indikator pengukuran persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun. Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah

dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), atau tersambung ke Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Capaian Kinerja untuk indikator Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sanitasi Baik pada **Tahun 2022 adalah sebesar 100,01%** dengan realisasi sebesar 69,76% dari target sebesar 69,75%. Jika **membandingkan realisasi Tahun 2022 dengan Target RPJMD**, realisasi kinerja Tahun



2022 atau di tahun ke-4 ini sudah mencapai target sebesar **99,49%**. Akan tetapi, capaian Tahun 2022 lebih rendah **dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021** yaitu sebesar **100,35%**. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan target kinerja dimana pada Tahun 2021 indikator tersebut ditargetkan lebih rendah dibanding Tahun 2022 sebesar 69,38% dan terealisasi sebesar 69,62%.



Jika **dibandingkan dengan rata-rata Persentase Rumah Tangga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak Provinsi Jawa Barat** yaitu sebesar 74,02%, posisi Kabupaten Majalengka ada di bawah rata-rata dengan selisih 4,26%. Begitu juga apabila **dibandingkan dengan rata-rata nasional Tahun 2022** sebesar 80,92%,

maka Kabupaten Majalengka juga masih ada di bawah rata-rata nasional sebesar 11.16%.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) | Rata-Rata Jawa Barat |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 69,75 | 69,76 | 69,62 | 70,12 | 74,02 |

Faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini yaitu adanya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik. Selain itu, pengelolaan sampah juga menjadi faktor yang ikut menentukan tingkat sanitasi rumah tangga melalui Penanganan sampah

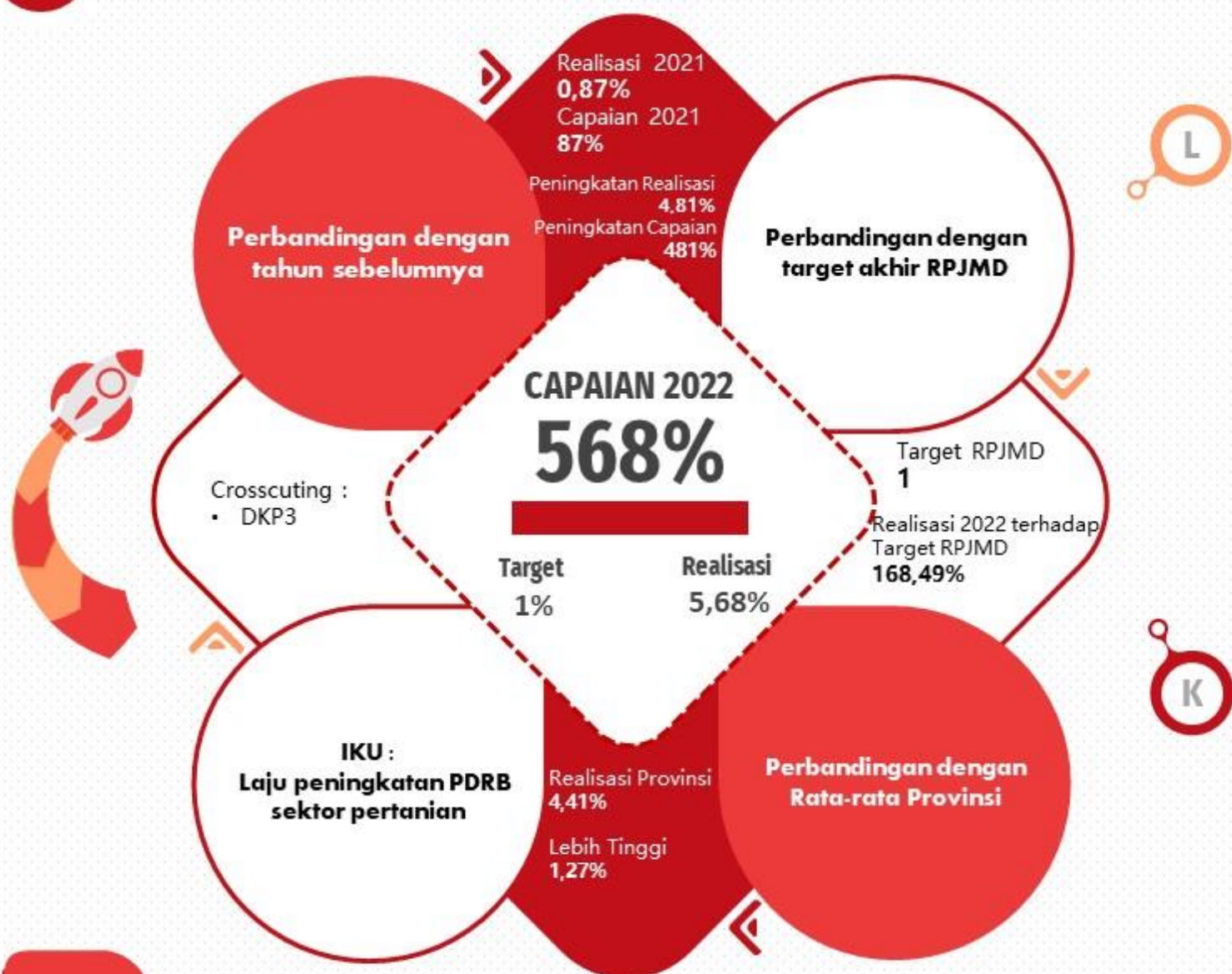
dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. **Upaya yang telah dilakukan** Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2022 diantaranya pembangunan 1 unit MCK di Desa Lebakwangi Kecamatan Malausma, Pembangunan Baru Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK di 3 lokasi yaitu di Desa Argamukti Kecamatan Argapura, Desa Kagok Kecamatan Banjaran dan Desa Sindangwangi Kecamatan Sindangwangi.

Adapun **program** Pemerintah Kabupaten Majalengka yang mendukung pencapaian target IKU Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sanitasi Baik bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|----|---------------------------------|--|---------------------|
| 1. | Program Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Rp2.242.190.000,00 |
| 2. | Program Pengelolaan Persampahan | Dinas Lingkungan Hidup | Rp 5.588.405.200,00 |

Untuk pencapaian target kinerja indikator Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sanitasi Baik, Pemerintah Daerah melalui *leading* sektor Perangkat Daerah pengampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.830.595.200,00 dan terserap sebesar Rp7.764.898.350,00 sehingga **terdapat efisiensi sebesar 0,84% atau Rp65.696.850,00.**

Meningkatnya Kesejahteraan Petani



Faktor

- Meningkatkan produktivitas pertanian
- Meningkatkan produktivitas perikanan
- Tersedianya ketahanan pangan
- Nilai Tukar Petani

Program

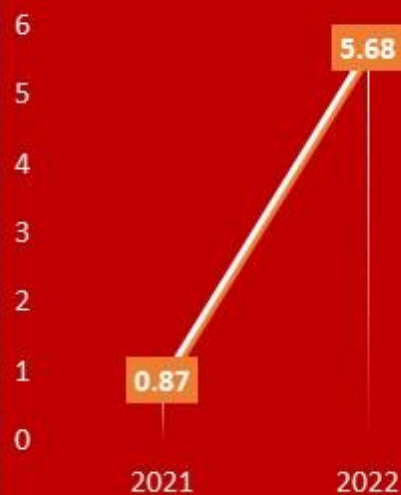
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Efisiensi

Efisiensi atas capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani sebesar **0,99%**

KESEJAHTERAAN PETANI

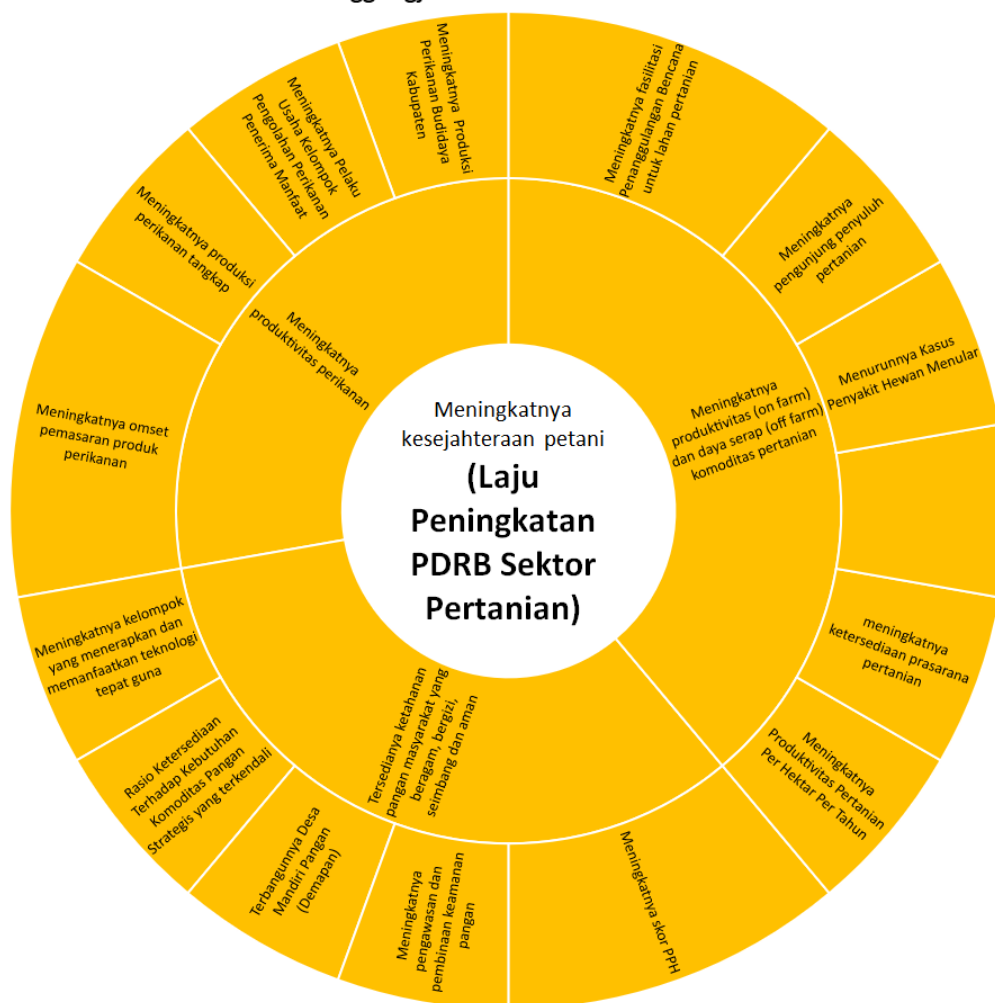
— Laju peningkatan PDRB sektor pertanian



**SASARAN 13:
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PETANI**

Sasaran ini diukur dengan Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Penanggungjawab IKU Sasaran 13 : DKP3



Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian

PDRB sektor pertanian Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan **capaian pada Tahun 2022** sebesar 568%. Peningkatan laju PDRB sektor pertanian Tahun 2022 dibandingkan **dengan tahun sebelumnya** yaitu sebesar 481% atau 4,81 poin jika dilihat dari peningkatan realisasinya. Laju peningkatan PDRB sektor pertanian Tahun 2022 **jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD** sudah melebihi target yaitu meningkat setiap tahun sebesar 1%. Jika di rata-rata dari 2019-2022 setiap tahun meningkat 1,86% atau sudah melebihi target 186,49%. PDRB sektor pertanian Kabupaten

Majalengka 1,27 poin lebih tinggi dibandingkan dengan **PDRB di Jawa Barat** yaitu 4,41%.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) | Realisasi Jawa Barat |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 1,0 | 5,68 | 0,87 | 1,0 | 4,41 |

Meningkatnya kesejahteraan petani di Kabupaten Majalengka **dipengaruhi oleh faktor** meningkatnya ketahanan pangan yang ditandai oleh tercapainya target pemenuhan ketersediaan pangan.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. **Upaya yang**



dilakukan yaitu meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 0,65% Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Selain itu, Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan jumlah kelompok yang menerapkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna.

Faktor selanjutnya yaitu meningkatnya produktivitas perikanan yang ditandai dengan jumlah total produksi perikanan budidaya kabupaten yang melebihi target 107% dengan realisasi 10,65% dari target 10%, jumlah omset pemasaran produk perikanan juga melebihi target 114,4% dengan realisasi 5,72% dari target 5%. **Upaya yang telah dilakukan** adalah menyediakan sarana budidaya ikan secara intensif dan membina kelompok usaha perikanan.

Faktor lainnya yaitu meningkatnya produktivitas (*on farm*) dan daya serap (*off farm*) komoditas pertanian yang ditandai dengan tercapainya target peningkatan



produktivitas pertanian sebesar 103% dengan realisasi 82% dari target 80%, tercapainya ketersediaan sarana prasarana pertanian sebesar 105% dengan realisasi 63% dari target 60%.

Tercapainya penurunan kasus penyakit hewan menular sebesar 120% dengan realisasi 36% dari target 30%.

Upaya yang telah dilakukan adalah menyediakan peralatan dan pupuk bersubsidi untuk masyarakat, melakukan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kualitas produksi dan melakukan pemeriksaan serta pemberian vaksin untuk mencegah penyakit hewan menular. Peningkatan PDRB sektor pertanian yang signifikan sangat wajar terjadi karena berdasarkan data dari Kementerian Pertanian RI memang terjadi peningkatan produksi padi dan produksi komoditas telur ayam ras dan daging sapi.

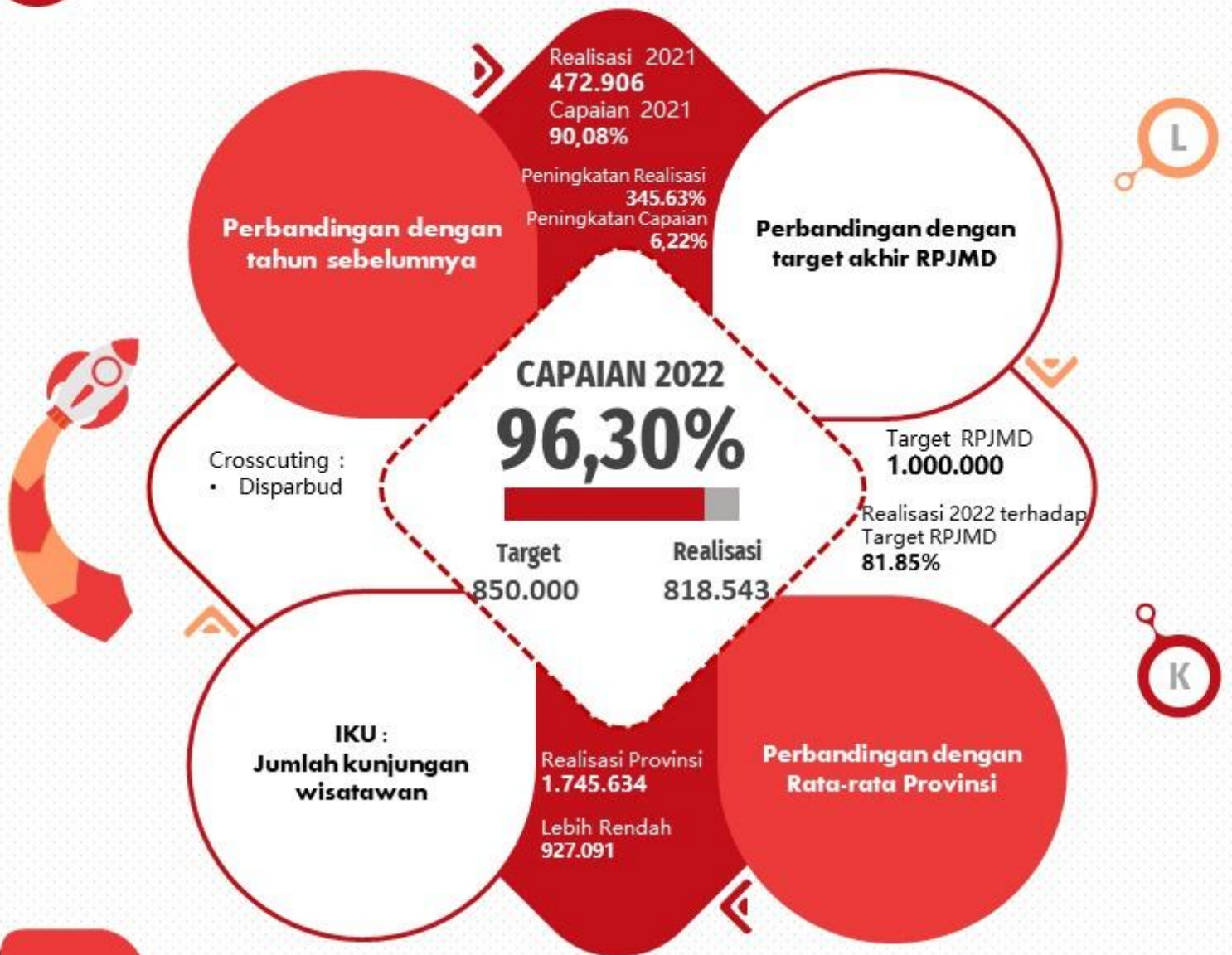
Program yang mendukung Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian meliputi:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|----|---|---|----------------------|
| 1. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Rp6.864.088.900,00 |
| 2. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Rp1.300.000.000,00 |
| 3. | Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Rp4.341.942.000,00 |
| 4. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Rp340.000.000,00 |
| 5. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Rp120.476.299.239,00 |

Peningkatan kesejahteraan petani akan tetap diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Maka dari itu, **upaya yang akan dilakukan pada tahun mendatang** adalah tetap memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang terjangkau, memfasilitasi infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, merealisasikan desa mandiri pangan, memahami kebutuhan produk dari industri agar impor komoditas bisa diturunkan, optimalisasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan penyuluhan pertanian, optimalisasi pemasaran ikan baik itu dalam penambahan pasar ikan atau metode pemasaran digital, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan serta mensubsidi pakan ternak berkualitas.

Efisiensi atas capaian kinerja dengan sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Petani melalui indikator Laju PDRB Sektor Pertanian yaitu 0,99% atau sebesar Rp1.325.017.937,00 dari pagu anggaran Rp133.322.330.139,00 dengan realisasi Rp131.997.312.202,00.

Meningkatkan Kunjungan Wisata



Faktor

- PDRB Sektor Pariwisata
- Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif
- Persentase Daya Tarik Yang dipromosikan
- Objek Pemajuan Kebudayaan

Program

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Efisiensi

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak ada karena IKU tidak tercapai 100%

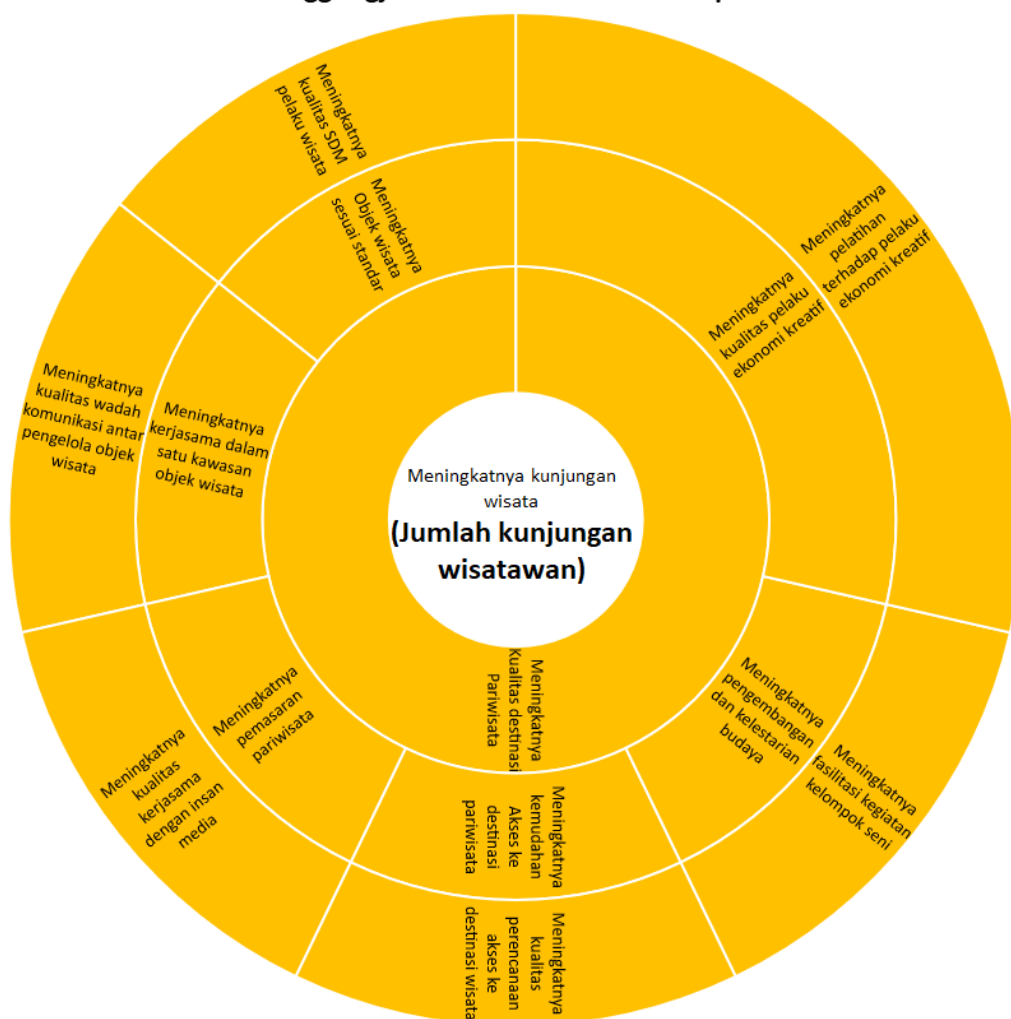
JUMLAH KUNJUNGAN WISATA



**SASARAN 14:
MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATA**

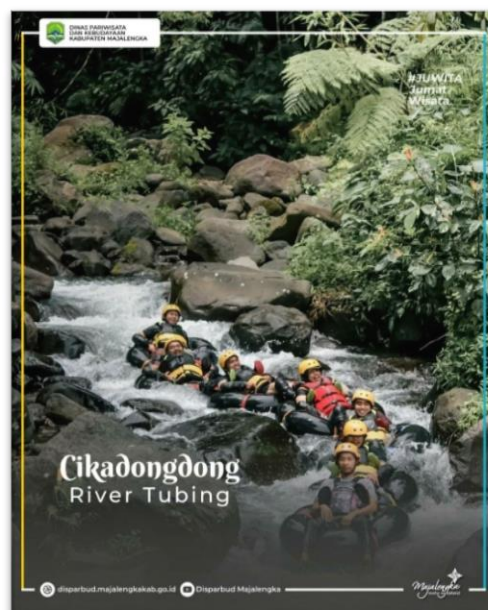
Sasaran ini diukur dengan Jumlah Kunjungan Wisatawan. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Penanggungjawab IKU Sasaran 14 : Disparbud



Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan. Sebanyak 818.543 wisatawan berwisata di Kabupaten Majalengka, sehingga **capaian pada Tahun 2022** sebesar 96,30% dari jumlah wisatawan yang ditargetkan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini juga dapat dibuktikan ketika **dibandingkan dengan tahun sebelumnya**. Capaian indikator ini



lebih tinggi 6,22% dibandingkan dengan Tahun 2021. Hal ini terlihat pada jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2022 yang lebih banyak 345.637 orang dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2021. Tahun 2022 menjadi tahun dengan jumlah kunjungan paling banyak selama perjalanan RPJMD 2019-2023.

Jika **dibandingkan dengan target RPJMD** yang mengharapkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 1.000.000 di kondisi akhir, realisasi Tahun 2022 telah mencapai 81,85%. Hal ini menunjukkan adanya percepatan capaian sebesar 1,85% dari capaian ideal di tahun keempat RPJMD.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) | Realisasi Jawa Barat |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 850.000 | 818.543 | 472.906 | 1.000.000 | 1.745.634 |

Akan tetapi jika **dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat**, Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Majalengka Tahun 2022 masih berada di bawah rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Jawa Barat. Rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Jawa Barat telah mencapai 1.745.634 wisatawan, sedangkan di Kabupaten Majalengka masih lebih rendah 927.091 wisatawan untuk bisa mengejar rata-rata wisatawan Jawa Barat.

Situ Cipanten menjadi tempat wisata dengan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi sebanyak 93.783 kunjungan. Disusul Terasering Panyaweuyan dengan kenaikan 81.553 kunjungan dan Jembar *Waterpark* dengan kenaikan 44.783 kunjungan.



Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh beberapa **faktor** seperti meningkatnya objek wisata yang dikelola dan dapat dikunjungi dari tahun sebelumnya yang hanya 38 objek wisata sedangkan pada Tahun 2022 menjadi 43 objek wisata. Semakin terbarnya objek wisata di Kabupaten Majalengka membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk menjual berbagai macam suvenir dan jajanan khas, sehingga secara tidak langsung ikut mendongkrak perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata. Selain itu intervensi pemerintah melalui **program** berikut mempengaruhi capaian jumlah kunjungan wisatawan.

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|----|--|---------------------------------|------------------|
| 1. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Rp567.900.000,00 |
| 2. | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Rp6.300.000,00 |
| 3. | Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Rp696.120.100,00 |
| 4. | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Rp225.100.000,00 |

Pengembangan seni tradisional juga menjadi salah satu **faktor** untuk meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Majalengka. Sampyong menjadi salah satu kesenian tradisional yang dilestarikan sekaligus menjadi



daya tarik wisata. Sampyong merupakan seni ketangkasan yang memadukan seni tari, seni musik dan seni bela diri. Hal tersebut merupakan **upaya** Pemerintah dalam mengelola kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.



Faktor pemasaran pariwisata sangat berperan penting dalam membangun *image* objek wisata yang ada di Kabupaten Majalengka. Kunjungan wisatawan yang semakin meningkat juga dipengaruhi oleh

gencarnya promosi objek pariwisata di berbagai media yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. **Upaya yang telah dilakukan** yaitu penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya serta penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata di Kabupaten Majalengka.

Meskipun ketertarikan masyarakat untuk berwisata di Kabupaten Majalengka cukup tinggi, namun target pada Tahun 2022 belum tercapai. **Faktor penghambat belum tercapainya target** diantaranya tidak sedikit dari masyarakat Majalengka yang berwisata ke luar Kabupaten Majalengka karena daya tarik wisata dan ketersediaan aksesibilitas ke beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Majalengka belum memadai. Masih banyak objek wisata yang sulit di akses karena jalan kecil dan rusak serta pengelolaan di beberapa objek wisata yang belum maksimal.

Selain itu, belum optimalnya kerjasama yang dilakukan dengan pihak terkait seperti hotel, restoran, operator tur yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan menarik wisatawan berkunjung karena pengalaman yang menyenangkan dapat membuat wisatawan merasa puas dan ingin kembali berkunjung. Ketersediaan informasi harus lebih akurat dan terbaru tentang destinasi wisata serta belum menyediakan program wisata yang menarik dan bervariasi.

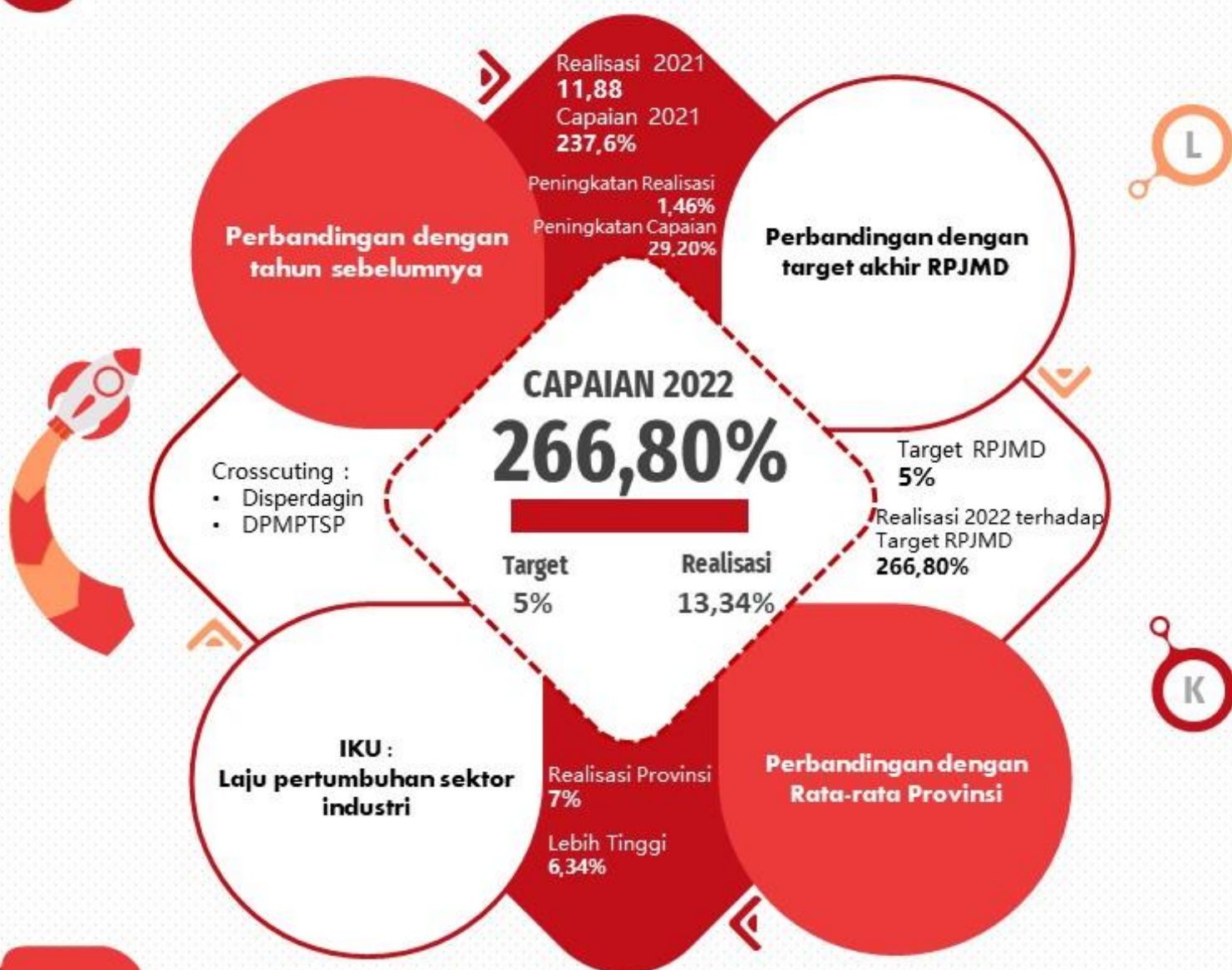


Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk pengembangan potensi wisata dan menaikkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Majalengka antara lain:

1. Pengembangan dan penguatan obyek wisata yang khas;
2. Memperbaiki dan merawat sarana prasarana menuju objek wisata;
3. Menyediakan dan memperbaiki fasilitas yang ada di objek wisata;
4. Meningkatkan promosi dan menjaga citra objek wisata
5. Menyediakan layanan penunjang tambahan di objek wisata
6. Menentukan tarif yang bersaing untuk objek wisata beserta infrastruktur pendukung lainnya
7. Meningkatkan kapasitas SDM pelaku pariwisata
8. Meningkatkan kerja sama (*networking*) dengan *stakeholder* dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata.

Efisiensi atas capaian sasaran Meningkatkan Kunjungan Wisata **belum bisa dihitung dikarenakan IKU tidak mencapai 100%**.

Meningkatnya Investasi Sektor Industri



Faktor

- Peningkatan permintaan konsumen dari pasar Asia
- Meredanya pandemi Covid-19

Program

- Program perencanaan dan pengembangan industri
- Program pengembangan iklim penanaman modal
- Program promosi penanaman modal

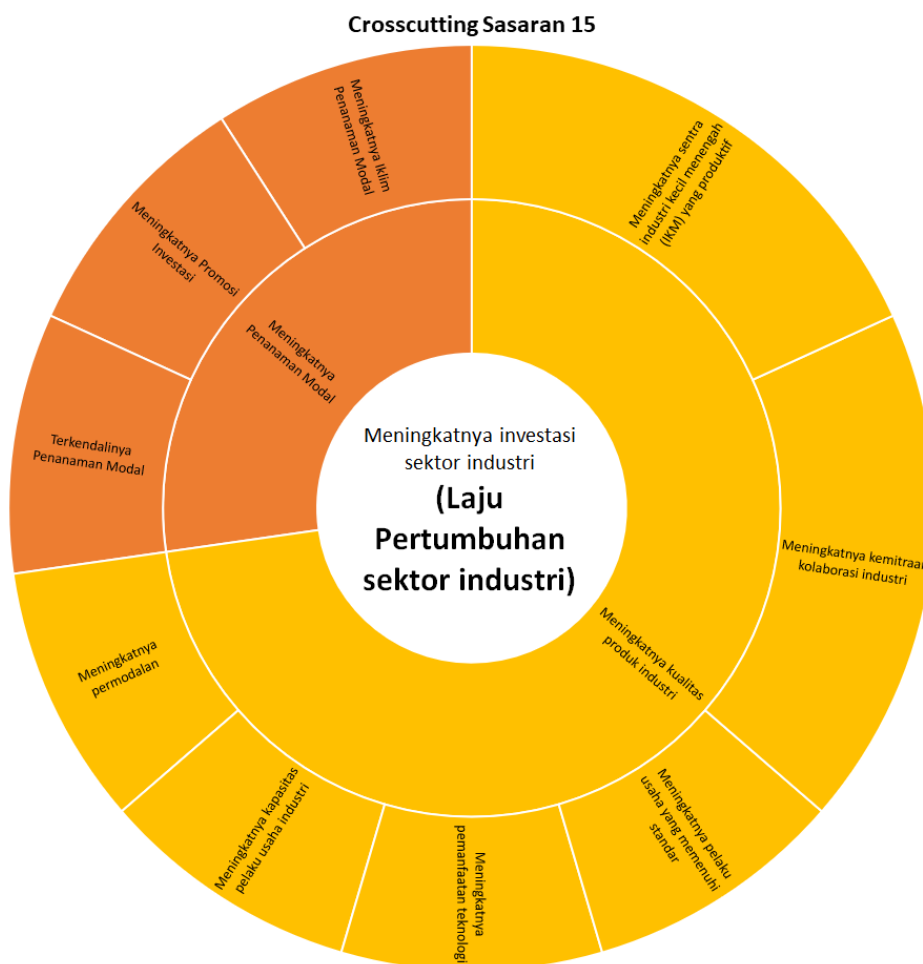
Efisiensi

Efisiensi atas capaian Sasaran Meningkatnya Investasi Sektor Industri sebesar **3,84%**



**SASARAN 15:
MENINGKATNYA INVESTASI SEKTOR INDUSTRI**

Sasaran ini diukur dengan Laju Pertumbuhan Sektor Industri. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Laju Pertumbuhan Sektor Industri

Laju Pertumbuhan Sektor Industri di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan **realisasi pada Tahun 2022** sebesar 13,34% dari target 5% dengan capaian 266,8%. Capaian Tahun 2022 naik 29,2% **dibandingkan dengan tahun sebelumnya** yang hanya mencapai 237,6%. Jika **dibandingkan dengan target RPJMD**, Laju Pertumbuhan Sektor Industri Tahun 2022 sudah melebihi harapan tahun keempat RPJMD yaitu mencapai 266,8%. **Dibandingkan dengan rata-rata di Provinsi Jawa Barat** Laju Pertumbuhan Sektor Industri Kabupaten Majalengka 6,34% lebih besar

dari rata-rata pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat, rata-rata pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 7%.



Peningkatan Laju Pertumbuhan Sektor Industri di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh meredanya pandemi Covid-19 pada Tahun 2022. Hal ini

berimplikasi positif dengan semakin membaiknya kinerja sektor usaha industri pengolahan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang impulsif pasca pandemi Covid-19.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) | Realisasi Jawa Barat |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 5,00 | 13,34 | 11,88 | 5,00 | 7,00 |

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini yaitu meningkatnya penanaman modal dan meningkatnya kualitas produksi industri. Lapangan usaha Industri Pengolahan di Tahun 2022 mampu menjadi *Source of Growth* pertumbuhan ekonomi terbesar di Kabupaten Majalengka. Seperti diketahui bahwa sebagian besar industri pengolahan di Kabupaten Majalengka didominasi oleh industri tekstil, konveksi dan alas kaki. Industri ini merupakan industri yang berorientasi ekspor, hampir seluruh hasil produksinya di kirim ke



luar negeri untuk memenuhi permintaan pasar Asia, Eropa dan Amerika. Membaiknya perekonomian global pasca meredanya wabah pandemi Covid-19, berimplikasi positif bagi industri tekstil, konveksi dan alas kaki yang ada di Majalengka. Permintaan konsumen dari pasar Asia, Amerika dan Eropa meningkat, otomatis meningkat pula kuantitas volume dan nilai produksi industri ini. Ekspor produk tekstil, konveksi dan

alas kaki yang sempat terhenti selama pandemi, sekarang kembali berangsur normal.

Selama Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Majalengka **telah melakukan upaya** seperti pembuatan peta potensi investasi kabupaten dan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

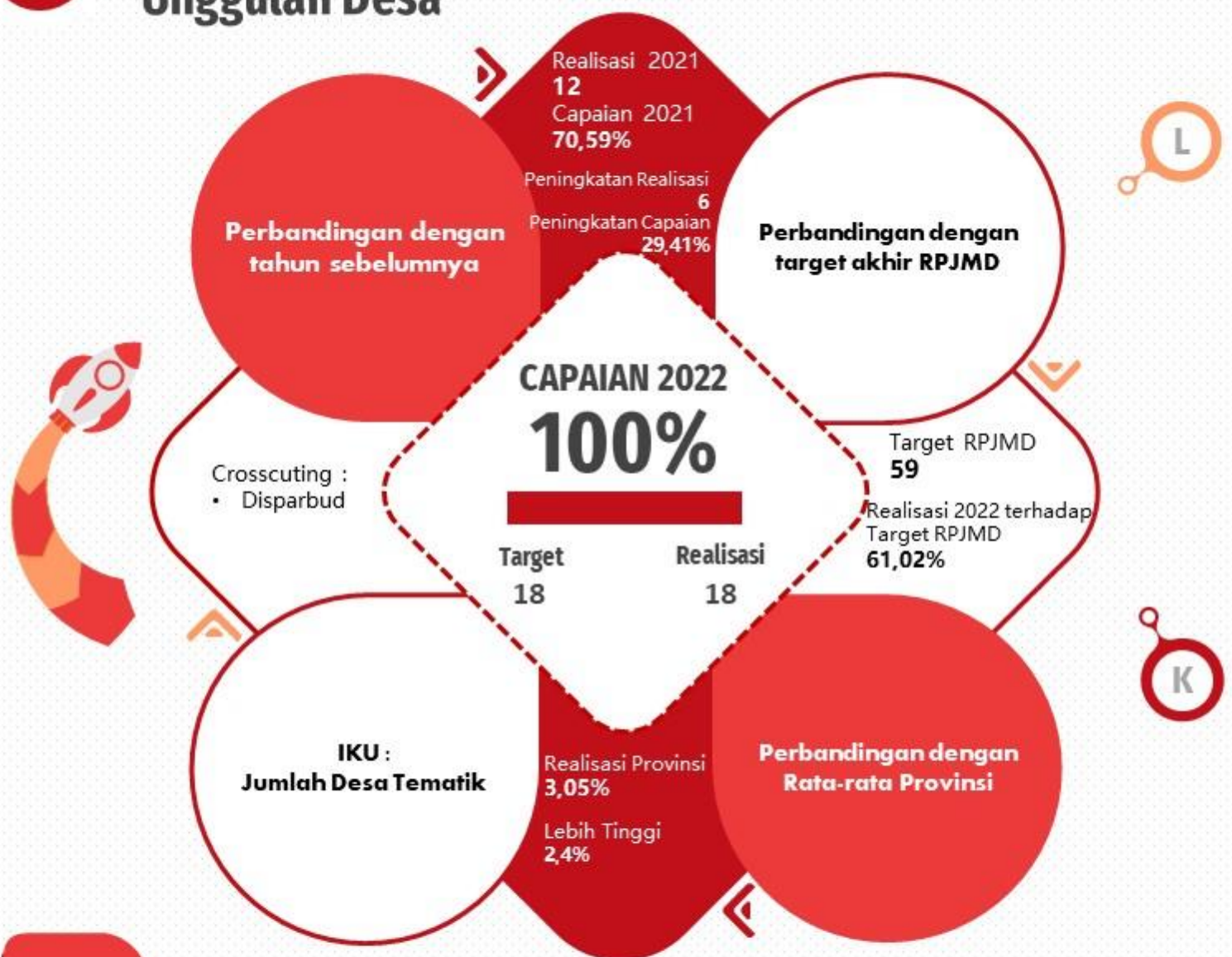
Intervensi Pemerintah Kabupaten Majalengka juga menjadi faktor keberhasilan peningkatan Laju Pertumbuhan Sektor Industri melalui **program-program** sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|-----------|--|--|------------------|
| 1. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Rp96.650.000,00 |
| 2. | Program Promosi Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Rp139.600.000,00 |
| 3. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Rp824.544.291,00 |

Adapun **upaya yang akan dilakukan pada tahun mendatang** antara lain mendukung pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan industri, penerapan konsep produksi yang bersih, pencegahan polusi, efisiensi energi, dan kolaborasi bisnis.

Efisiensi atas capaian sasaran Meningkatnya Investasi Sektor Industri dengan indikator Laju Pertumbuhan Sektor Industri sebesar 3,84% atau Rp40.719.141,00 dari pagu anggaran sebesar Rp1.060.794.291,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.020.075.150,00.

Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa



Faktor

- Realisasi di Tahun 2020
- Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa
- Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten

Program

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

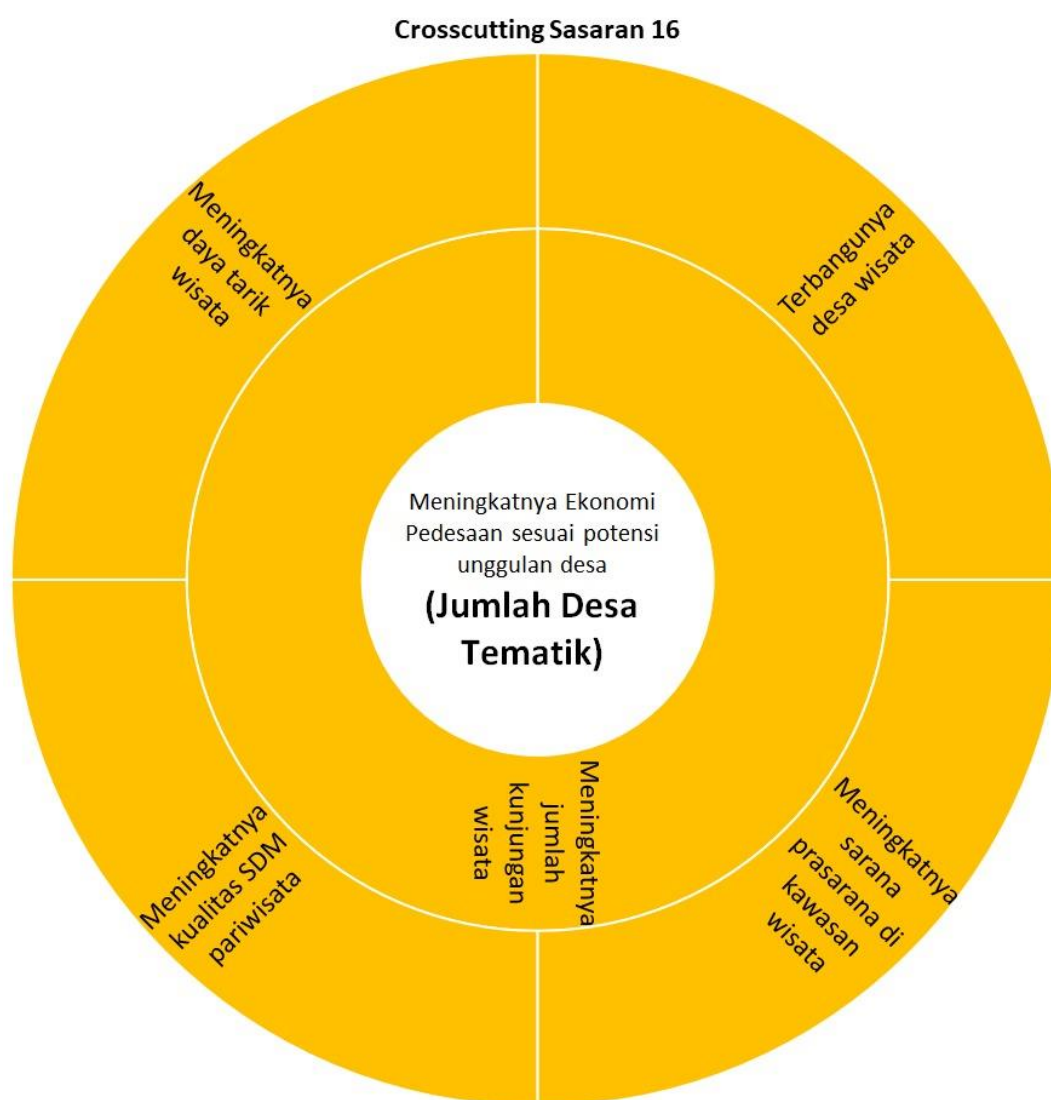
Efisiensi

Efisiensi atas capaian Sasaran Meningkatkan Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa sebesar **0,75%**



**SASARAN 16:
MENINGKATNYA EKONOMI PEDESAAN SESUAI POTENSI UNGGULAN
DESA**

Sasaran ini diukur dengan Jumlah Desa Tematik. Perangkat Daerah yang mengampu indikator ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.



Jumlah Desa Tematik

Pembentukan desa tematik di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan. Sebanyak 18 desa tematik dapat direalisasikan pada Tahun 2022 yang terdiri dari desa tematik kreatif dan desa wisata. **Capaian indikator desa tematik pada tahun 2022 yaitu mencapai 100 persen.** Desa Tematik Kreatif merupakan desa yang memanfaatkan potensi/keunggulan desa tersebut untuk dikelola secara bersama-sama oleh aktor ekonomi kreatif sehingga dapat menciptakan inovasi yang bersumber dari potensi/keunggulan desa tersebut dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Ada pula desa wisata yaitu desa yang memiliki keunikan daya tarik yang diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata. Kedua jenis desa tematik tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan keadaan dan potensi desa. Sehingga tujuan desa tematik untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai potensi unggulannya dapat tercapai.

Adanya peningkatan capaian pada Tahun 2022 juga dapat dibuktikan dengan **membandingkan capaian tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2021**. Pada Tahun 2021 pembentukan desa tematik hanya mencapai 70,59% dengan realisasi 12 desa tematik dari 17 desa tematik yang seharusnya terbentuk. Berdasarkan data pada Tahun 2021 tersebut, maka dapat diketahui capaian Tahun 2022 lebih tinggi 29,41% dibandingkan dengan Tahun 2021.

Kemudian jika **dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya**, realisasi desa tematik Tahun 2022 juga tetap mengalami peningkatan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa jika dibandingkan dengan Tahun 2019, realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan. Akan tetapi, penurunan tersebut terjadi signifikan mulai dari Tahun 2019 menuju Tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pandemi ini yang menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Majalengka merancang ulang target pembentukan desa tematik sehingga mempengaruhi realisasi desa tematik pada Tahun 2022. Jika melihat data tren realisasi jumlah desa tematik, Tahun 2021 menjadi *turning point* dan Tahun 2022 justru menjadi tanda adanya keberhasilan berkelanjutan setelah pandemi Covid-19. Hal ini membuktikan, Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap berkomitmen membentuk desa tematik sesuai potensi unggulan desa dengan terus berusaha bangkit setelah mengalami penurunan realisasi di Tahun 2020.

Capaian pembentukan desa tematik di Kabupaten Majalengka Tahun 2022 lebih tinggi 2,40% **dibandingkan dengan capaian desa tematik Provinsi Jawa Barat** yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| Lokus | Jumlah Desa | Realisasi Desa Tematik | Capaian |
|---|-------------|------------------------|-------------|
| Kabupaten Majalengka | 330 | 18 | 5,45 |
| Provinsi Jawa Barat | 5.312 | 162 | 3,05 |
| Selisih Capaian Kabupaten Majalengka dengan Provinsi Jawa Barat | | | 2,40 |

Sejak tahun 2019, dari 330 desa yang tersebar di Kabupaten Majalengka, 74 desa telah berubah status menjadi desa tematik dan 18 desa diantaranya merupakan realisasi Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Majalengka merancang agar pada Tahun 2023, akumulasi realisasi desa tematik selama Periode RPJMD 2019-2023 dapat terbentuk sebanyak 59 desa, dengan kondisi awal 33 desa tematik yang telah terbentuk pada Tahun 2019. **Jika dibandingkan dengan target RPJMD**, realisasi pada Tahun



2022 yang bertambah 18 desa sudah mencapai target yang seharusnya dapat dicapai pada tahun keempat RPJMD. Akumulasi realisasi desa tematik dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 seharusnya sudah terbentuk sebanyak 44 desa tematik atau 75 persen dari kondisi akhir RPJMD, namun sampai Tahun 2022 hanya terbentuk 41 desa tematik saja atau 61,02% dari target RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa akumulasi pembentukan desa tematik di Kabupaten Majalengka mengalami keterlambatan capaian sebesar 13,98% terhadap kondisi akhir yang diharapkan RPJMD.

Keterlambatan capaian pembentukan desa tematik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu adanya *refocusing* anggaran pada Tahun 2020 yang digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan realisasi desa tematik pada Tahun 2020 hanya terbentuk 6 desa saja (10,17 persen), jauh dari target realisasi tahunan yang seharusnya pada Tahun 2020 dapat terbentuk minimal 14 desa (25 persen). Kegagalan capaian Tahun 2020 ini yang selanjutnya membebani capaian ditahun-tahun berikutnya termasuk di Tahun 2022.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 18 | 18 | 12 | 59 |

Faktor keberhasilan pembentukan 18 desa tematik kreatif antara lain adanya komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Desa dan masyarakat dari kedelapan belas desa tersebut melalui **upaya** penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten dan fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif sebagai bentuk pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

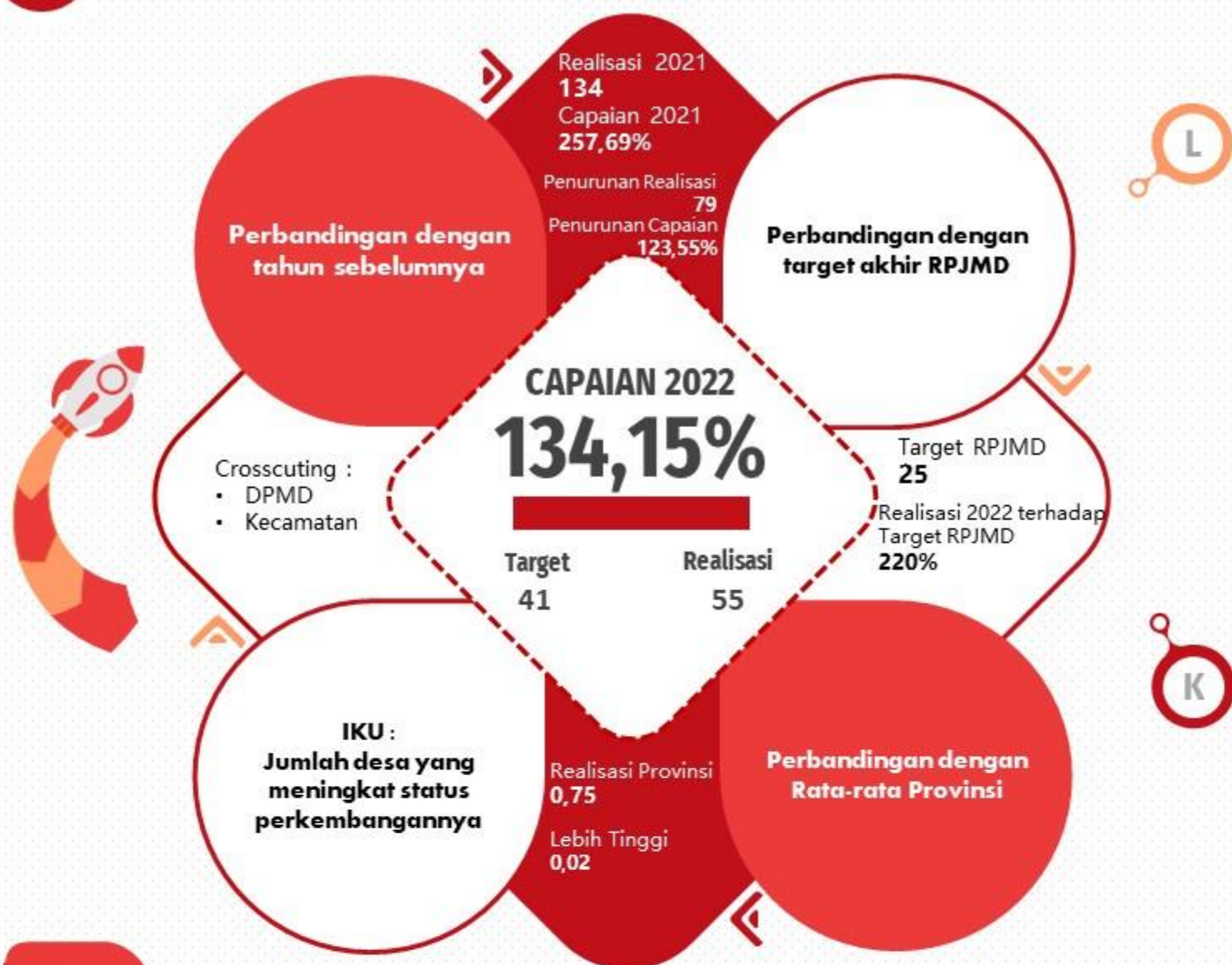
Selain itu intervensi **program** dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|-----------|--|---------------------------------|------------------|
| 1. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Rp142.450.000,00 |
| 2. | Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Rp383.700.000,00 |

Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk mencapai target kondisi akhir RPJMD yaitu:

1. Menggali potensi desa melalui pembinaan dan pendampingan untuk menjadi desa tematik sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing desa.
2. Melakukan kegiatan branding di desa agar desa memiliki identitas yang berdaya saing sehingga memiliki kekhasan atau keunikan.
3. Mempromosikan kekhasan atau keunikan desa melalui media sosial sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Efisiensi atas capaian sasaran Meningkatkan Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa dengan indikator Jumlah Desa Tematik sebesar 0,75% atau Rp3.966.240,00,00 dari pagu anggaran sebesar Rp526.150.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp522.183.760,00.



Faktor

- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- Program administrasi pemerintahan desa
- Program penataan desa
- Program peningkatan kerjasama desa
- Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Program

- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- Program administrasi pemerintahan desa
- Program penataan desa
- Program peningkatan kerjasama desa
- Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Efisiensi

Efisiensi atas capaian Sasaran Meningkatkan Status Kemajuan Kemandirian Desa sebesar **9,10%**

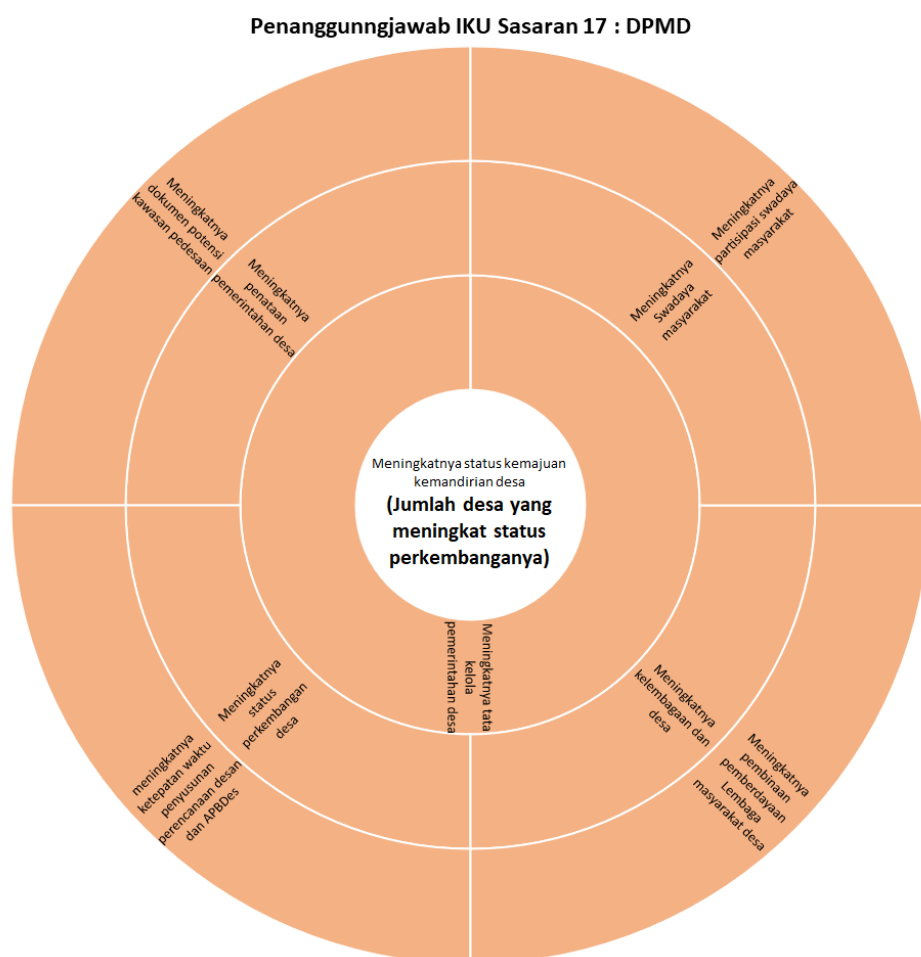
STATUS KEMAJUAN KEMANDIRIAN DESA

— Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya



**SASARAN 17:
MENINGKATNYA STATUS KEMAJUAN KEMANDIRIAN DESA**

Sasaran ini diukur dengan Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator ini yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan. *Crosscutting* antar pengampu dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya

Desa yang meningkat status perkembangannya ini mencakup peningkatan status Desa dari sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang, mandiri atau maju yang setiap tahun dihitung perkembangannya melalui Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Komponen penghitungan Indeks Desa Membangun ini terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa digunakan untuk instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa. Pembaharuan Data Indeks Desa Membangun diperoleh dari hasil data Potensi Desa Badan Pusat Statistik (BPS) dan melalui Survei Desa Membangun berdasarkan indikator Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan secara berkala dan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Capaian Kinerja untuk indikator Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya **pada Tahun 2022** adalah sebesar 134,15% dengan realisasi 55 desa dari target 41 desa.

Jika membandingkan realisasi Tahun 2022 **dengan Target RPJMD** sejumlah 25 desa, realisasi kinerja Tahun 2022 atau di tahun ke-4 ini sudah melebihi target sebesar 220%. Capaian Tahun 2022 lebih rendah 134,15% **dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021**.

| Target 2022 | Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Target 2023 (Akhir RPJMD) |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 41 | 55 | 134 | 221 |



Di Jawa Barat, Indeks Desa Membangun (IDM) yang diraih Kabupaten Majalengka pada Tahun 2022 ini adalah 0,7788 dengan status Maju yang diperoleh dari capaian IKS 0,8407, IKE 0,7112, dan IKL 0,7844. Capaian indeks tersebut menempatkan Kabupaten Majalengka di posisi ke-5 teratas di Provinsi Jawa Barat dan posisi ke 41 secara Nasional. Nilai IDM Kabupaten Majalengka berada di atas IDM Provinsi Jawa Barat yang memperoleh nilai 0,7529 dengan status Maju dan juga berada di atas rata-rata Nasional IDM senilai 0,6724.

| IDM Kabupaten Majalengka | IDM Provinsi Jawa Barat | IDM Nasional |
|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 0,77 | 0,75 | 0,67 |

Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini yaitu meningkatnya swadaya masyarakat, meningkatnya penataan pemerintahan desa dan meningkatnya kelembagaan desa. Target kinerja ini bisa tercapai berkat adanya **upaya** dari Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui:

1. Penyusunan data tata wilayah desa.
2. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan administrasi infrastruktur pedesaan dan dana desa bagi 330 desa.
3. Pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan SDM Aparatur pengelola PADes.
4. Pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan laporan evaluasi APBDes bagi 330 desa.
5. Pendidikan dan pelatihan pengurus BPD dan aparatur desa bagi 160 orang.
6. Pembinaan pengurus pengelola BUMDes bagi 60 orang.
7. Penyusunan profil desa dan kelurahan berbasis IT bagi 343 Desa/Kelurahan.
8. Pembinaan penyusunan pengelolaan aset desa bagi 330 Desa.
9. Pelaksanaan padat karya, kegiatan padat karya tunai.
10. Pelaksanaan TNI Bhakti Desa Sehat (TBDS) raharja pada 1 Desa, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada 1 Desa, TNI Manunggal Sindang Kasih (TMSK) pada 1 Desa, Bhakti Siliwangi Satata Sariksa (BSMSS) pada 1 Desa, TNI Bhakti Desa Mandiri (TBDM) pada 1 Desa.



11. Fasilitasi kelembagaan masyarakat, lembaga adat, tim penggerak PKK dan Posyandu dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
12. Penyediaan sarana prasarana RW sebanyak 26 unit, pelaksanaan gelar Teknologi Tepat Guna sebanyak 3 kali.
13. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berupa pemberian perlengkapan olahraga, perlengkapan pendidikan, pemberian perlengkapan ibadah bahan baku pembangunan jembatan dan pemberian stimulan semen di 26 Kecamatan.
14. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PKK di 343 Desa/Kelurahan.



Selain itu intervensi **program** dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

| No | Program | Pengampu | Anggaran |
|----|---|--|--------------------|
| 1. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Rp4.363.249.400,00 |
| 2. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Rp5.426.336.320,00 |
| 3. | Program Penataan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Rp500.000.000,00 |
| 4. | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Rp10.096.130.152 |
| 5. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan | Rp1.051.129.600 |

Untuk pencapaian target kinerja indikator **Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya**, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pada **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** serta **Kecamatan** dengan total anggaran sebesar Rp21.436.845.472,00 dan terserap sebesar Rp19.486.638.009,00 sehingga **terdapat efisiensi sebesar 9,10% atau sebesar Rp 1.950.207.463,00.**

Akuntabilitas Keuangan

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Serapan Anggaran (%) |
|-----|---|--|-------------|----------------------|
| 1. | Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama | Persentase rata-rata jamaah beraktivitas di Rumah Ibadah | 100 | 83,79 |
| 2. | Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | 91,83 | 99,40 |
| 3. | Pengurangan tingkat kemiskinan | Angka Kemiskinan | 90,45 | 88,74 |
| 4. | Penurunan Prevalensi Stunting | Angka Stunting | 104,2 | 91,75 |
| 5. | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah penyakit masyarakat | 80 | 86,25 |
| 6. | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | 95,84 | 95,55 |
| 7. | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | 100 | 97,73 |
| 8. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 100 | 96,27 |

| | | | | |
|-----|---|--|--------|-------|
| 9. | Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | 94,45 | 93,09 |
| 10. | Meningkatnya mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | 100,29 | 93,56 |
| 11. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | 101,07 | 82,76 |
| 12. | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak | 100,01 | 99,16 |
| 13. | Meningkatnya kesejahteraan petani | Laju peningkatan PDRB sektor pertanian | 568 | 99,16 |
| 14. | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | 96,30 | 97,92 |
| 15. | Meningkatnya investasi sektor industri | Laju pertumbuhan sektor industri | 266,8 | 96,16 |
| 16. | Meningkatnya ekonomi perdesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | 100 | 99,25 |
| 17. | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | 134,15 | 90,90 |

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2022 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD yaitu sebesar 137%. Dari 17 IKU, sebanyak 11 IKU tercapai dengan rincian delapan IKU mencapai 100% dan tiga IKU mencapai lebih dari 100%. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen dan kolaborasi antar Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugas.

Ada pula enam sasaran strategis RPJMD yang belum tercapai maksimal sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang diantaranya (1) sasaran menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor, upaya yang dapat dilakukan yaitu memaksimalkan pemasangan sarana prasarana lalu lintas, mempercepat pengoperasionalan RSUD Talaga, pemeliharaan rutin jalan kabupaten, membuat layanan pengaduan jalan rusak, memperbanyak pembangunan TPS3R. (2) Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan, upaya yang dapat dilakukan yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro. (3) Sasaran terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat, upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan patroli terutama di tempat-tempat yang rawan terjadinya pelanggaran dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku agar jera. (4) Sasaran terwujudnya akuntabilitas kinerja, upaya yang dapat dilakukan yaitu menyelaraskan dokumen perencanaan, pendampingan oleh Kemenpan RB/ Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuat pohon kinerja, *cascading* dan *crosscutting*, optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-SAKIP. (5) Sasaran meningkatnya profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN, upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan profiling untuk mengidentifikasi kompetensi melalui *assessment center*, mengklasifikasikan ASN berdasarkan kompetensi yang dimiliki, menempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya serta mengembangkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan

pelatihan. (6) Sasaran meningkatnya kunjungan wisata, upaya yang dapat dilakukan yaitu pengembangan dan penguatan objek wisata khas, memperbaiki dan merawat fasilitas objek wisata, meningkatkan promosi, menyediakan layanan penunjang, menentukan tarif yang bersaing, meningkatkan kapasitas SDM dan meningkatkan kerja sama (*networking*) dengan *stakeholder* terkait.

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2022 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada Tahun 2022 sebesar 4,45% atau Rp74.334.877.779,00.

Pemerintah Kabupaten majalengka terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat.

LAMPIRAN



Lampiran I
Perjanjian Kinerja



BUPATI MAJALENGKA

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Majalengka, November 2022
BUPATI MAJALENGKA

[Handwritten Signature]
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KABUPATEN MAJALENGKA



| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Tujuan 1 : Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | |
| 1. | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama | Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah | 5 |
| | Tujuan 2.1 : Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor | 1. Indeks Gini 2. Angka Kemiskinan 3. Angka Stunting | |
| 2. | Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor | Indeks Gini | 0,337 |
| 3. | Pengurangan Tingkat Kemiskinan | Angka Kemiskinan | 10,80 |
| 4. | Penurunan Prevalensi Stunting | Angka Stunting | 4 |
| | Tujuan 2.2 : Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | |
| 5. | Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | 10 |
| | Tujuan 3 : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi | |
| 6. | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP | BB |
| 7. | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | Opini BPK RI | WTP |
| 8. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B |
| 9. | Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN | Indeks Profesionalitas ASN | 60,5 |
| | | Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB | N/A |
| | Tujuan 4 : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia | |
| 10. | Meningkatnya Mutu pendidikan | Indeks Pengetahuan | 58,8 |
| 11. | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Indeks Kesehatan | 77,26 |
| 12. | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik | 60,75 |
| 13. | Meningkatnya kesejahteraan petani | Nilai Tukar Petani | N/A |
| | | Laju Peningkatan PDRB Sektor Pertanian | 1,0 |
| 14. | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | 850.000 |
| 15. | Meningkatnya Investasi sektor Industri | Jumlah industri baru | N/A |
| | | Laju Pertumbuhan Sektor Industri | 5 |

| | | | |
|-----|---|---|----|
| 16. | Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa | Jumlah desa tematik | 18 |
| | Tujuan 5 : Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa | Indeks Desa Membangun | |
| 17. | Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa | Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya | 41 |

| No. | Program | Jumlah Anggaran | Ket |
|-----|---|-------------------|------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1,334,010,645,290 | APBD |
| 2 | Program Pengelolaan Pendidikan | 507,944,949,514 | APBD |
| 3 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 192,965,799,977 | APBD |
| 4 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 120,476,299,239 | APBD |
| 5 | Program Pengembangan Perumahan | | APBD |
| 6 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 10,215,418,100 | APBD |
| 7 | Program Pemberdayaan Sosial | 390,540,000 | APBD |
| 8 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 325,000,000 | APBD |
| 9 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | 1,930,000,000 | APBD |
| 10 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 50,000,000 | APBD |
| 11 | Program Pendaftaran Penduduk | 10,800,000 | APBD |
| 12 | Program Penataan Desa | 500,000,000 | APBD |
| 13 | Program Pengendalian Penduduk | 261,589,800 | APBD |
| 14 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 8,248,326,431 | APBD |
| 15 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | 517,950,000 | APBD |
| 16 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 96,650,000 | APBD |
| 17 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 620,559,000 | APBD |
| 18 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektor | 106,620,000 | APBD |
| 19 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 51,900,000 | APBD |
| 20 | Program Pengembangan Kebudayaan | 405,100,000 | APBD |
| 21 | Program Pembinaan Perpustakaan | 99,550,000 | APBD |
| 22 | Program Pengelolaan Arsip | 116,664,100 | APBD |
| 23 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 769,000,000 | APBD |
| 24 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 1,300,000,000 | APBD |
| 25 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | 824,544,291 | APBD |
| 26 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 13,608,588,600 | APBD |
| 27 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | 15,561,851,080 | APBD |
| 28 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1,474,685,000 | APBD |
| 29 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 550,157,159,129 | APBD |
| 30 | Program Kepegawaian Daerah | 2,675,866,800 | APBD |
| 31 | program pengembangan sumber daya manusia | 6,074,039,400 | APBD |
| 32 | program penelitian dan pengembangan daerah | 556,679,600 | APBD |
| 33 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1,681,480,000 | APBD |
| 34 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 1,341,027,300 | APBD |
| 35 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | 122,150,000 | APBD |

| | | | |
|----|--|----------------|------|
| 36 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 2,215,530,400 | APBD |
| 37 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 5,833,146,000 | APBD |
| 38 | Program Kawasan Permukiman | | APBD |
| 39 | Program Penanggulangan Bencana | 2,314,152,489 | APBD |
| 40 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 748,815,400 | APBD |
| 41 | Program Perlindungan Perempuan | 100,000,000 | APBD |
| 42 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 633,764,187 | APBD |
| 43 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 1,453,000,000 | APBD |
| 44 | Program Pencatatan Sipil | 9,600,000 | APBD |
| 45 | Program Peningkatan Kerjasama Desa | 10,096,130,152 | APBD |
| 46 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 10,091,091,900 | APBD |
| 47 | Program Aplikasi Informatika | 643,727,000 | APBD |
| 48 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | 40,000,000 | APBD |
| 49 | Program Promosi Penanaman Modal | 139,600,000 | APBD |
| 50 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 5,332,495,000 | APBD |
| 51 | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | 59,700,000 | APBD |
| 52 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | | APBD |
| 53 | Program Pemasaran Pariwisata | 760,120,100 | APBD |
| 54 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 6,864,088,900 | APBD |
| 55 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 1,057,616,657 | APBD |
| 56 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | 3,327,882,684 | APBD |
| 57 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 2,077,515,700 | APBD |
| 58 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2,951,095,821 | APBD |
| 59 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 1,083,865,500 | APBD |
| 60 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 11,005,591,081 | APBD |
| 61 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 2,260,163,000 | APBD |
| 62 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | 151,236,400 | APBD |
| 63 | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | 2,580,000,000 | APBD |
| 64 | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | 5,549,093,200 | APBD |
| 65 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 840,911,130 | APBD |
| 66 | Program Rehabilitasi Sosial | 3,089,739,900 | APBD |
| 67 | Program Penempatan Tenaga Kerja | 15,329,400,000 | APBD |
| 68 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 125,000,000 | APBD |
| 69 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | | APBD |
| 70 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | 1,772,250,000 | APBD |
| 71 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 82,200,000 | APBD |
| 72 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 5,426,336,320 | APBD |
| 73 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 5,963,713,750 | APBD |
| 74 | Program Pelayanan Penanaman Modal | 392,300,000 | APBD |
| 75 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 250,000,000 | APBD |
| 76 | Program Pembinaan Sejarah | 25,900,000 | APBD |
| 77 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 340,000,000 | APBD |
| 78 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 6,300,000 | APBD |

| | | | |
|-----|---|---------------|------|
| 79 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | APBD |
| 80 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | | APBD |
| 81 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 40,394,900 | APBD |
| 82 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 7,732,202,574 | APBD |
| 83 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 417,656,600 | APBD |
| 84 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 383,965,000 | APBD |
| 85 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 932,737,250 | APBD |
| 86 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 2,242,190,000 | APBD |
| 87 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | 590,000,000 | APBD |
| 88 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 1,311,917,900 | APBD |
| 89 | Program Hubungan Industrial | 117,791,500 | APBD |
| 90 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | | APBD |
| 91 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | | APBD |
| 92 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | 7,832,576,100 | APBD |
| 93 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | | APBD |
| 94 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 11,700,000 | APBD |
| 95 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 4,363,249,400 | APBD |
| 96 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | 5,000,000 | APBD |
| 97 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 383,914,000 | APBD |
| 98 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | | APBD |
| 99 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 413,700,000 | APBD |
| 100 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | APBD |
| 101 | Program Pengembangan Ekspor | 609,954,000 | APBD |
| 102 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1,818,303,259 | APBD |
| 103 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 400,000,000 | APBD |
| 104 | Program Penanganan Bencana | 1,093,700,000 | APBD |
| 105 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 125,000,000 | APBD |
| 106 | program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) | | APBD |
| 107 | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | 150,000,000 | APBD |
| 108 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | APBD |
| 109 | Program Pengelolaan Permuseuman | | APBD |
| 110 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | | APBD |
| 111 | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | 153,000,450 | APBD |
| 112 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1,037,479,600 | APBD |
| 113 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | 166,255,000 | APBD |
| 114 | Program Pengembangan Permukiman | 6,164,999,900 | APBD |
| 115 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 62,900,000 | APBD |
| 116 | Program Perlindungan Khusus Anak | 125,000,000 | APBD |
| 117 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | 167,734,500 | APBD |
| 118 | Program Penyuluhan Pertanian | 4,341,942,000 | APBD |

| | | | |
|-----|--|--------------------------|------|
| 119 | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 67,100,000 | APBD |
| 120 | Program Penataan Bangunan Gedung | 19,505,035,000 | APBD |
| 121 | Program Pengembangan UMKM | | APBD |
| 122 | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | 11,360,842,000 | APBD |
| 123 | Program penyelenggaraan jalan | 160,018,715,622 | APBD |
| 124 | program penanganan pengaduan lingkungan hidup | | APBD |
| 125 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 737,100,000 | APBD |
| 126 | Program Pengelolaan Persampahan | 5,588,405,200 | APBD |
| 127 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 1,232,278,000 | APBD |
| | | 3,130,219,245,077 | |

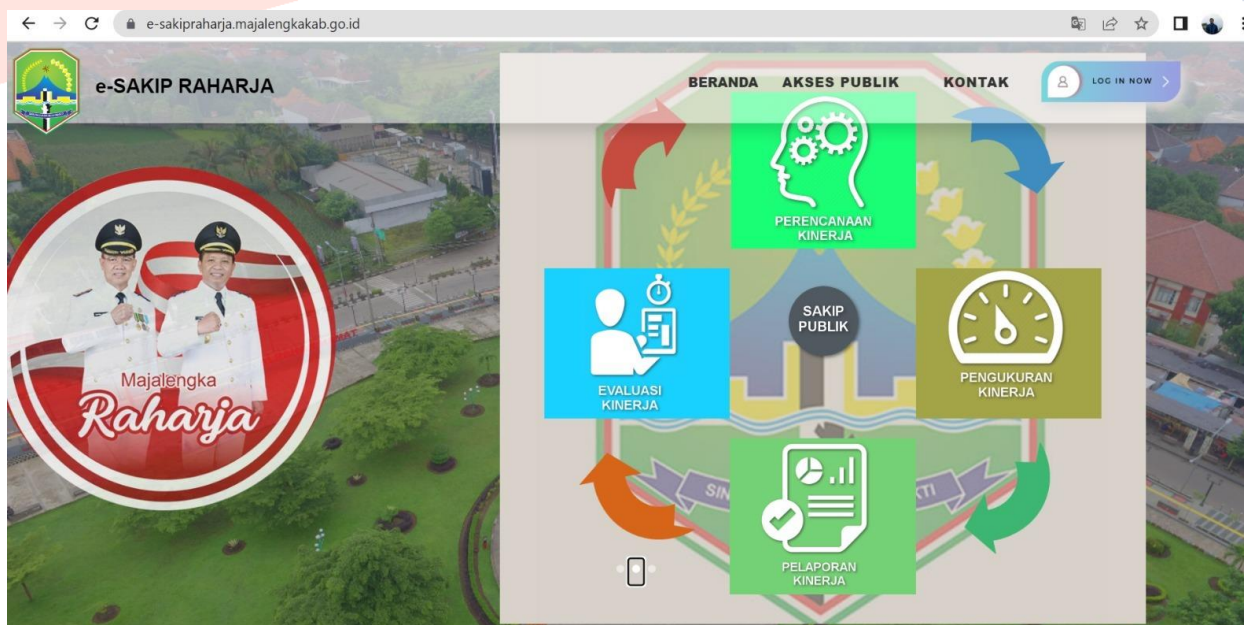


Majalengka, November 2022
BUPATI MAJALENGKA

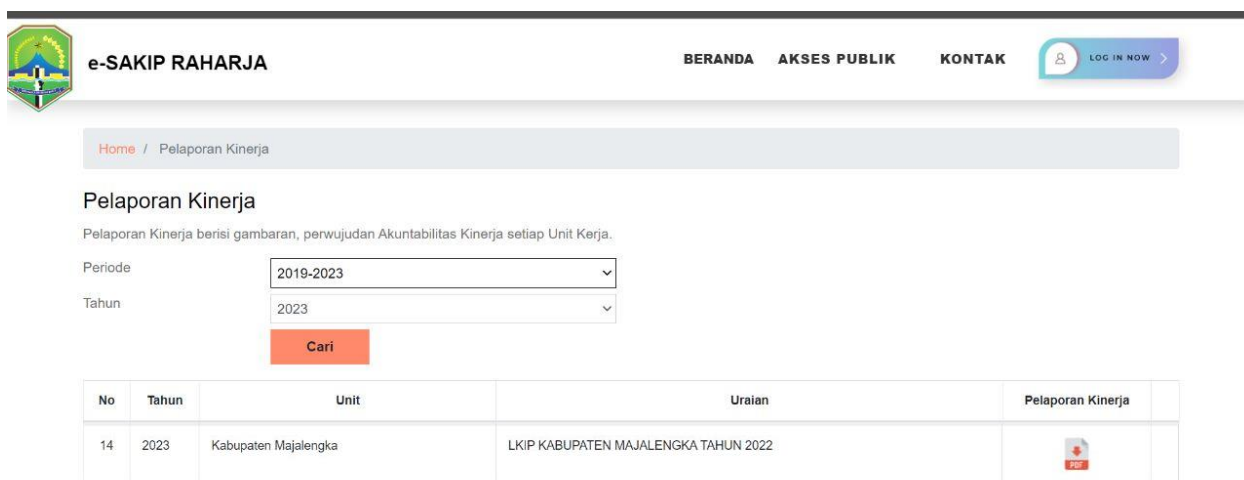
me
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Lampiran II

Aplikasi e-SAKIP RAHARJA Kabupaten Majalengka



Publikasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Lampiran III

Bukti Penyebaran LKIP kepada Perangkat Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka 45418,
Telepon (0233) 281022 – 281443 Faximilie (0233) 281475
E-mail : setda.majalengka@gmail.com

Majalengka, 20 Maret 2023

Nomor : OT.07.01 / 522.B / Org
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Penyebaran Informasi LKIP
Pemda Tahun 2022**

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah

di -
Tempat

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang menyajikan realisasi capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah pada Tahun 2022 yang dapat digunakan sebagai bahan tindak lanjut bagi Kepala Perangkat Daerah untuk perbaikan capaian kinerja pada Tahun 2023.

Selanjutnya kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk dapat mengakses dokumen LKIP Tahun 2022 tersebut pada tautan shorturl.at/nsKZ5 dan dimohon untuk membagikannya kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

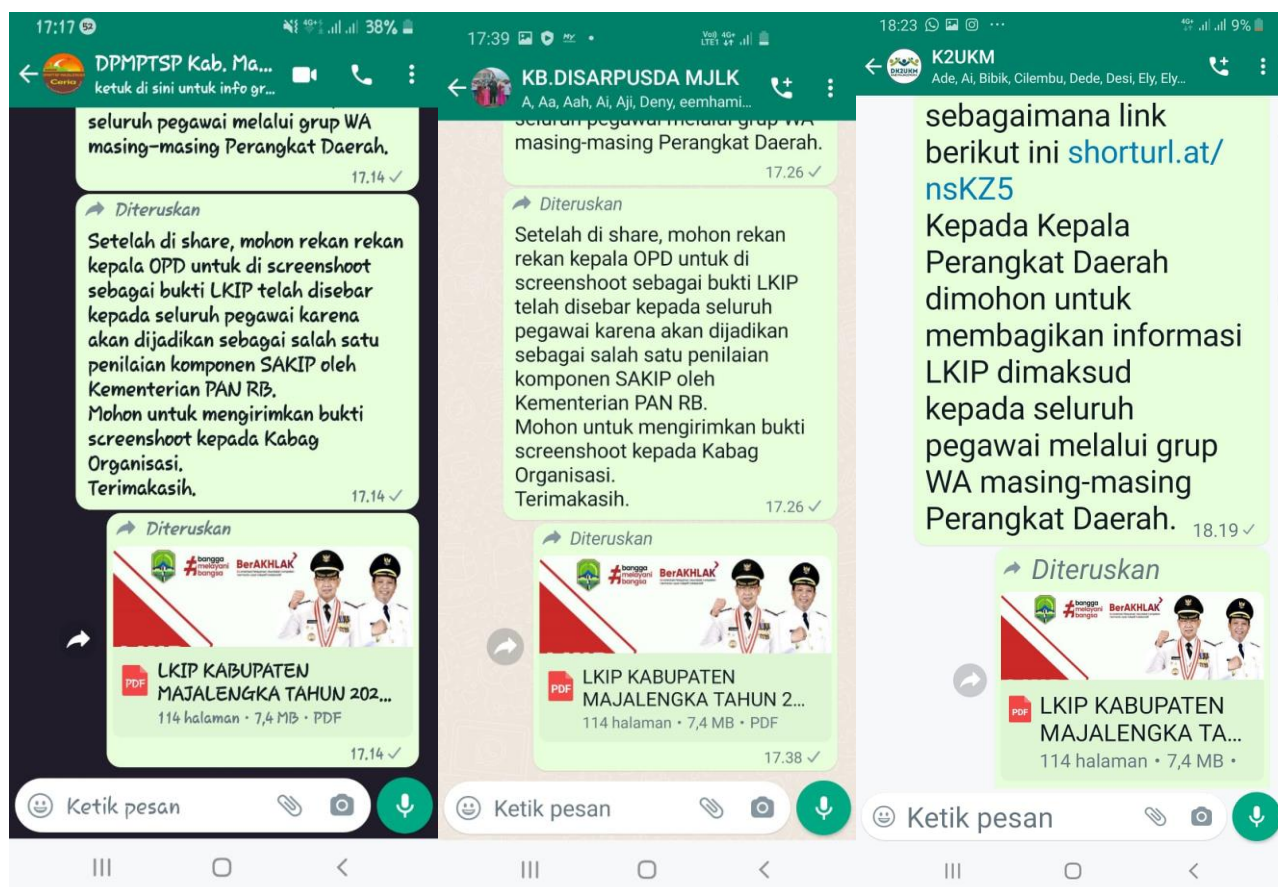
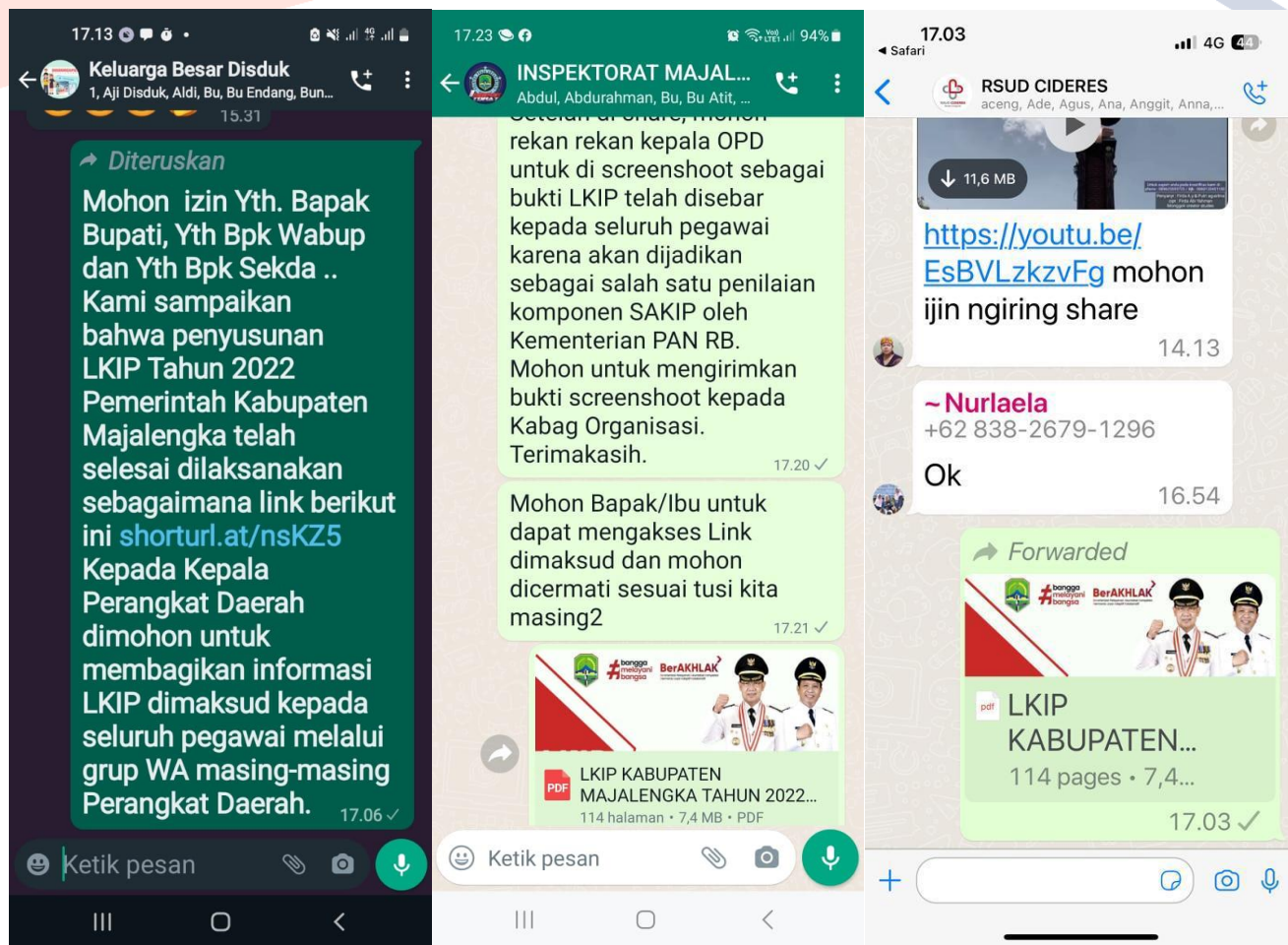


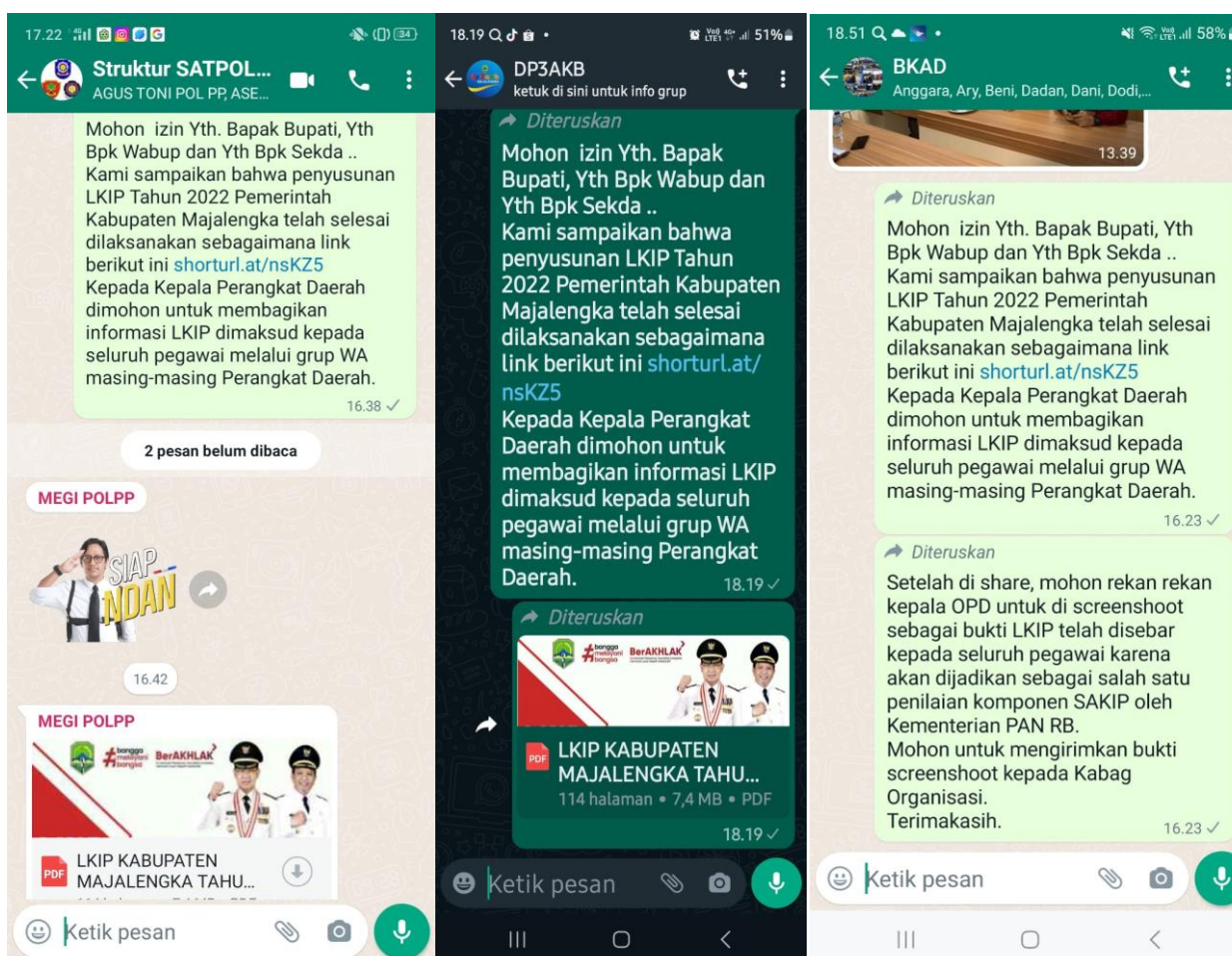
Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,
Drs. H. EMAN SUHERMAN, MM.
Pembina Utama Madya

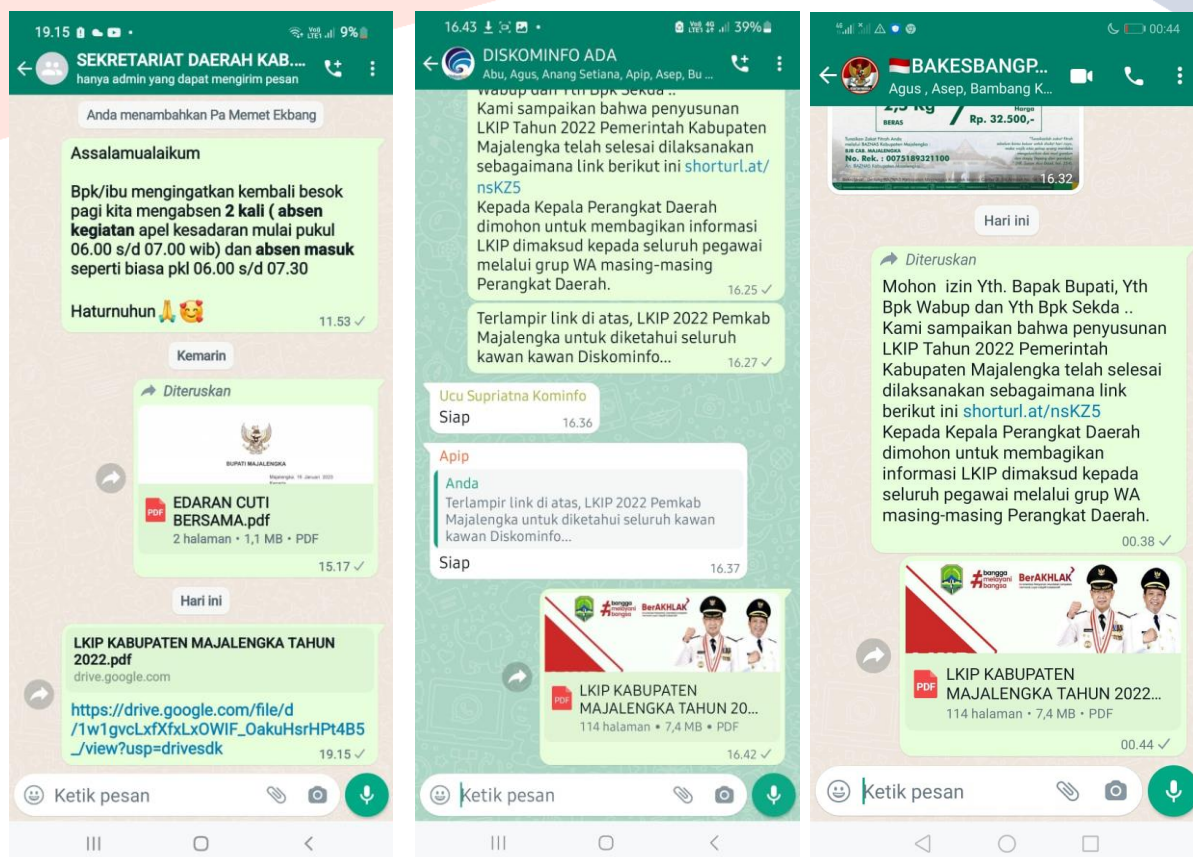
Tembusan:

Yth. Bapak Bupati Majalengka (sebagai laporan)

Penyebaran LKIP Tahun 2022 melalui grup Whatsapp seluruh Perangkat Daerah.







Penyebaran LKIP Tahun 2022 melalui Aplikasi Klik ASN yang merupakan aplikasi absensi seluruh ASN di Kabupaten Majalengka.



| VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN | SATUAN | METADATA SASARAN | KONDISI AWAL | | 2019 | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN | | | | 2020 | | | | TARGET SETELAH PERUBAHAN | | | | KONDISI AKHIR | PERANGGANG JABAN PERCAPAIAN TARGET | STRATEGI PENCAPAIAN | |
|--|---|--------|---|--------------|---|--------|---------------|-------|-------|-----------------------------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------|--|--|---|--|--|
| | | | | 2017 | 2018 | TARGET | REALI SASI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TARGET | REALI SASI | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | KEBIJAKAN | PROGRAM | | | | |
| 8.2.1.1 | Penurunan Prevalensi Stunting | 3 | Angka Stunting | Person | Persentase Jumlah Balita Pendek Balita Pendek = Jumlah Balita yang dikur x 100% | N/A | N/A | - | 3,50 | - | - | - | - | 1,00 | 3,29 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | Dinas Pendidikan | Peningkatan gini masyarakat | 1 | Program Pembelajaran Pendidikan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kecamatan | | 2 | Program Pemerohan Uyup Kesehatan Peningkatan Dan Uyup Kesehatan Masyarakat | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kecamatan | | 3 | Program Pembelajaran Masyarakat Balita Kesehatan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas FKPP | | 4 | Program Pembelajaran Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas FKPP | | 5 | Program Pembelajaran Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial | | 6 | Program Peningkatan Dan Jaminan Sosial | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas EPS | | 7 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Kesehatan Pangan Masyarakat | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas EPS | | 8 | Program Peningkatan Pembinaan Budaya | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas EPS | | 9 | Program Penyuluhan Pemasakan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas LH | | 10 | Program Peningkatan Pemasakan dan/atau Kecukupan Lingkungan Melayu | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas PMD | | 11 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas PMD | | 12 | Program Pembelajaran Lembaga Kamasyarakata n, Lembaga Adat Dan Masyarakat lainnya Adat | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas PjABD | | 13 | Program Pembelajaran Dan Peningkatan Kapasitas Sajabira (S) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas PjABD | | 14 | Program Peningkatan Penduduk | | |
| 8.2.2 | Meningkatkan stunasi dan kemudi yang berhasil di masyarakat | 1 | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Person | | N/A | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Dinas PjABD | | 10 | Program Peningkatan Kapasitas Berencana (KB) | | |
| 8.2.1.1 | Terwujudnya stunasi dan kemudi yang aman, sehat, dan tertib di masyarakat | 1 | Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat | Person | $\frac{(d_1 - d_2)}{d_1} \times 100\%$ d1: Jumlah Penyakit tahun n-1 d2: Jumlah Penyakit Masyarakat tahun n | N/A | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Sepai SP dan Damar | Meningkatkan rata-rata stunasi, dan tertib di masyarakat | 1 | Program Peningkatan Kapasitas Berencana Dan Keterlibatan Umat | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Berkelompok | | 2 | Program Peningkatan Kapasitas Berencana Dan Keterlibatan Umat | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kecamatan | | 3 | Program Koordinasi Kapasitas Berencana Dan Keterlibatan Umat | | |
| Misi 3 Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | Meningkatkan kemampuan pemerintahan yang baik | 1 | Indeks Burekrasi | Point | | 50,25 | 53,25 | 55,50 | 51,79 | 59,50 | 59,50 | 59,00 | 59,00 | 59,50 | 59,50 | 53,53 | 55,00 | 58,00 | 61,00 | 61,00 | | | | | |
| 8.3.1.1 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja | 1 | Nas SAKIP | nilai | Hasil nilai SAKIP Kabupaten Majoengko yang dikeluarkan oleh Kementerian | CC | B | B | B | BB | A | A | A | A | B | BB | BB | BB | BB | BB | Inspektorat | Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | 1 | Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Dan Akuntansi | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Daerah | | 2 | Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bagian Bendah | | 3 | Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | | |
| 8.3.1.2 | Terwujudnya akuntabilitas keuangan | 1 | Opini BPK RI | opini | Hasil penilaian/opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | BEAD | Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | 1 | Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BEAD | | 2 | Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | | |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN | SATUAN | METADATA SASARAN | KONDISI AWAL | | 2019 | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN | | | | 2020 | | TARGET SETELAH PERUBAHAN | | | KONDISI AKHIR | PENGANGGUNG JAWAB PERCAPAIAN TARGET | STRATEGI PERCAPAIAN | | | |
|--|---|--|------------------|--|------|--------|-----------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------------|-----------|---------|---------------|---|---|--|---|--|
| | | | | 2017 | 2018 | TARGET | REALISASI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TARGET | REALISASI | 2021 | 2022 | 2023 | KEBIJAKAN | PROGRAM | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.4.1.6 | Meningkatnya investasi sektor industri | 1. Jumlah industri baru | Unit | banyaknya industri baru yang dibangun pada tahun n | 0 | 0 | 40 | 56 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | - | - | - | Dinas Perdag. | Meningkatkan investasi industri kecil dan menengah berbasis ekonomi kreatif | 1 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemulihan Perindustrian dan Kabupaten Industri | | |
| | | | | | 0 | 0 | 40 | 56 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - | Dinas Perdag. | Meningkatkan investasi industri kecil dan menengah berbasis ekonomi kreatif | 2 | Program Pengembangan dan Pembangunan Industri Tradisional |
| S.4.1.6 | Meningkatnya investasi sektor industri | 1. Laju Pertumbuhan Sektor Industri | Persen | banyaknya industri baru yang dibangun pada tahun n | 0 | 0 | 26 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 17 | 18 | 18 | 59 | Dinas KPP | Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang diadani dengan berfokus pada target ketahanan pangan dan gizi | 1 | Program Peningkatan Sistem Pemukiman Desa |
| | | | | | 0 | 0 | 26 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 17 | 18 | 18 | 59 | Dinas KPP | Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang diadani dengan berfokus pada target ketahanan pangan dan gizi |
| S.4.1.7 | Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi unggulan desa | 1. Jumlah desa tematik | desa | banyaknya desa tematik pada tahun n | 0 | 0 | 26 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 17 | 18 | 18 | 59 | Dinas Perbud | Meningkatkan Desa Wisata, desa digital, desa tematik berbasis potensi unggulan desa | 1 | Program Pengembangan Desa Perikanan |
| | | | | | 0 | 0 | 26 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 17 | 18 | 18 | 59 | Dinas Perbud | Meningkatkan Desa Wisata, desa digital, desa tematik berbasis potensi unggulan desa |
| Misi 5 - Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan | | | | | N/A | 0,647 | 0,567 | 0,657 | 0,671 | 0,656 | 0,696 | 0,710 | 0,696 | 0,710 | 0,696 | 0,710 | 0,696 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | | | | |
| S.5.1 | Meningkatkan kemandirian desa untuk ketahanan masyarakat desa | 1. Indeks Desa Membangun | pin | | N/A | 0,647 | 0,567 | 0,657 | 0,671 | 0,656 | 0,696 | 0,710 | 0,696 | 0,710 | 0,696 | 0,710 | 0,696 | 0,710 | 0,710 | | | | | |
| S.5.1.1 | Meningkatnya akses kemandirian desa | 1. Jumlah desa yang membangun akses kemandirian desa | desa | Jumlah desa yang membangun akses kemandirian desa | N/A | 109 | 36 | 52 | 51 | 52 | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 | 52 | 41 | 28 | 221 | Dinas PPD | Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi tingkat desa | 1 | Program Pemukiman Lembaga Kesejahteraan Masyarakat, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Mukim Adat | |

| VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN | SATUAN | METADATA SASARAN | KONDISI AWAL | | 2019 | | | | TARGET SEBELUM PERUBAHAN | | | | 2020 | | TARGET SETELAH PERUBAHAN | | | KONDISI AKHIR | PENGANGGUNG JAWAB PERCAPAIAN TARGET | STRATEGI PERCAPAIAN | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------|------------------|--------------|------|--------|-----------|------|------|--------------------------|------|--------|-----------|------|------|--------------------------|-----------|---------|---------------|-------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | 2017 | 2018 | TARGET | REALISASI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TARGET | REALISASI | 2021 | 2022 | 2023 | KEBIJAKAN | PROGRAM | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber: Perda Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022



Lampiran V

Prestasi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2022



ANUGERAH HUMAS INDONESIA 2022

SELAMAT & SUKSES

KARNA SOBAHI

PEMENANG PEMIMPIN TERPOPULER DI MEDIA DIGITAL 2022
ANUGERAH HUMAS INDONESIA 2022

BAPAK BUPATI MAJALENGKA

Karna Sobahi
Majalengka
Rakyatnya

Sumber : Kreatif/Konseptor Prokomim
Tgl. Prod. : 18-10-2022

ANUGERAH HUMAS INDONESIA 2022

Pak Bupati Meraih Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2022

Dari Menteri Desa PDTT Republik Indonesia

Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd.

PENGHARGAAN PERTAMA
BUPATI MAJALENGKA

Dr. H. Karina Sobahi, M.M.Pd.
BUPATI MAJALENGKA

ANUGERAH DAN KATA KUNCI DALAM MEMBANGUN PERSEKUTUAN PEMBANGUNAN DESA
Selayang-Selayang Desa di Kabupaten Majalengka Menggapai Sukses
Berkembang, Maju, dan Mandiri

Jakarta, 18 Oktober 2022

Sumber : Kreatif/Konseptor Prokomim
Tgl. Prod. : 18-10-2022

ANUGERAH HUMAS INDONESIA 2022

Keren! Pak Bupati Kembali Menerima Anugerah Penghargaan

Tokoh Literasi Digital Daerah

Dari Gubernur Jawa Barat
Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.

Penghargaan Kategori
KESEHATAN

PENGHARGAAN KATEGORI KESEHATAN

Presented by:
MNC PORTAL
okezone
iNews
Celebrities

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.
Bupati Majalengka

PENGHARGAAN KATEGORI KESEHATAN

Sumber : Kreatif/Konseptor Prokomim
Tgl. Prod. : 23-09-2022

ANUGERAH HUMAS INDONESIA 2022

Keren! Pak Bupati Kembali Menerima Anugerah Penghargaan

Tokoh Literasi Digital Daerah

Dari Gubernur Jawa Barat
Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.

Penghargaan Kategori
KESEHATAN

PENGHARGAAN KATEGORI KESEHATAN

Presented by:
MNC PORTAL
okezone
iNews
Celebrities

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.
Bupati Majalengka

PENGHARGAAN KATEGORI KESEHATAN

Sumber : Kreatif/Konseptor Prokomim
Tgl. Prod. : 23-09-2022

